



# Analisis Gender

Dalam  
Pembangunan  
Pertanian

Mubianto

**ANALISIS GENDER  
DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN  
*Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP)***

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)  
bekerjasama dengan *Women's Support Project II* – CIDA  
Jakarta, Juni 2001**



ANALISIS GENDER  
DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN  
*Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP)*

Edisi Pertama  
Juni 2001

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)  
bekerjasama dengan *Women's Support Project II* – CIDA  
Jakarta, Juni 2001

ISBN : 979-96149-6-1

## KATA PENGANTAR

*Gender Analysis Pathway* (GAP) merupakan alat analisis gender yang dikembangkan oleh Direktorat Kependudukan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Perempuan–BAPPENAS bekerjasama dengan *Women's Support Project Phase II*–CIDA. Dalam proses perkembangannya, dan atas kerjasama dengan CIDA dan ILO, GAP telah diujicobakan di 5 (lima) sektor pembangunan, yaitu ketenagakerjaan, pendidikan, hukum, pertanian, serta koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM). Hasil uji coba tersebut telah dipresentasikan pada acara “Seminar Nasional Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Nasional” di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2001, dan telah memperoleh banyak masukan yang kesemuanya telah dirangkum ke dalam buku ini.

Penyusunan GAP diawali dengan analisis terhadap dampak kebijakan dan program pembangunan Repelita VI terhadap perempuan dan laki-laki. Kesenjangan gender (*gender gap*) dan masalah gender (*gender issues*) yang berhasil diidentifikasi dari kebijakan dan program pembangunan Repelita VI tersebut selanjutnya digunakan sebagai masukan bagi penyusunan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004. Dalam PROPENAS 2000-2004 terdapat 19 (sembilan belas) program pembangunan yang telah responsif gender yaitu dalam pembangunan hukum, ekonomi, politik, pendidikan, serta sosial dan budaya. GAP juga telah diujicobakan pada program-program Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) tahun 2002. Dalam draft REPETA 2002, selain 19 program juga terdapat 7 (tujuh) program lainnya yang telah responsif gender, yaitu program-program dalam pembangunan hukum dan ekonomi. Dengan demikian, sampai buku ini diterbitkan, telah terdapat 26 (dua puluh enam) program di berbagai bidang pembangunan yang responsif gender.

Dalam pembangunan pertanian, 2 (dua) program utama telah dijadikan fokus analisis yaitu: Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Hasil analisis menunjukkan, bahwa ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam pembangunan pertanian. Dengan telah teridentifikasinya berbagai permasalahan gender dalam pembangunan pertanian tersebut, diharapkan para pengambil kebijakan dan para perencana pertanian semakin sensitif dalam

menyusun rencana kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan pertanian yang ditujukan pada upaya memperkecil atau bahkan menghapus kesenjangan gender pada bidang pertanian.

Analisis gender dengan menggunakan GAP merupakan proses panjang yang telah dimulai sejak awal tahun 1999 di bawah koordinasi Direktorat Kependudukan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Perempuan–BAPPENAS, dan melibatkan banyak pihak dari Direktorat Pangan, Pertanian dan Pengairan–BAPPENAS, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik, dan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Pada kesempatan ini, kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya analisis ini khususnya Ir. Sugiyah Mugnieszah, MS dan Ir. Pmalea Fadhillah, MAKami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pula kepada DR. Edeng H. Abdurahman atas dukungan dan masukannya. Di samping itu, masukan dan dukungan manajemen dari WSP II, yang terdiri dari Elizabeth Carriere, Beverly Boutilier, Lenore Rogers, Dewayani, dan Dewi, serta khususnya DR. Linda Miranda sangat membantu dalam memfasilitasi terselenggaranya berbagai diskusi dan penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan untuk Yayasan Jurnal Perempuan yang telah membantu dalam penyuntingan bahasa. Penghargaan khusus diberikan kepada Deputy Bidang Sumberdaya Manusia dan Pranata Pemerintahan–BAPPENAS atas pengarahannya dan dukungannya, serta kepada seluruh staf di lingkungan Direktorat Kependudukan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Perempuan–BAPPENAS yang telah membantu mempercepat penyelesaian penulisan buku ini.

Sebagai suatu analisis awal, buku ini masih akan terus disempurnakan. Untuk itu, saran, kritik, dan masukan dari seluruh pihak senantiasa diharapkan. Semoga langkah awal dari pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian ini dapat menjadi landasan di masa mendatang.

Jakarta, Juni 2001

Direktur Kependudukan, Kemasyarakatan  
dan Pemberdayaan Perempuan

**Dra. Nina Sardjunani, MA**

## TIM PENYUSUN

- Penanggungjawab : Dra. Nina Sardjunani, MA – BAPPENAS
- Koordinator : Lenny N. Rosalin, SE, MSc – BAPPENAS
- Penulis : Ir. Siti Sugiah M. Mugniesyah, MSc (PSW–LP–IPB)  
Ir. Pamela Fadhilah, MA – Departemen Pertanian
- Penyunting Materi : Dra. Nina Sardjunani, MA – BAPPENAS  
Lenny N. Rosalin, SE, MSc – BAPPENAS
- Nara Sumber : Direktorat Pangan, Pertanian dan Pengairan –  
BAPPENAS  
Departemen Pertanian  
Departemen Kehutanan dan Perkebunan  
Badan Pusat Statistik  
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

## LAPORAN TIM PENULIS

Penulisan Analisis Gender Dalam Pembangunan Pertanian : Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP) ini dimulai sejak September 1999. Studi tersebut selain menggunakan analisis data sekunder, wawancara mendalam juga melalui suatu diskusi kelompok terarah dan seminar-seminar yang melibatkan pejabat dan tim ahli dari *stakeholders*, yang tergabung dalam Tim GAP Sektor Pertanian I (Lampiran 13) serta para konsultan Studi GAP untuk sektor lainnya, yaitu Ketenagakerjaan, Pendidikan, Hukum dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Setelah melalui serangkaian diskusi dan seminar yang melibatkan Tim GAP Sektor Pertanian yang dibentuk oleh Bappenas bekerjasama dengan WSP II-CIDA, dan sejalan dengan telah ditetapkannya PROPENAS 2000-2004, maka hasil studi tersebut diadaptasi sesuai dengan perubahan kebijakan yang tertuang pada PROPENAS 2000-2004 dengan melibatkan Tim GAP Sektor Pertanian II (Lampiran 14) dan Tim Gender yang ada di lingkungan Departemen Pertanian, serta dengan melibatkan konsultan internasional, DR. Linda Miranda. Selanjutnya kami melakukan reorganisasi penulisan sesuai dengan kerangka acuan yang disusun oleh Bappenas dan kesepakatan dengan Tim GAP Sektor Pertanian, khususnya dalam penyusunan Repeta 2002, sehingga menjadi buku ini.

Penulis mengakui bahwa tulisan ini merupakan suatu studi awal bagi terwujudnya pengarusutamaan gender dalam sektor pertanian dan merupakan suatu karya bersama semua pihak yang menjadi *stakeholders* studi ini. Untuk itu kami haturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Biro Kependudukan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Perempuan, Bappenas, pertama kepada Bapak DR. Edeng H. Abdurahman dan kemudian Ibu Dra. Nina Sardjunani, MA atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi bagian dalam sejarah pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya pada sektor pertanian. Hal yang sama juga kami sampaikan kepada Elizabeth Carriere, Beverly Boutilier, Lenore Rogers, Dewayani dan Dewi dari WSP II. Selanjutnya, kami merasa bersyukur memperoleh kesempatan belajar mengimplementasikan suatu metodologi dalam pengarusutamaan gender yaitu GAP dari para guru kami, yakni Ibu DR. Soedarti Surbakti (BPS), Ibu DR. Yulfita Rahardjo (LIPI), Lenny N. Rosalin, SE, MSc (Bappenas) serta juga

masukan-masukan dari penulis sektor lainnya, yakni Ibu Prof. DR. T. Omas Ihromi (UI), Ibu Achie Luhulima, SH, MA (LIPI), Ibu DR. Aida Vitayala S. Hubeis (IPB), Ibu Nursyahbani Katjasungkana, SH (LBH Apik) serta Bapak DR. Ace Suryadi (Depdiknas).

Sebagai suatu hasil studi yang merintis penerapan Analisis GAP dalam Sektor Pertanian, penulis menyadari diperlukannya suatu proses penyesuaian selanjutnya, khususnya untuk merespon terhadap perkembangan kebijakan di sektor pertanian. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi para pembuat kebijakan, khususnya di lingkup Departemen Pertanian, dalam rangka pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat petani kita, melalui pemberdayaan individu laki-laki dan perempuan Petani Indonesia. Amin.

**Penulis**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
TIM PENYUSUN .....	v
LAPORAN TIM PENULIS .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat .....	3
1.3. Metodologi .....	3
1.4. Sistematika Penyajian .....	5
BAB II <i>GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) : ANALISIS KE- BIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN REPELITA VI</i> .....	7
2.1. Kebijakan Pembangunan Pertanian Repelita VI .....	7
2.2. Hasil Analisis Gender Pembangunan Pertanian Dalam Repelita VI .....	11
BAB III. <i>GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) : ANALISIS GENDER PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) 2000 2004</i> .....	13
3.1. Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian .....	13
3.2. Data Pembuka Wawasan .....	16
3.3. Kesenjangan Gender .....	20
3.4. Isu Gender .....	33
BAB IV.    REFORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG RESPONSIF GENDER .....	37
4.1. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang Responsif Gender .....	37
4.2. Indikator Kinerja .....	41
BAB V.    RENCANA AKSI PEMBANGUNAN PERTANIAN .....	47
5.1. Rencana Aksi .....	47
5.2. Indikator Rencana Aksi .....	50

BAB VI. PENUTUP .....	53
LAMPIRAN .....	55
DAFTAR LAMPIRAN .....	57
DAFTAR SINGKATAN .....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mendukung penyetaraan dan persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang dan peraturan tentang hak azazi manusia. Penyetaraan dan persamaan hak tersebut juga diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, 1998, dan 1999; dan selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pemerintah juga menyatakan komitmennya sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Internasional *"Beijing Platform for Action"* sebagai hasil Konferensi Dunia Wanita IV di Beijing, China pada tahun 1995.

Dalam perjalanan sejarah pembangunan di Indonesia, sumberdaya manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan dinyatakan sebagai sumberdaya insani pembangunan yang partisipasinya sangat diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan selama ini dinyatakan sebagai netral, dalam arti jika menyangkut sumberdaya manusia baik itu dalam konteks individu, keluarga, rumah tangga, masyarakat, dan negara secara implisit berlaku atau mencakup laki-laki dan perempuan.

Paradigma pembangunan lama menyatakan bahwa kebijakan itu bersifat netral, namun dalam implementasinya cenderung bias gender, dalam arti yang memiliki akses dan kontrol terhadap berbagai program pembangunan, termasuk dalam program pembangunan pertanian, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya didominasi oleh pihak laki-laki. Hal ini disebabkan masih kuatnya pengaruh budaya patriarkhi di kalangan para penentu kebijakan, perencana dan pelaksana program serta masyarakat petani itu sendiri. Selama ini umum diketahui bahwa secara *de jure*, masyarakat luas menganggap bahwa kepala keluarga (KK) pada keluarga/rumahtangga pertanian itu adalah laki-laki, padahal *de facto* ditemukan adanya KK perempuan pada rumahtangga pertanian. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 1999 menunjukkan bahwa dari sejumlah 47,113 juta penduduk berumur 10 tahun ke atas, terdapat 23,016 juta orang yang lapangan pekerjaan utamanya di sektor pertanian, dengan rasio perempuan per laki-laki sebesar 43,7 untuk di perkotaan dan

63,1 untuk di perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2000). Dilaporkan bahwa perempuan sebagai kepala rumahtangga semakin meningkat jumlahnya, yaitu sekitar 13,2 % pada tahun 1999 (Badan Pusat Statistik, 2000).

Pada dekade terakhir, beberapa ahli yang mengkritisi paradigma pembangunan (Reintjes dkk. (1992), Chambers (1993), Uphoff (1993)) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan pertanian berparadigma lama sangat berorientasi pada transfer teknologi dan mengabaikan sumberdaya manusianya, sehingga tidak menghasilkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Disadari bahwa selama ini perempuan tani telah dilibatkan sebagai pelaku dalam usahatani bahkan diakui oleh para perencana dan pelaksana pembangunan pertanian, antara lain tercermin dari curahan waktu perempuan yang tinggi dalam usahatani (dalam arti luas, seperti usahatani tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan pesanggem serta perikanan). Namun demikian, pengakuan tersebut belum diikuti dengan upaya melibatkan mereka dalam kegiatan peningkatan akses dan kontrol terhadap sumberdaya pembangunan pertanian. Program-program dan proyek-proyek pembangunan pertanian selama ini lebih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan praktis gender (*practical gender needs*) yang cenderung memperkuat peranan domestik perempuan tani dan belum mengarah pada pemenuhan kebutuhan strategis gender (*strategic gender needs*) dalam arti belum meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan perempuan tani untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengembangan usaha tani mereka. Itu sebabnya, dibutuhkan kebijakan pembangunan pertanian berparadigma baru yang menekankan pada proses belajar (*learning process approach*) dan memfokuskan pada pemberdayaan SDM dengan tujuan pemberdayaan keluarga petani/pekebun/nelayan/penghutan, baik laki-laki maupun perempuan.

Pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 Bab Pendahuluan diakui bahwa pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Khusus dalam hal program perempuan dalam pembangunan, meskipun telah diakui adanya kemajuan, namun kemajuan tersebut cenderung bersifat kuantitas —seperti tercermin dalam meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang bekerja di sektor primer—, tapi belum secara kualitas (Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan RI, 2000). Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang tertuang pada GBHN Tahun 1999-2004 pada Bab II Kondisi Umum yang secara

eksplisit menyatakan bahwa status dan peranan perempuan masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki.

Dampak negatif kebijakan pembangunan yang netral telah menimbulkan ketidakadilan gender yang menghambat terwujudnya peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan keluarga pertanian Indonesia. Untuk itu, diperlukan suatu studi yang meninjau kembali berbagai kebijakan pembangunan, khususnya dalam pembangunan pertanian termasuk di dalamnya masyarakat nelayan, peternak, pesanggem, pekebun dan penghutan. Hal ini sangat penting, karena selain dapat mengungkap faktor-faktor penyebab belum terjadinya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan pertanian, juga sebagai upaya untuk menemukan solusi yang tepat yang dapat menjamin terintegrasinya kepentingan perempuan dan laki-laki dalam arus utama pembangunan pertanian di Indonesia.

## 1.2. Tujuan dan Manfaat

Secara umum tulisan ini merupakan studi analisis berorientasi kebijakan (*policy oriented analysis study*) yang bertujuan untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan dan rencana aksi pembangunan pertanian yang responsif gender untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan penyelenggaraan program. Adapun manfaat studi ini adalah untuk memahami situasi faktual dan menemukan formula kebijakan yang dapat mempersempit kesenjangan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan pertanian, serta merumuskan solusi yang lebih operasional yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Pembangunan Pertanian yang responsif terhadap pemenuhan kebutuhan SDM pertanian baik laki-laki maupun perempuan.

## 1.3. Metodologi

Pendekatan teoritis atau kerangka berfikir logik (*logical framework*) yang digunakan dalam studi ini mengacu pada Diagram Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) yang disusun oleh Bappenas, yang disajikan pada Buku I. Sesuai dengan prosesnya, pelaksanaan analisis kebijakan dan implementasi pembangunan pertanian dilakukan melalui 2 tahapan kegiatan, yaitu :

- (1) Review dan analisis terhadap sasaran umum kebijakan, program utama dan penunjang, khususnya untuk sektor-sektor pertanian serta kehutanan dan perkebunan dalam REPELITA VI ;
- (2) Review dan analisis terhadap sasaran umum kebijakan, program utama dan kegiatan pokok, khususnya program-program

pembangunan pertanian yang tertuang pada Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 2001.

Pada tahapan pertama, isu-isu yang dikembangkan dalam studi analisis ini mencakup :

- (1) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian Melalui Peningkatan Kesempatan Bekerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian;
- (2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian Dalam Kelembagaan Pertanian;
- (3) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian Dalam IPTEK.

Selanjutnya, untuk tahapan kedua, isu-isu yang dikembangkan terutama mengacu pada kegiatan-kegiatan pokok dalam PROPENAS yang terkait dengan prioritas Rencana Strategis program pembangunan pertanian yang mencakup:

- (1) Pengentasan Kemiskinan;
- (2) Diversifikasi Pangan; dan
- (3) Pengembangan Agribisnis Hilir, dimana ketiganya berhubungan erat dengan aspek-aspek SDM dan kelembagaan pertanian.

Pemilihan isu-isu tersebut di atas menjadi sangat relevan, mengingat fokus pembangunan pertanian berkelanjutan adalah sumberdaya manusia pertanian, baik selaku tenaga kerja maupun sebagai penggerak atau pelaku utama dan pendukung beragam kelembagaan sosial ekonomi pertanian. Upphoff (1984) menyatakan bahwa pembangunan akan berkelanjutan jika didukung kelembagaan lokal yang juga berkelanjutan dalam mendukung keberlanjutan sumberdaya manusia untuk memperoleh peluang bekerja dan berusaha.

Studi ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder mencakup data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif mencakup hasil Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) – Survei/Laporan Struktur Ongkos Usahatani Padi dan Palawija, Usahatani Hortikultura, Peternakan – survei 3 tahunan — yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS); serta dari institusi lain seperti data statistik yang dipublikasikan oleh Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Selain itu, data juga diperoleh dari hasil-hasil studi yang

dilakukan oleh berbagai pihak seperti Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Perguruan Tinggi (antara lain Pusat Studi Wanita) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adapun data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, diskusi dan pertemuan dengan para ahli. Wawancara terutama dilakukan terhadap para pejabat yang mempunyai tanggung-jawab langsung dalam perencanaan program pembangunan, khususnya di lingkup sektor pertanian; sementara diskusi dan atau pertemuan ahli dilakukan dengan mengikutsertakan anggota Tim GAP Pertanian.<sup>\*)</sup>

Dengan menyadari dan mengakui keterbatasan data kuantitatif yang terpilah menurut jenis kelamin (*sex disaggregated data*), terlebih di sektor informal seperti halnya pertanian, maka hal-hal yang berkenaan dengan analisis kesenjangan tidak selamanya didukung data termaksud, sehingga hanya berupa data kualitatif. Lebih lanjut, karena permasalahan gender dalam pembangunan di sektor pertanian—dalam arti luas—juga menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, maka kedalaman analisis disini didukung oleh hasil Analisis Gender dalam Pembangunan Ketenagakerjaan dan Analisis Gender dalam Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil menengah.

Perlu diketahui bahwa data yang ada dalam statistik (data sekunder) tentang pertanian, mengacu pada pengertian pertanian yang telah dirumuskan oleh Badan Pusat Statistik, yakni pertanian dalam arti luas yang secara formal hal tersebut tertulis dalam hasil Sensus Pertanian dan dapat dilihat pada Lampiran 1.

#### **1.4. Sistematika Penyajian**

Buku ini diorganisasikan ke dalam 6 BAB dan beberapa sub-bab pada masing-masing BAB-nya. Bab I mengemukakan Latar Belakang (Sub-Bab 1.1.); Tujuan dan Manfaat (Sub-Bab 1.2); Metodologi (Sub-Bab 1.3); dan Sistematika Penyajian (Sub-Bab 1.4).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, tulisan ini memuat hasil Analisis Gender dalam pembangunan pertanian dalam arti luas yang dalam proses penyusunannya mengalami suatu perkembangan substansi materi, khususnya yang berkenaan dengan materi kebijakan pembangunan yang menjadi sumber dalam analisis ini. Sesuai dengan masa penulisannya, pada awalnya analisis

---

\*) Tim Gender Analisis Pathway (GAP) dibentuk oleh Bappenas, yang terdiri 5 (lima) Tim GAP yaitu : (1) Tim GAP Ketenagakerjaan; (2) Tim GAP Pendidikan; (3) Tim GAP Hukum; (4) Tim GAP Pertanian; dan (5) Tim GAP Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

ini menggunakan kebijakan pembangunan sektor pertanian pada RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM (REPELITA VI) 1991/95 – 1998/1999 BUKU III BAB 21. Sehubungan dengan itu, pada BAB II Sub-Bab 2.1. dikemukakan Kebijakan Pembangunan Pertanian pada REPELITA VI, agar pembaca dapat mempunyai gambaran yang lengkap mengenai kebijakan dan program pada REPELITA VI tersebut. Pada Sub-Bab 2.2. dikemukakan mengenai Hasil Analisis Gender Pembangunan Pertanian dalam REPELITA VI pembangunan pertanian yang disusun setelah memperoleh masukan dari Tim GAP Pertanian.

Sejalan dengan perkembangan politik Indonesia yang diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000 – 2004, upaya melaksanakan analisis gender juga merespon terhadap perkembangan baru tersebut, terlebih setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Mengingat hasil analisis gender REPELITA VI telah merespon terhadap asupan dan prioritas pembangunan dari pihak Departemen Pertanian, maka hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi penyusunan analisis gender untuk Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) Tahun 2002. Sehubungan dengan itu, Bab III memuat hasil Analisis Gender Kebijakan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS 2000-2004) yang didalamnya mencakup Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian (Sub-Bab 3.1.), Data Pembuka Wawasan (Sub-Bab 3.2), Kesenjangan Gender (Sub-Bab 3.3.) dan Isu Gender (Sub-Bab 3.4.).

Sebagai tindak lanjut temuan yang dikemukakan pada BAB III, dilakukan REFORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN yang RESPONSIF GENDER (BAB IV) yang meliputi 2 Sub-Bab, yaitu tentang Reformulasi Kebijakan Pembangunan Pertanian yang Responsif Gender (Sub-Bab.4.1.) dan Indikator Kinerja (Sub-Bab 4.2.). Sebagai implikasi dari reformulasi Kebijakan Pembangunan Pertanian yang Responsif Gender, selanjutnya disusun Rencana Aksi dan Indikator Rencana Aksi yang keduanya menjadi Sub-Bab pada BAB V tentang RENCANA AKSI PEMBANGUNAN PERTANIAN. Bagian terakhir dari buku ini adalah BAB VI berupa PENUTUP.

## **BAB II**

### ***GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) :*** **ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN** **PERTANIAN REPELITA VI**

#### **2.1. Kebijakan Pembangunan Pertanian REPELITA VI**

##### **2.1.1. Kebijakan Umum**

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, disusun kebijakan pertanian selama REPELITA VI. Pada dasarnya kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan masyarakat pada umumnya dengan meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian, untuk memelihara kemandirian swasembada serta meraih peluang dan meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan efisiensi sistem distribusi hasil pertanian, meningkatkan penyediaan bahan baku untuk pengembangan industri, mengurangi kesenjangan, memelihara lingkungan hidup, dan meningkatkan peranan usaha pertanian rakyat. Kebijakan pembangunan pertanian juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mutu dan kesempatan kerja di perdesaan, memantapkan kelembagaan pertanian, serta mengentaskan penduduk dari kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan produksi hasil pertanian, kebijakannya adalah meningkatkan efisiensi sistem produksi pertanian dan mengembangkan iklim usaha yang sehat untuk meningkatkan investasi di bidang pertanian, terutama untuk mendukung pengembangan usaha pertanian rakyat. Efisiensi sistem produksi ditingkatkan dengan mengembangkan kemampuan penguasaan iptek serta kelembagaan pertanian. Selanjutnya, iklim usaha yang sehat dikembangkan dengan menyempurnakan kebijakan makroekonomi, antara lain menyempurnakan sistem perpajakan, meningkatkan penyediaan dana investasi, dan mengembangkan peraturan perundangan yang mendorong investasi di bidang pertanian, serta meningkatkan penyediaan informasi usaha pertanian, termasuk pemerataannya.

Kebijakan untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi hasil pertanian adalah mengembangkan penentuan harga berlandaskan mekanisme pasar.

Meskipun demikian, kebijakan pengendalian harga pangan masih tetap dilakukan, khususnya harga pangan yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan riil dan kestabilan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjamin harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan lainnya adalah mengurangi subsidi sarana produksi seperti pupuk secara bertahap, sesuai dengan peningkatan produktivitas pertanian untuk meningkatkan efisiensi perekonomian dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana produksi. Di samping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nilai tukar ditingkatkan dengan meningkatkan efisiensi sistem transportasi, misalnya jalan desa, efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian, seperti irigasi serta efisiensi sistem perdagangan.

Kebijakan pembangunan pertanian untuk mendukung pengembangan agroindustri dan meningkatkan nilai tambah serta pendapatan usaha pertanian rakyat di perdesaan adalah mengembangkan usaha pertanian rakyat terpadu melalui sistem agribisnis, termasuk mengembangkan sistem lembaga keuangan di perdesaan, meningkatkan penyediaan sarana produksi, dan mengembangkan kelembagaan pemasaran, serta meningkatkan peranan KUD di bidang ini. Kebijakan selanjutnya adalah meningkatkan keterkaitan di dalam sektor pertanian dan antara sektor pertanian dengan sektor industri, terutama dengan menciptakan rangsangan bagi usaha agroindustri kecil dan menengah berupa kemudahan permodalan, perizinan, dan pemasaran. Kebijakan lainnya adalah meningkatkan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi pengolahan, serta meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani produksi dengan industri pengolahan hasil pertanian, yang perlu ditopang peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembangunan pertanian untuk mendukung pembangunan wilayah adalah meningkatkan investasi pertanian yang serasi dengan keadaan sosial ekonomi daerah, kesesuaian lahan, dan potensi pasar. Kebijakan ini dilaksanakan dengan menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan jaminan kepastian usaha, antara lain berupa pelembagaan tata ruang, tata guna tanah, dan menyempurnakan hak pemanfaatan lahan.

Kebijakan pembangunan pertanian untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah adalah mendorong investasi di bidang usaha pertanian di daerah tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya di kawasan barat Indonesia. Selanjutnya, kebijakan untuk mengatasi kesenjangan antar golongan masyarakat adalah meningkatkan mutu dan kesempatan berusaha di bidang pertanian dan meningkatkan ketahanan

pangan pada tingkat rumah tangga untuk golongan masyarakat miskin di perdesaan. Kebijakan untuk mengurangi kesenjangan adalah meningkatkan peranan usaha pertanian rakyat. Dalam hubungan ini, untuk meningkatkan dan melindungi usaha pertanian rakyat diupayakan meningkatkan peranan koperasi di perdesaan/KUD sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat; meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan efisiensi dari sistem produksi dan pemasaran hasil pertanian; meningkatkan kemampuan adu tawar petani; mencegah persaingan tidak sehat dan berbagai bentuk monopoli atau monopsoni yang merugikan usaha pertanian rakyat; mencegah penguasaan lahan yang berlebihan secara perseorangan, penguasaan lahan secara absente dan diterlantarkan; mencegah pengalihan lahan pertanian produktif untuk pemanfaatan lainnya; mencadangkan usaha pertanian tertentu yang banyak diusahakan oleh rakyat, usaha kecil dan menengah, usaha rakyat tradisional, termasuk nelayan kecil serta koperasi di perdesaan/KUD.

Kebijakan untuk meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pertanian adalah meningkatkan dan memperluas diversifikasi komoditas dalam usaha tani rakyat dan diversifikasi wilayah produksi pertanian. Untuk mendorong diversifikasi komoditas, agrobisnis peternakan, perikanan darat, dan hortikultura ditumbuhkembangkan dan dipadukan dengan usaha tani yang telah ada. Selanjutnya, untuk mendorong diversifikasi wilayah, areal pertanian diperluas di luar Jawa, terutama dalam rangka memanfaatkan keunggulan wilayah berupa iklim yang bervariasi, tanah yang subur, lahan yang tersedia, serta pasar hasil pertanian yang cukup besar.

Kebijakan untuk mempertahankan kesuburan tanah, memelihara sumber air, dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi tanah kritis, lahan pertanian yang diterlantarkan serta mencegah eksploitasi sumber daya perikanan laut yang melampaui daya dukung lestari sumber daya; mengembangkan usaha tani menetap bagi petani peladang berpindah; meningkatkan penyediaan teknologi konservasi; dan mencegah terjadinya kepunahan dan keluarnya plasma nutfah dari teritorial negara Indonesia.

## **2.1.2. Kebijakan Khusus**

### **2.1.2.1. Pemantapan Swasembada Pangan**

Kebijakan untuk memelihara kemandirian swasembada pangan adalah meningkatkan dan memperluas intensifikasi tanaman padi, baik di lahan sawah maupun di lahan tadah hujan; memperluas lahan sawah di luar Jawa;

mengembangkan kelembagaan petani, terutama kelompok tani dan KUD; memperluas intensifikasi budi daya perikanan; meningkatkan intensifikasi pemanfaatan sumber daya laut lepas pantai, serta memperluas usaha penangkapan ikan di daerah perairan kawasan timur Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kebijakan selanjutnya adalah memperluas intensifikasi peternakan unggas di perdesaan, terutama di kawasan timur Indonesia. Dalam rangka mendukung pemantapan swasembada pangan diupayakan pula untuk meningkatkan produksi daging, susu, sayuran, dan buah-buahan yang berkualitas dengan menggunakan IPTEK yang mampu memberikan nilai tambah tinggi dalam rangka pengembangan agroindustri yang andal.

#### **2.1.2.2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian**

Kebijakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja pertanian adalah menciptakan kondisi perekonomian yang sehat, meningkatkan investasi, dan mendorong restrukturisasi perekonomian di perdesaan dengan mengembangkan usaha pertanian rakyat terpadu dan usaha kecil dan menengah di bidang agrobisnis dan agroindustri. Selanjutnya, diupayakan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, antara lain, dengan menggeser alokasi sumber daya kepada kegiatan yang produktivitasnya tinggi; meningkatkan mobilitas sumber daya manusia dan modal antardaerah serta antarsektor; dan mengganti tanaman pertanian yang tidak produktif atau tidak mempunyai peluang pasar yang cukup tinggi dengan tanaman yang mempunyai potensi pasar besar. Kebijakan yang berkaitan adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja, termasuk menerapkan sistem upah minimum bagi tenaga kerja di sektor pertanian.

#### **2.1.2.3. Peningkatan Ekspor Hasil Pertanian**

Kebijakan untuk meningkatkan ekspor hasil pertanian adalah meningkatkan daya saing ekspor komoditas hasil pertanian dengan meningkatkan kualitas hasil pertanian sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor; meningkatkan efisiensi sistem produksi, perdagangan, dan distribusi; memperluas dan meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana ekspor, seperti lembaga keuangan, asuransi, transportasi dan telekomunikasi; meningkatkan kemampuan usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang pemasaran dan ekspor; meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu hasil pertanian; mengembangkan diversifikasi wilayah pemasaran di

luar negeri; serta meningkatkan pengembangan dan penguasaan teknologi pertanian, termasuk bioteknologi.

#### **2.1.2.4. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan**

Kebijakan untuk menata dan mengembangkan kelembagaan pertanian dan perdesaan adalah meningkatkan pendayagunaan kelembagaan keuangan, baik berupa bank maupun non bank, kelembagaan pemasaran, asuransi, ketenagakerjaan, industri pengolahan, transportasi, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang memiliki peran penting bagi usaha pertanian rakyat, usaha kecil dan menengah, serta KUD. Kebijakan lainnya adalah menyempurnakan kelembagaan kelompok tani, kelembagaan penyuluhan dan pelatihan, serta pendidikan pertanian untuk meningkatkan manajemen usaha tani dan keuangan, serta penguasaan teknologi; meningkatkan peran serta asosiasi usaha pertanian dan badan usaha milik negara; mengembangkan ketentuan-ketentuan yang memperkuat kegiatan usaha pertanian rakyat di perdesaan; meningkatkan efisiensi dan efektivitas penelitian dan pengembangan pertanian; dan mengembangkan sistem informasi tentang sumber daya lahan, teknologi produksi, harga, dan pasar hasil pertanian.

#### **2.1.2.5. Pengentasan Penduduk dari Kemiskinan**

Kebijakan untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan adalah mengembangkan usaha pertanian terpadu di daerah lahan kering, rawa dan pasang surut, daerah persawahan dengan usaha tani sempit, daerah pantai, pegunungan, dan daerah terisolasi lainnya; mengembangkan sikap hidup dan etos kerja produktif serta meningkatkan kemampuan pemanfaatan teknologi tepat; meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga setengah menganggur dan menganggur penuh di perdesaan; memperbaiki sistem bagi hasil antara lain pemilik tanah dengan penyewa atau penyakap; meningkatkan akses golongan miskin terhadap informasi usaha dan pasar; mengembangkan sarana dan prasarana dasar perdesaan untuk memecahkan keterisolasian dan mengatasi penyebab keterbelakangan; meningkatkan usaha koperasi di perdesaan/KUD, antara lain dalam pelayanan kebutuhan produksi dan pemasaran; serta mendorong berkembangnya lembaga perekonomian lainnya di perdesaan.

### **2.2. Hasil Analisis Gender Pembangunan Pertanian Dalam REPELITA VI**

Untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kebijakan pembangunan sektor pertanian dalam REPELITA VI telah ditetapkan program pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Program

tersebut terdiri atas 5 (lima) program pokok dan 3 (tiga) program penunjang. Program pokok meliputi : (1) Program Peningkatan Produksi Pangan; (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian; (3) Program Pengembangan Ekspor Hasil Pertanian; (4) Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian; dan (5) Program Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Pertanian.

Masing-masing program mencakup beberapa kegiatan yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Adapun program penunjang meliputi 3 program, yaitu : (1) Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian; (2) Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian; dan (3) Program Pengembangan Transmigrasi.

Adapun kegiatan untuk masing-masing program penunjang dapat dilihat pada Lampiran 3.

Pada Bab Pendahuluan sub-bab Metodologi telah dikemukakan bahwa Analisis Gender Pembangunan Pertanian REPELITA VI ini mengacu pada Alur Kerja Analisis Gender (GAP) yang disusun oleh Bappenas. Sesuai dengan kesepakatan dengan Tim GAP Pertanian, kebijakan dari REPELITA VI yang menjadi prioritas perhatian dalam analisis ini mencakup 3 (tiga) hal, yaitu Pemberdayaan Sumber-daya Manusia (SDM) Rumahtangga Pertanian, Pemberdayaan SDM dalam Kelembagaan Pertanian, dan Pemberdayaan SDM Aparat Pertanian dalam IPTEK.

Hasil analisis yang berupa matriks disajikan berturut-turut pada Lampiran 4 dan Lampiran 5.

# BAB III

## ***GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) : ANALISIS GENDER PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) 2000-2004***

### **3.1. Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian**

#### **3.1.1. Kebijakan Pembangunan Pertanian**

Dalam BAB IV PROPENAS 2000-2004 tentang Pembangunan Ekonomi, dinyatakan bahwa dengan berpedoman pada arah kebijakan GBHN 1999-2004 dan dengan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, telah ditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. Prioritas jangka pendek adalah program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Selanjutnya, dinyatakan bahwa di bidang ekonomi, pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama dan secara langsung dilakukan melalui berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, serta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam konteks program pembangunan ekonomi, dikemukakan bahwa program pembangunan pertanian menjadi bagian dalam Program Menanggulangi Kemiskinan dan Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat, khususnya yang dituangkan dalam Program Pengembangan Pertanian, Pangan dan Pengairan.

Pengertian pertanian yang dimaksud dalam PROPENAS adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Dinyatakan lebih lanjut, bahwa oleh karena fungsi dan karakteristik dari kehutanan yang sangat penting, maka di samping masuk dalam sub-bab Pengembangan Pertanian, Pangan dan Pengairan, Kehutanan juga secara khusus dituangkan dalam program tersendiri pada Sub Bab Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan,

yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan. Adapun pengertian pangan, selain mencakup tanaman bahan pangan, juga mencakup sumber karbohidrat dan vitamin (tanaman pangan dan hortikultura), sumber protein (peternakan dan perikanan) dan sumber minyak pangan; juga meliputi kelembagaan dan industri pangan yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi.

Program-program Pengembangan Pertanian, Pangan dan Pengairan terdiri atas : (1) Program Pengembangan Agribisnis, (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dan (3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan. Khusus program yang terakhir menjadi wewenang Departemen Pekerjaan Umum, bukan Departemen Pertanian. Sehubungan dengan itu, analisis ini hanya menyangkut 2 program pertama di atas. Adapun tujuan, sasaran dan kegiatan pokok pada kedua program secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.

Analisis dalam buku ini mengacu kepada prioritas program pembangunan pertanian yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian, yakni yang mencakup penanggulangan kemiskinan, diversifikasi pangan, dan pengembangan industri hilir pertanian. Mengingat visi pembangunan pertanian tahun 2000 – 2004 adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan; dan bahwa misi pembangunan pertanian menekankan pada peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan agribisnis guna mewujudkan antara lain ketahanan pangan; maka analisis gender PROPENAS, seperti halnya pada analisis gender REPELITA VI dikategorikan ke dalam 3 aspek, yakni pada tingkat SDM rumahtangga pertanian, kelembagaan sosial ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Perlu dikemukakan disini bahwa penyusunan analisis gender pembangunan pertanian ini juga mempertimbangkan kemungkinan penerapannya pada REPETA 2002, sehingga untuk itu dari PROPENAS hanya dipilih kegiatan-kegiatan pokok pada Program Pengembangan Agribisnis dan Program Ketahanan Pangan yang relevan dengan prioritas program pembangunan sektor pertanian tersebut di atas, yang diharapkan dapat segera diterapkan dalam pelaksanaannya. Adapun kegiatan pokok pembangunan sektor pertanian terpilih dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Kegiatan Pokok (KP) pada Program Pengembangan Agribisnis (PPA) dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP)**

Program Pengembangan Agribisnis (PPA)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi pertanian (PPA-KP 2)</li> <li>2. Peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadap sumber-sumber permodalan, lembaga keuangan bank dan non-bank, teknologi informasi dan pasar (PPA-KP 8)</li> <li>3. Pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan (PPA-KP 13)</li> <li>4. Pengembangan lembaga keuangan pedesaan (PPA-KP 14)</li> <li>5. Peningkatan kualitas masyarakat pertanian serta kehutanan dan nelayan serta mendorong pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan (PPA-KP 15)</li> <li>6. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang agribisnis, termasuk pengembangan lembaga penyedia teknologi, informasi, penyuluhan, investasi, jasa pelayanan lain. (PPA-KP 16)</li> <li>7. Penciptaan iklim usaha yang mendorong berkembangnya agribisnis dengan nilai tambah yang dinikmati masyarakat pertanian dan nelayan (PPA-KP 17)</li> <li>8. Perbaikan posisi tawar petani/nelayan dalam kegiatan agribisnis dan silvobisnis melalui pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan (PPA-KP 19)</li> <li>9. Pengembangan kemitraan usaha-usaha di bidang pertanian, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan (PPA-KP 23)</li> <li>10. Peningkatan akses pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pertanian terhadap sumber-sumber pendanaan, teknologi dan informasi (PPA-KP 24)</li> <li>11. Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam usaha peternakan yang produktif termasuk di dalamnya usaha pelayanan jasa seperti jasa konsultasi dan penyuluhan, kesehatan hewan dan penyediaan sarana produksi (PPA-KP 28)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akses Petani terhadap Modal, teknologi, benih/bibit, pasar dan informasi bisnis pangan (PKP-KP 5)</li> <li>2. Pengembangan produk olahan pangan karbohidrat dan protein untuk meningkatkan daya tarik bahan pangan non-beras (PKP-KP 7)</li> <li>3. Pengembangan lembaga teknologi pangan dan kegiatan penelitian (PKP-KP 12)</li> <li>4. Pengembangan kapasitas organisasi masyarakat dan jaringan kerja dalam penyediaan sarana dan prasarana, produksi, pengilangan, distribusi perdagangan/pemasaran dan informasi (PKP-KP 16)</li> <li>5. Pengembangan kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan, serta pembinaan pelaku bisnis pangan sesuai kebutuhan pasar (PKP-KP 22)</li> <li>6. Pengembangan industri pengolahan pangan skala rumah tangga/mikro, kecil dan menengah (PKP-KP 23)</li> <li>7. Penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatan ketahanan pangan (PKP-KP 26)</li> <li>8. Pengembangan system pengolahan produk-produk hortikultura sesuai potensi masyarakat dan potensi wilayah (PKP-KP 27)</li> </ol>

Sumber : PROPENAS 2000-2004

Catatan : Nomor yang tercantum pada KP menunjukkan nomor KP yang ada dalam PROPENAS 2000-2004 (halaman 21-23 untuk PPA dan halaman 24-25 pada PKP)

### 3.2. Data Pembuka Wawasan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya terdapat 2 (dua) program yang dikembangkan dalam pembangunan sektor pertanian, yaitu Program Pengembangan Agribisnis (PPA) dan Program Ketahanan Pangan (PKP). Sesuai dengan fakta di lapangan, pelaku pada tingkat akar rumput adalah unit keluarga/rumahtangga pertanian, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan, sasaran umum dan kegiatan pokok pada kedua program tersebut menunjukkan keterkaitan dan kesamaan, bahkan tumpang tindih. Oleh karena itu, data pembuka wawasan yang dikemukakan di bawah ini mengacu kepada kegiatan pokok (KP) pada kedua program tersebut di atas, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Untuk meyakinkan kita pada gambaran di tingkat lapangan yang berkenaan dengan hal tersebut di atas, di bawah ini dikemukakan data yang berkenaan dengan sumberdaya rumahtangga petani, nelayan, kehutanan dan perkebunan. Karena data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin (*sex disaggregated data*) di hampir seluruh aspek ketenagakerjaan di sektor pertanian dalam arti luas tidak selalu tersedia, maka data pembuka wawasan di bawah ini juga mencakup hasil empiris, khususnya pengalaman studi gender dalam pembangunan antara lain diperoleh dari Departemen Pertanian, Pusat Studi Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adapun matriks REPETA 2000 dapat dilihat pada Lampiran 7.

#### 3.2.1. Gender Dalam Pemberdayaan Rumahtangga Pertanian

Terdapat 4 kegiatan pokok yang tercakup :

- PPA-KP 2 : Petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi pertanian
- PPA-KP 25 : Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat perkebunan
- PPA-KP 29 : Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumberdaya lokal
- PKP-KP 5 : Peningkatan akses petani terhadap modal, teknologi, benih/bibit, pasar dan informasi bisnis pangan.

Data yang tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan untuk pokok kegiatan tersebut di atas, antara lain :

- Pada tahun 1999 ini terdapat 88,8 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian dan jumlah tersebut diproyeksikan akan meningkat

sampai tahun 2004, yakni akan ada 99,8 juta jiwa (UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas Tahun 2000-2004).

- Dari hasil SAKERNAS, secara umum terdapat peningkatan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dari 40,7 persen tahun 1999. Khusus di perdesaan, peningkatan tersebut dari 57,9 persen pada tahun 1997 menjadi 62 persen pada tahun 1999. Berdasar jenis kelamin, diketahui persentase perempuan di sektor pertanian sedikit meningkat dari 63,52 persen (1996) ke 63,54 persen pada tahun 1997; sementara pada laki-laki menurun dari 61,9 persen tahun 1996 ke 61,43 persen pada tahun 1997 (Indikator Sosial Ekonomi Perempuan, 1996 dan 1997). Namun jika dilihat dalam TPAK menurut jenis kelamin, ternyata pada tahun 1999 ini TPAK perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, yakni sebesar 51,2 persen pada perempuan dan 83,6 persen pada laki-laki. Dalam hal tingkat pengangguran terbuka, ternyata persentase perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 6,9 persen pada perempuan dan pada laki-laki 6 persen (Indikator Kesejahteraan Rakyat, 1999).
- Khusus di sektor pertanian, terdapat 21,74 juta rumah tangga pertanian (Sensus Pertanian 1993), dengan keragaman subsektor seperti terlihat pada lampiran 8. Sayangnya, tidak semua data yang ditampilkan terpilah menurut jenis kelamin, kecuali di sektor tanaman pangan. Pada Lampiran 8 terlihat bahwa persentase perempuan dalam rumah tangga pertanian tanaman pangan, secara umum terdapat sekitar 10-12 persen rumah tangga pertanian yang dikepalai perempuan (Sensus Pertanian, 1993). Namun, mengingat ekonomi rumah tangga petani tergolong berbasis keluarga, maka dapat dipastikan bahwa perempuan dan laki-laki keduanya terlibat dalam proses produksi pertanian.
- Selain di sektor informal (pada tingkat usahatani), tampaknya kesenjanganpun dijumpai di sektor formal. Diakui bahwa penyajian data hasil Sensus Pertanian 1993 tidak selalu menurut jenis kelamin, seperti yang dijumpai pada data pekerja di perusahaan sapi perah, rumah potong hewan, budidaya perikanan dan pelabuhan perikanan (Lampiran 9). Pada Sektor Pertanian, yakni pada perusahaan subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura ditemui adanya 25 persen pekerja perempuan dari sekitar 5.902 orang pekerja; sementara pada sub-sektor perikanan hanya 11,7 persen.

Adapun di sektor Kehutanan dan Perkebunan pekerja perempuan berturut-turut sebanyak 10,4 persen pada perusahaan Penangkaran Satwa Liar dan Wisata Alam (SLWA) 16,7 persen pada perusahaan HPH, 23,2 persen pada perusahaan perkebunan dan 29,25 persen pada perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

### 3.2.2. Gender Dalam Kelembagaan Sosial-Ekonomi Pertanian

- PPA-KP 8 : Peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadap sumber-sumber permodalan, lembaga keuangan bank dan non-bank, teknologi, informasi dan pasar
- PPA-KP 14 : Pengembangan lembaga keuangan pedesaan
- PPA-KP 19 : Perbaikan posisi tawar petani dalam kegiatan agribisnis melalui pemberdayaan kelembagaan petani
- PKP-KP 26 : Penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatan ketahanan pangan

Seperti diketahui khusus untuk negara sedang berkembang, Mosher mengemukakan perlunya faktor-faktor pelancar pembangunan pertanian diantaranya adalah pendidikan pembangunan, diantaranya penyuluhan pertanian, pembentukan kelompok tani, pemberian kredit bagi keluarga petani (antara lain melalui koperasi). Sehubungan dengan itu, pada Lampiran 10 dikemukakan data mengenai keragaan perempuan tani pada beragam kelembagaan sosial ekonomi tersebut. Dapat dipastikan bahwa representasi perempuan tani baik dalam kelompok tani, maupun KUD tergolong, sangat rendah, kecuali dalam program pengentasan kemiskinan.

Data yang tersedia dan digunakan sebagai acuan untuk kegiatan pokok tersebut di atas meliputi :

- Dalam hal kelompok tani-nelayan terdapat 378.684 kelompok tani yang beranggotakan 11,8 juta orang; namun hanya 11 persen perempuan. Pada kelompok Taruna Tani dari yang tercatat 33.441, hanya 22,27 persen perempuan. Memang juga dilaporkan adanya kelompok tani perempuan, yakni sebanyak 46.500 dengan jumlah anggota sebanyak 933.447 orang. (Pusat Penyuluhan Pertanian, 1998).
- Dalam Kelembagaan Sosial Ekonomi Pertanian, khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) tidak ada data secara eksplisit berapa jumlah anggota KUD menurut jenis kelamin, hanya dilaporkan adanya 8.278 KUD di seluruh Indonesia, hanya 75,56 persen yang aktif. Namun mengingat keanggotaan KUD seringkali diwakili KK rumah tangga petani, maka

mayoritas anggota adalah laki-laki. Sensus Pertanian 1993 melaporkan bahwa dari 2.095 juta calon anggota KUD hanya 22,48 persen perempuan.

- Dalam hal penerimaan kredit usaha tani (KUT), sebagai konsekuensi bahwa anggota kelompok tani hampir 90 persen terdiri atas laki-laki, maka akses perempuan pada KUT juga rendah.
- Khusus kredit P4K (Program Peningkatan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan), datanya menunjukkan sedikit dominasi perempuan. Dari sebanyak 41 322 kelompok petani kecil (KPK) : 40 persen kelompok perempuan, 34 persen laki-laki, dan 26 persen kelompok campuran. Adapun kelompok Diversifikasi Pangan dan Gizi sebanyak, 6.911 kelompok yang semuanya beranggotakan perempuan.

### 3.2.3. Gender dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

- PPA-KP 3 : Pengembangan industri perbenihan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan
- PPA-KP 4 : Pengembangan industri dan penerapan alat dan mesin pertanian dan perikanan
- PPA-KP 10 : Penerapan dan perluasan upaya pengendalian hama penyakit dan gulma secara terpadu
- PPA-KP 13 : Pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan
- PPA-KP 12 : Pengembangan lembaga teknologi pangan dan kegiatan penelitian

Data yang tersedia dan digunakan sebagai acuan untuk mengkaji kegiatan-kegiatan pokok di atas, adalah sebagai berikut :

- Pada tingkat masyarakat petani, kegiatan penyuluhan pertanian yang memperkenalkan IPTEK juga lebih banyak menjangkau petani laki-laki. Semua introduksi IPTEK pada program Latihan dan Kunjungan (Sistem LaKu), pendekatan kelompok tani hamparannya lebih diakses laki-laki. Sementara dalam Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) diketahui bahwa pada Tahun 1997/1998, dari 3.550 SLPHT yang diikuti oleh 103.721. orang di seluruh Indonesia hanya ada 22,3 persen peserta perempuan. Adapun pada tahun 1998/1999 hanya 21,5 persen perempuan dari sebanyak 86.589 peserta.

- Di lingkungan kelembagaan pertanian, seperti di lingkungan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan departemen sektoral keragaan perempuan dalam IPTEK jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Seperti terlihat pada Lampiran 11, hanya terdapat sekitar 8 persen perempuan yang menjadi tenaga ahli ristik senior dan hanya 16 persen perempuan yang bergelar doktor di bidang teknologi. Khusus di bidang pertanian, persentasinya relatif lebih tinggi yakni 30 persen.
- Di berbagai instansi pemerintah dan lembaga penelitian, representasi perempuan secara umum lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Di Departemen Pertanian terdapat 37.333. orang penyuluh pertanian, namun hanya 16,6 persen penyuluh perempuan, sementara yang bekerja di lingkungan Litbang pertanian sebesar 22 persen. Di Departemen Kehutanan, masing-masing hanya 11 persen perempuan yang bekerja sebagai pegawai maupun Pelaksana Teknis.

Data di atas mencerminkan bahwa sekalipun perempuan tani relatif banyak, namun pihak penyuluh dan peneliti perempuan yang diharapkan dapat berempati pada kebutuhan IPTEK perempuan tani juga masih rendah.

### **3.3. Kesenjangan Gender**

Pada bab ini dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender yang mencakup 4 aspek, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (benefit) yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di sektor pertanian

#### **3.3.1. Akses Anggota Rumah tangga Pertanian**

##### **3.3.1.1. Gender Dalam Pemberdayaan Rumah tangga Pertanian**

Terdapat 4 kegiatan pokok yang tercakup :

- PPA-KP 2 : Petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi pertanian
- PPA-KP 25 : Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat perkebunan
- PPA-KP 29 : Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumberdaya lokal
- PKP-KP 5 : Peningkatan akses petani terhadap modal, teknologi, benih/ bibit, pasar dan informasi bisnis pangan

Sebagian besar SDM laki-laki dan perempuan menjadi anggota rumah tangga pertanian bukan karena suatu pilihan profesionalisme tapi secara tradisional, yakni melalui proses sosialisasi dan pewarisan beragam sumberdaya, meliputi sumberdaya lahan pertanian, ternak, kapal/perahu, kolam, kebun dan hutan (rakyat).

Kesenjangan representasi perempuan dalam hal ketenagakerjaan di sektor pertanian dominan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya gender, khususnya yang mewarnai akses perempuan dan laki-laki pada aset produksi tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Umum diketahui bahwa sistem pewarisan menurut Islam dan adat seperti sistem primogenitur -sistem pewarisan dimana aset produksi hanya diwariskan pada anak laki-laki tertua—dan sistem hak ulayat pada masyarakat yang patriarki, menjadikan akses perempuan pada aset produksi pertanian, seperti ternak, perahu, kapal, lahan dan lain-lain lebih rendah dibanding laki-laki.

Kesenjangan gender dalam pemberdayaan rumah tangga pertanian yang terkait erat dengan kegiatan pokok di atas diperjelas dengan data berikut :

- Hasil analisis Struktur Ongkos Usaha Tani Hortikultura (UPS, 1998) adanya 92,69 % petani laki-laki yang memiliki lahan, sisanya (7,32 %) perempuan. Dari jumlah tersebut, menurut luas usaha taninya, petani laki-laki yang menguasai lahan di atas 0,5 Ha sebanyak 48,15 %, sementara pada perempuan hanya 3,07 %
- Studi Kasus di desa lahan kering di Jawa Barat menunjukkan bahwa dari 170 rumah tangga petani, perempuan dan laki-laki akses terhadap sumberdaya lahan sawah maupun lahan kering. Secara umum, perempuan dan laki-laki akses pada lahan dalam bentuk gono-gini, yaitu pemilikan lahan secara membeli yang dilakukan pasangan suami-isteri (bukan warisan); sementara rata-rata pemilikan lahan sawah pada perempuan (isteri) sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki pada pemilikan lahan kering (Mugniesyah dan Mizuno, 2000)
- SK Bersama Menteri Pertanian dan Mendagri Nomor -223/Kptsn/Um/4/76 dan Nomor 76 Tahun 1976 --perihal pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian dan Nomor 240/Kptsn/Um/4/76 Tahun 1976 —perihal pembentukan WKBPP dan WKPP dengan Sistem Latihan dan Kunjungan (Laku), menyebutkan bahwa setiap Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) mencakup 16 Wilayah Kelompok (Wilkel) yang masing-masing terdiri dari satu kelompok tani. Dalam kenyataan, kelompok tani tersebut hanya terdiri atas anggota laki-laki. Sementara perempuan

dikelompokkan hanya dalam Kelompok Perempuan Tani (KWT) dan tidak dimasukkan dalam mainstream Sistem Laku.

- Sebagian besar petani perempuan berpendidikan lebih rendah dibanding laki-laki, mereka yang berpendidikan SD Tamat dan di atas SLTP berturut-turut sebanyak 44 % dan 67 % adalah petani laki-laki. Demikian pula halnya terhadap IPTEK, pelatihan, dan penyuluhan, akses petani perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dalam hal penyuluhan, 81% perempuan tidak mendapat penyuluhan, sementara laki-laki 70% (Badan Pusat Statistik, 1999).

Khususnya dalam lingkup pertanian, dalam hal ini nelayan, kesenjangan gender dalam hal akses terhadap upaya pemberdayaan di tingkat rumah tangga dilihat dari kasus-kasus yang terungkap dalam berbagai laporan sebagaimana berikut :

- Dalam hal rumah tangga nelayan, adanya sumberdaya kelautan dan pesisir memungkinkan masyarakat disekitarnya memanfaatkan sumberdaya alam kelautan, tambak dan perairan umum sebagai sumber nafkah/pendapatan. Perempuan nelayan akses dalam hal budi daya produksi, penangkapan dan pasca panen sekunder (pengolahan hasil panen/tangkapan) dan bakulan. Namun karena ada anggapan bahwa laut itu “keras”, banyak hasil penelitian mengemukakan bahwa pekerjaan penangkapan ikan di laut hampir sepenuhnya dilakukan laki-laki, kecuali penangkapan ikan kecil yang nilai jualnya rendah; bahkan perempuan tidak mewarisi mantera-mantera yang diperlukan dalam penangkapan ikan sekalipun (Peribadi, 2000)
- Sementara itu, Diamond, dkk. (1998) melaporkan dari hasil diskusi kelompok dengan nelayan laki-laki dan perempuan di Desa Tumbak, Sulawesi Utara diperoleh informasi bahwa di desa tersebut sedikitnya ada 30 persen perempuan di atas 17 atau 18 tahun yang pergi melaut melakukan penangkapan ikan.
- Perempuan akses dalam kegiatan perdagangan ikan hasil tangkapan (tibo-tibo) dan pengolahan ikan berskala kecil/rumah tangga. Mubyarto dkk. (1984) mengemukakan bahwa perempuan nelayan di Jepara terpaksa menjadi rebyek yaitu perempuan-perempuan muda yang menaiki perahu untuk menemui nelayan dengan perahu-perahu yang besar sebelum membongkar ikan hasil tangkapan mereka dengan mengenakan pakaian yang bagus dan berdandan serta bertingkah laku genit untuk membujuk para awak kapal agar mau menjual sebagian dari hasil tangkapan kepada mereka dengan harga di bawah harga pasar.

Yang lebih memprihatinkan dalam tulisan itu dinyatakan bahwa selain alasan ekonomi, para awak kapal bersedia menjual ikan dengan harga murah kepada para rebyek tersebut karena mereka bisa melanjutkan hubungan dan memperlakukan perempuan rekyek sebagai “pacar”. Diduga, perempuan pedagang ikan akses juga terhadap ikan hasil tangkapan nelayan migran di tengah laut, sebelum para nelayan membawa hasil tangkapannya ke Tempat Pelelangan ikan (TPI); karena jika tidak mereka kalah bersaing memperoleh hasil tangkapan ikan pedagang laki-laki bermodal besar. Umum diakui bahwa pada TPI tertentu, pekerja seks merupakan bagian daya tarik yang mendorong nelayan untuk menjual hasil tangkapannya.

- Dewasa ini dengan tingginya kecelakaan nelayan kecil (pandega, awak kapal) akibat penggunaan bom dalam penangkapan ikan, banyak janda perempuan nelayan yang harus menjadi kepala rumahtangga padahal akses mereka terhadap kredit sangat rendah (Peribadi, 2000).
- Kesenjangan gender dalam hal akses di lingkup pertanian, kehutanan dan perkebunan dirasakan sebagai akibat adanya anggapan yang keliru tentang siapa sesungguhnya “penghutan”. Pihak Departemen Kehutanan seringkali menganggap bahwa penghutan/pesanggem adalah laki-laki sehingga anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) semuanya laki-laki. Itu sebabnya pada masyarakat petani di daerah lahan kering yang mengembangkan hutan kemasyarakatan di sekitar wilayah perhutanan negara, laki-laki mempunyai akses besar untuk mengembangkan budidaya tanaman kayu-kayuan perhutanan yang merupakan stimulan proyek. Padahal sebagaimana masyarakat “*peasant*” (petani kecil) pada umumnya, mereka yang berperan dalam pengelolaan kebun dan hutan mencakup semua anggota rumahtangga dewasa, laki-laki dan perempuan.
- Kesenjangan gender juga ditemui dalam program pengentasan kemiskinan, dimana dukungan pemerintah cenderung hanya ditujukan untuk perempuan. Akses perempuan terhadap program pengentasan kemiskinan didukung oleh INPRES No, 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (PMMR), yang diperbarui oleh INPRES No. 20 Tahun 1979 tentang PMMR yang implementasinya melalui Program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Selanjutnya pada tahun 1993 (awal Pelita VI) program tersebut dirumuskan melalui Program Diversifikasi Pangan dan Gizi di 27 propinsi, 90 kabupaten dan 600-700 desa miskin di Indonesia. Sejak tahun 2000, Departemen Pertanian memperkuat dukungan

terhadap program ini melalui terbentuknya Badan Ketahanan Pangan dan Bimas.

### 3.3.1.2. Gender Dalam Kelembagaan Sosial-Ekonomi Pertanian :

- PPA-KP 8 : Peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadap sumber-sumber permodalan, lembaga keuangan bank dan non-bank, teknologi, informasi dan pasar
- PPA-KP 14 : Pengembangan lembaga keuangan pedesaan
- PPA-KP 19 : Perbaikan posisi tawar petani dalam kegiatan agribisnis melalui pemberdayaan kelembagaan petani
- PKP-KP 26 : Penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatan ketahanan pangan

Kesenjangan gender dalam ketiga kegiatan pokok di atas merupakan *sectoral cross cutting issues* (isu-isu lintas sektoral). Dengan demikian deskripsi di bawah ini saling melengkapi dengan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi.

- Sekalipun UU Koperasi memungkinkan sekelompok orang (minimal 20 orang) untuk membentuk koperasi, namun kenyataan menunjukkan bahwa proses pembentukan koperasi tidak semudah itu. Pembentukan koperasi selama ini lebih banyak didominasi oleh pendekatan *top-down* dimana pihak pemerintah lebih banyak campur tangan di dalamnya. Karena baik pemerintah maupun pihak laki-laki yang dominan mengelola koperasi umumnya dominan bias gender, maka akses perempuan dalam koperasi lebih rendah di banding laki-laki. Di pihak lain, lebih rendahnya tingkat pendidikan petani perempuan dibanding petani laki-laki serta masih kuatnya bias gender yang mewarnai sosialisasi peranan perempuan dalam kelembagaan ekonomi (di sektor publik) menambah gejala rendahnya akses perempuan dibanding laki-laki dalam kelembagaan KUD khususnya dan koperasi pada umumnya.
- Terdapat 2010 perempuan miskin yang menerima kredit lewat Proyek Karya Usaha Mandiri (KUM) hanya 2,3 persen saja yang melakukan tunggakan kredit (Syukur, 1992; Kasryno, 1999). Hasil studi Windarti (2000) menyatakan bahwa dari semua responden penelitiannya yang anggota KUM, ternyata 93,65 persen responden menyatakan tidak pernah akses pada sumber kredit lainnya; hanya 6 persen saja yang akses terhadap koperasi dan simpanan pedesaan. Dengan kata lain, akses perempuan pedesaan terhadap sumber permodalan sangat rendah, terlebih pada lembaga keuangan formal.

### 3.3.1.3. Akses Dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

- PPA-KP 3 : Pengembangan industri perbenihan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan
- PPA-KP 4 : Pengembangan industri dan penerapan alat dan mesin pertanian dan perikanan.
- PPA-KP 10 : Penerapan dan perluasan upaya pengendalian hama penyakit dan gulma secara terpadu
- PPA-KP 13 : Pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan
- PKP-KP 12 : Pengembangan lembaga teknologi pangan dan kegiatan penelitian

Sebagaimana halnya terhadap kredit, umum diketahui bahwa akses petani perempuan terhadap IPTEK pertanian lebih rendah dibanding petani laki-laki. Gambaran mengenai kesenjangan gender dalam hal akses terhadap IPTEK dapat dijelaskan antara lain dengan kasus-kasus berikut :

- Sampai saat ini banyak teknologi alsintan baik di bidang pertanian maupun perikanan dirancang para ahli tanpa mempertimbangkan kepentingan dan pengalaman perempuan, sehingga banyak teknologi yang diciptakan tidak atau kurang atau bahkan menyingkirkan perempuan tani (termasuk buruh tani) dari pasar tenaga kerja. Contoh diintroduksikannya unit penggilingan padi memang meringankan pekerja keluarga perempuan dalam menumbuk padi, namun banyak buruh penumbuk padi perempuan termasuk juga dari kalangan petani kecil yang kehilangan pekerjaan. Hal yang sama terjadi manakala sabit, bergerigi dan alat perontok produk sereal (padi, kacang kedele, dan lainnya) diintroduksikan. Padahal, perempuan sebenarnya mampu mengoperasikan mesin pertanian jika mereka dilatih cara menggunakannya.
- Seperti telah dikemukakan di atas khusus untuk akses perempuan dalam SLPHT dimungkinkan karena adanya tekanan internasional yang menghendaki petani perempuan dilibatkan dalam pelaksanaan Sekolah Lapangan Hama Terpadu. Oleh karenanya, masih timbul dugaan kiranya hal tersebut berjalan karena tuntutan proyek dan bukan karena strategi dalam menjawab kebutuhan petani perempuan.

- Penelitian-penelitian yang berkenaan dengan pengembangan lembaga teknologi pangan dan kegiatan penelitian, secara umum masih berorientasi pada komoditi yang terbatas. Hal ini diduga belum dilakukan secara integratif dengan melihat pengembangan SDMnya, namun memang karena keterbatasan dana dan prasarana untuk itu.

### 3.3.2. Partisipasi Anggota Rumahtangga Pertanian

#### 3.3.2. 1. Gender dalam Rumahtangga Pertanian

Kegiatan Pokok :

- PPA-KP 2 : Petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi pertanian
- PPA-KP 25 : Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat perkebunan
- PPA-KP 29 : Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumberdaya lokal
- PKP-KP 5 : Peningkatan akses petani terhadap modal, teknologi, benih/bibit, pasar dan informasi bisnis pangan.

Keadaan Kesenjangan partisipasi gender dalam rumah tangga pertanian dapat dilihat dari kasus-kasus berikut :

- Dalam proses produksi padi sawah, curahan waktu tenaga kerja di dalam keluarga meningkat dengan semakin rendahnya status sosial ekonomi atau penguasaan lahan usahatani mereka, sebaliknya untuk tenaga kerja di luar keluarga, baik laki-laki maupun perempuan Lebih lanjut, perempuan pada rumahtangga pekebun dan perhutanan dan peladang berpindah, seperti halnya laki-laki terlibat pada semua aktivitas budidaya tanaman kayu-kayuan dan pertanian/perkebunan lahan kering, dari persiapan hingga pasca panen (Kartasubrata, dkk., 1995 dan Mugniesyah, dkk, 2000).
- Dalam hal program Perhutanan Sosial dan PMDHT serta Hutan Kemasyarakatan (HKM) hanya KK laki-laki yang menjadi target grup, kecuali Perhutanan sosial yang khusus melibatkan partisipasi perempuan (*action research*), itupun hanya perempuan kader. Perempuan hanya berpartisipasi dalam program khusus (P2W), tidak dalam program utama atau masih dalam koridor *Women in Development* (WID).

- Laporan Dephutbun (1999) menyatakan bahwa dari 540 orang peserta pelatihan terdapat 295 perempuan kader yang ikut pelatihan, terdistribusi dalam pelatihan sutra alam (155 orang), lebah madu (110 orang), dan pelatihan tanaman obat-obatan dan rumput laut, masing-masing 30 orang.
- Pada kasus tenaga kerja perempuan dipekerjakan, maka sepanjang mereka bekerja di sektor formal, maka jam kerja TK Perempuan diduga sama dengan TK Laki-laki. Namun demikian sesuai dengan status bekerjanya, maka akan ada variasi jam kerja. Kiranya perlu dilakukan kajian lanjutan, karena diduga perempuan yang berstatus pekerja borongan atau harian lepas bekerja cukup lama, tergantung musim dan jenis pekerjaan.

### 3.3.2.2. Gender dalam Kelembagaan Sosial Ekonomi

- PPA-KP 8 : Peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadap sumber-sumber permodalan, lembaga keuangan bank dan non-bank, teknologi, informasi dan pasar.
- PPA-KP 14 : Pengembangan lembaga keuangan pedesaan
- PPA-KP 19 : Perbaikan posisi tawar petani dalam kegiatan agribisnis melalui pemberdayaan kelembagaan petani
- PKP-KP 26 : Penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatan ketahanan pangan

Keadaan kesenjangan gender dalam hal partisipasi di kelembagaan sosial ekonomi dapat dilihat dari kasus-kasus berikut :

- Pada dasarnya Anggota Kelompok Perempuan Tani (KWT) aktivitasnya dinamis dan aktif manakala baru dibentuk dan ada proyek. Aktivitasnya dominan untuk memenuhi kebutuhan praktis gender dan kurang pada pemenuhan kebutuhan strategis gender. Dewasa ini cenderung menurun aktivitasnya sejalan dengan berakhirnya proyek dan terhentinya pendampingan oleh PPL. Data menunjukkan bahwa anggota KWT yang mengikuti pelatihan PHT jumlahnya tidak sebanyak petani laki-laki.
- Sekalipun keanggotaan koperasi bersifat individual, namun keberadaan KUD sering dikaitkan dengan program penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT)
- Dari sebanyak 7.570 anggota KUD Aktif, hanya 21,19 persennya anggota perempuan. Dari sejumlah 57.952 orang karyawan KUD aktif, hanya

25,96 persennya pengurus perempuan. Perempuan tani/pedesaan yang akses terhadap KUT jauh lebih rendah dibanding petani laki-laki.

- Pada masyarakat nelayan, umumnya pelatihan, kredit dan informasi lebih banyak diakses oleh laki-laki. Kecuali para juragan atau punggawa, pendapatan yang diperoleh nelayan kecil sangat rendah. Demikian pula pendapatan para pedagang ikan perempuan, karena skala usahanya kecil maka pendapatannya juga kecil (Sitorus dkk., 1998)
- Aktivitas kelompok-kelompok perempuan tan tani di Lingkungan sektor pertanian, perhutanan dan perkebunan cenderung aktif jika ada pembinaan dari pihak penyuluh atau fasilitator. Dalam hal KUM, anggotanya sebagian besar aktif sebagai anggota, selainnya pimpinan kelompok. Melaksanakan kegiatan ekonomis-produktif dengan rencana/usulan masing-masing yang dominan dalam usaha mikro

### 3.3.3. Kontrol Anggota Rumahtangga Pertanian

#### 3.3.3.1. Gender dalam Rumahtangga Pertanian

Kegiatan Pokok :

- PPA-KP 2: Petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi pertanian
- PPA-KP 25 : Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat perkebunan
- PPA-KP 29 : Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumberdaya lokal
- PKP-KP 5 :P eningkatan akses petani terhadap modal, teknologi, benih/bibit, pasar dan informasi bisnis pangan

Keadaan kesenjangan gender dalam hal kontrol terhadap rumahtangga pertanian yang terkait dengan kegiatan pokok di atas dapat dijelaskan dari uraian berikut :

- Secara umum struktur yang dominan patriarkhi pada masyarakat Indonesia, menjadikan kontrol perempuan dalam rumahtangga petani, nelayan, peternak, pesanggem dan pekebun terhadap sumberdaya lebih rendah dibanding laki-laki. Namun demikian, dijumpai adanya gejala bahwa semakin tinggi kepemilikan lahan oleh perempuan (isteri) semakin tinggi kontrol perempuan atas produksi pertanian (Mugniyasyah dan Mizuno, 2000).

- Hasil studi di DAS Cimanuk Hulu dan lainnya ditemukan kasus bahwa manakala diadakan program sertifikasi lahan, sekalipun lahan atau aset produksi itu milik perempuan (isteri) namun atas anjuran kepala desa, dalam sertifikat tersebut dicantumkan nama laki-laki. Selain karena sistem patriarkhi, ketidakmengertian isteri (perempuan) atas konsekuensi hukum lahan memungkinkan terjadinya hal tersebut.
- Kontrol perempuan yang rendah terhadap berbagai kesempatan memberdayakan diri mereka juga dimungkinkan karena semua penentu kebijakan dan para pelaksananya juga didominasi oleh laki-laki.
- Sekalipun hampir sebagian besar kontrol perempuan atas sumberdaya pertanian lebih rendah, namun Hasil Analisis Struktur - Ongkos mengemukakan bahwa dalam usahatani tanaman pangan, petani perempuan lebih efisien dalam mengelola usahatani dibandingkan petani laki-laki, terbukti penerimaan keuntungan petani perempuan sebesar Rp. 3.263.894,-/Ha; sementara petani laki-laki hanya Rp. 2.844.619,-/Ha.
- Pada kasus perusahaan TPH, sebagian besar perempuan dipekerjakan pada hirarkhi pekerjaan yang terendah, yakni buruh/karyawan; dan pada banyak kasus hanya sebagai pekerja harian lepas atau borongan. Bahkan pada Sensus Pertanian 1993 dilaporkan bahwa pada perusahaan ternak besar dan kecil masih ditemui status pekerja tidak dibayar (12 % dari 4.936 orang pekerja)
- Pada perusahaan penangkapan ikan dinyatakan bahwa TK Laki-laki sebagian besar dipekerjakan di laut, sementara perempuan bekerja sebagai pekerja pada perusahaan pengemasan (*Cold Storage*). Dalam perusahaan Budidaya perikanan terdapat dua kategori pekerja, yakni Pelabuhan Perikanan atau tepatnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dimana perempuan umumnya dipekerjakan dalam administrasi.
- Pada perusahaan perkebunan, pekerja tetap perempuan sebagian besar menjadi pekerja kebun untuk pekerjaan dengan upah terendah, karena pendidikan mereka sebagian besar SD/tidak tamat SD, sebagian bekerja pada bagian administrasi pada kasus mereka yang berpendidikan tinggi (SLTA dan PT). Demikian pula di lingkungan perusahaan HPH, sekalipun secara proporsional terdapat kesamaan latar belakang pendidikan pekerja laki-laki dan perempuan, namun perempuan cenderung bekerja selaku karyawan administrasi dan pengolahan kayu, dengan status buruh/karyawan. Adapun pada perusahaan HTI, terdapat status pekerja harian lepas/tidak tetap. Dinyatakan bahwa kebutuhannya sekitar 5.360.946

HOK dengan pembagian kerja sekitar 50 persen untuk penyiapan lahan, 22,67 persen untuk penanaman, 20,75 persen untuk penyiangan, dan selainnya pemupukan serta pengendalian gulma. Hampir dipastikan bahwa pekerja perempuan dominan pada penanaman dan penyiangan.

### 3.3.3.2. Gender dalam Kelembagaan Sosial Ekonomi

- PPA-KP 8 : Peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadap sumber-sumber permodalan, lembaga keuangan bank dan non-bank, teknologi, informasi dan pasar.
- PPA-KP 14 : Pengembangan lembaga keuangan pedesaan
- PPA-KP 19 : Perbaikan posisi tawar petani dalam kegiatan agribisnis melalui pemberdayaan kelembagaan petani
- PKP-KP 26 : Penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatan ketahanan pangan

Kesenjangan gender dalam kontrolnya terhadap kelembagaan sosial ekonomi yang terkait dengan kegiatan pokok di atas dapat dijelaskan dengan gambaran berikut :

- Semua kegiatan bersifat "*top-down*", sehingga kontrol perempuan tani terhadap kegiatan rendah atau hampir tidak ada. Namun, umumnya Ketua KWT jauh lebih kontrol terhadap stimulan dibanding anggotanya.
- Seperti diketahui, dari sejumlah 18.421 orang pengawas KUD, hanya 1,82 persen perempuan. Adapun dari sejumlah 29.072 pengurus KUD Aktif, hanya 5,7 persen perempuan. Sekalipun demikian, perempuan yang duduk pengurus KUD cenderung hanya menduduki posisi stereotip, seperti bendahara dan atau sekretaris.
- Meskipun demikian, pada kasus program KUM perempuan dominan kontrol terhadap usaha ekonomis produktif yang dikelolanya juga terhadap tunggakan cicilan dari anggota kelompok lainnya (KUM).
- Sebagian besar keputusan yang diambil oleh kelompok tani dominan dilakukan oleh penyuluhnya (mayoritas laki-laki, sebanyak 83,4%) dibanding oleh kelompoknya sendiri. Khusus, "pada kelompok seperti DPG, maka aktivitasnya cenderung pada reproduktif, dengan skala usaha yang sangat kecil, karena lahan pekarangan domain reproduktif, yang dimiliki anggota cenderung sempit. Hal ini dikarenakan pendekatan yang cenderung *top-down*. Selain itu juga karena proses sosialisasi yang bias gender menjadikan anggota kelompok tani sendiri umumnya memiliki kepemimpinan relatif rendah.

### **3.3.4. Manfaat Yang Dinikmati Anggota Rumahtangga Pertanian**

#### **3.3.4.1. Gender dalam Rumahtangga Pertanian**

Gambaran mengenai kesenjangan gender di tingkat keluarga dalam hal menikmati manfaat pembangunan antara lain ditunjukkan dalam kasus-kasus berikut :

- Pada tingkat rumahtangga pertanian, perempuan akses terhadap hasil produksi usahatani mereka, namun terdapat hasil studi yang menunjukkan bahwa nilai gender mempengaruhi distribusi makanan di tingkat keluarga/rumahtangga. Perempuan (ibu) memperoleh porsi yang lebih rendah, dibanding, suami dan anak-anaknya.
- Sebagai akibat dari nilai budaya, gender dan struktur yang patriarkhi, hampir semua kesempatan atau peluang untuk memperoleh manfaat dari introduksi beragam program pemerintah sangat sedikit yang dinikmati oleh perempuan petani diantaranya perempuan yang menjadi peserta Program Peningkatan Petani Kecil (P4K) dan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG).
- Bagi perempuan yang bekerja di perusahaan pertanian, karena sebagian besar diantara perempuan dominan bekerja pada hirarki kerja yang terendah, maka upah perempuan cenderung lebih rendah, terlebih mereka yang berstatus harian lepas atau tenaga borongan, praktis mereka tidak memperoleh tunjangan kesehatan dan hari-hari besar (Hari Raya), serta tidak memperoleh hak-hak lainnya mana yang diterima pekerja tetap.

#### **3.3.4.2. Gender dalam Kelembagaan Sosial-Ekonomi Pertanian**

Kesenjangan gender dalam hal manfaat yang dinikmati melalui kelembagaan sosial ekonomi pertanian terutama dirasakan oleh peserta penyuluhan dan pelatihan yang memperoleh IPTEK dan stimulan baik dari pemerintah maupun LSM. Namun dengan menurunnya kualitas dan frekuensi kegiatan maka manfaat yang diperoleh kurang berkelanjutan.

- Kecuali pada kasus Koperasi Perempuan, secara umum, akibat langkanya perempuan yang duduk dalam kepengurusan koperasi, maka manfaat yang diperoleh perempuan dari partisipasinya dalam KUD lebih rendah dibanding laki-laki. Sekalipun ada kredit untuk pengurus, namun pengurus perempuan kurang menikmati peluang tersebut (Meity Ria, 1999). Peluang kredit bagi pengembangan usaha anggota, terbuka untuk

anggota perempuan maupun laki-laki. Namun jumlah pinjaman yang dinikmati perempuan lebih rendah dari laki-laki.

- Dalam hal Karya Usaha Mandiri (KUM), perempuan beserta keluarganya memperoleh manfaat berupa modal, latihan kepemimpinan (kasus KUM), pengembangan atau kelancaran usaha serta peningkatan pendapatan. Dilaporkan bahwa kasus KUM hanya 2,3 % tunggakan kredit (Kasryno, 1999). Dalam hal adopsi teknologi perempuan sangat rendah, sementara dalam hal rata-rata konsumsi energi peserta DPG lebih tinggi dibanding non-peserta DPG (Rachman, dkk, 1996). Adapun Kelompok Petani Kecil (KPK) yang mengembangkan Usaha Bersama (UB) telah menikmati kredit sebesar Rp. 36.564.750.000 (1999).

#### 3.3.4.3. Gender dan IPTEK

- Dampak negatif Revolusi Hijau yang mengintroduksi alat mesin pertanian (alsintan) seperti traktor, penggilingan padi, sabit bergerigi, alat perontok, alat pengering padi adalah tersingkirnya tenaga kerja perempuan, khususnya buruh tani dan petani gurem (penggarap) dalam pekerjaan pasca panen primer. Demikian juga halnya penggunaan bahan-bahan kimia seperti herbisida yang berdampak pada tersingkirnya pekerja perempuan yang berburuh sebagai penyang. Hal ini terjadi karena para pencipta teknologi pertanian seringkali mengabaikan pengalaman dan kepentingan perempuan secara lokal serta tidak merancang alsintan yang disesuaikan dengan ergonomi perempuan.
- Terdapat persepsi yang keliru di kalangan penentu kebijakan dan pelaksana kebijakan tentang perempuan tani dan teknologi pertanian. Anggapan yang ada pada mereka adalah bahwa teknologi yang selama ini cenderung lebih ditujukan kepada laki-laki itu seharusnya dipandang sebagai upaya memberi penghargaan dan kehormatan kepada perempuan agar mereka lebih berkonsentrasi pada kegiatan domestik. Permasalahannya adalah bahwa tersingkirnya perempuan tani dari pekerjaannya setelah suatu teknologi pertanian diintroduksi pada masyarakat petani berdampak negatif kepada hilangnya kesempatan bekerja dan berusaha perempuan tani; sehingga mereka juga tidak dapat berkonsentrasi pada domestik misalnya, sepanjang tidak ada pangan yang bisa mereka hidangkan.
- Rendahnya pengetahuan mengenai manajemen pestisida berdampak negatif pada kesehatan petani, termasuk petani perempuan.

- Secara umum program-program pembangunan pertanian mengabaikan kearifan dan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*), termasuk mengabaikan relasi laki-laki dan perempuan pada tataran empiris yang sifatnya spesifik lokal.

### 3.4. Isu Gender

#### 3.4.1. Pada Tingkat Rumahtangga Pertanian

- Pengakuan *de jure* bahwa laki-laki menjadi KK pada rumahtangga pertanian baik itu rumahtangga tanaman pangan, hortikultura, palawija dan peternak, nelayan, serta kehutanan dan perkebunan yang merupakan struktur patriarki berakibat pada status perempuan dalam rumahtangga pertanian dianggap hanya sebagai pekerja keluarga tanpa upah. Pada hal kenyataan menunjukkan sekitar 10 % rumahtangga pertanian dikepalai perempuan.
- Pengakuan *de jure* tersebut disertai nilai budaya gender yang mengakar kuat pada berbagai lapisan masyarakat termasuk birokrat dan teknokrat telah menjadikan program pembangunan bias laki-laki. Selanjutnya, ini menyebabkan pada akses perempuan rendah terhadap aset produksi (lahan usaha tani/kebun/hutan, ternak, perahu motor, alat penangkapan ikan modern), kredit bagi pembelian input produksi maupun pengembangan usahatani serta penyuluhan dan pelatihan IPTEK pertanian sangat bias laki-laki.
- Sekalipun belum dibuktikan secara empiris, stereotipe bahwa laki-laki pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pekerja sambilan, membawa pada anggapan bahwa produktivitas perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Ini berakibat pada rendahnya upah perempuan dibanding laki-laki.
- Nilai upah buruh berbentuk makanan (di luar upah resmi) bagi perempuan kualitasnya lebih rendah dari laki-laki, sementara itu buruh laki-laki juga memperoleh rokok. Hal ini bertambah buruk lagi manakala perempuan berasal dari lapisan miskin di pedesaan yang karena posisi tawar mereka terhadap petani pemilik/penyewa rendah, menyebabkan perempuan bersedia berburuh dengan upah lebih rendah lagi. Bahkan pada kasus-kasus tertentu perempuan tidak memperoleh upah atas pekerjaannya membantu majikan suaminya, karena mereka menjadi jaminan bagi peluang bekerja suaminya.
- Selama ini lebih rendahnya akses perempuan daripada laki-laki terhadap lahan pertanian/aset produksi pada keluarga petani yang

mayoritas beragama Islam dimungkinkan oleh adanya distribusi/alokasi harta dalam rumahtangga pertanian yang cenderung diatur oleh sistim pewarisan yang belum banyak melalui pelebagaan “hibah”, yaitu mengalokasikan harta secara setara antara laki-laki dan perempuan.

- Mengingat pekerjaan yang melibatkan keluarga pertanian dianggap sektor informal, maka hingga kini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur hak-hak dan kewajiban tenaga kerja pertanian. di lain pihak, UU RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya pasal 11 dan pasal 14 belum tersosialisasikan.
- Lebih rendahnya tingkat pendidikan anggota rumahtangga pertanian perempuan daripada laki-laki menyebabkan lebih rendahnya akses perempuan terhadap pekerjaan di sektor pertanian dan/atau di sektor informal yang memungkinkan mereka memperoleh upah yang pantas/tinggi dan skim (*scheme*) kredit dari pemerintah.
- Khusus pada masyarakat nelayan, nilai budaya gender dan struktur patriarki di satu pihak serta desakan kebutuhan ekonomi di lain pihak berakibat pada meningkatnya perempuan pekerja seks. Bahkan, mereka menjadi daya tarik bagi nelayan migran untuk memasarkan ikannya di TPI, hampir di seluruh pantai Utara Jawa
- Di lingkungan perusahaan pertanian, stereotipe atas pembagian kerja yang masih kuat serta pandangan bahwa bekerja dekat dengan alam (kehutanan, perkebunan dan kelautan) membutuhkan fisik yang kuat karena lebih banyak berkecimpung di lapangan, menyebabkan penyerapan tenaga kerja perempuan di perusahaan pertanian lebih rendah dibanding laki-laki, dan memunculkan segregasi.
- Marginalisasi perempuan di perusahaan-perusahaan pertanian dominan, dimana perempuan hanya dipekerjakan sebagai pekerja borongan dengan upah borongan dan ketiadaan tunjangan sakit dan lainnya.
- Pandangan bahwa teknologi merupakan domain laki-laki, juga mengakibatkan terjadinya penyingkiran perempuan pada pasar tenaga kerja yang menggunakan teknologi canggih.

#### 3.4.2. Pada Tingkat Kelembagaan Sosial Ekonomi Pertanian

- Adanya asumsi bahwa hanya kepala keluarga yang menjadi anggota koperasi, dan bahwa KK tersebut secara *de jure* adalah suami/laki-laki, maka akses dan kontrol perempuan terhadap KUD dan lembaga sejenis

sangat rendah. Di pihak lain, kurang aksesnya perempuan tani dan nelayan penghutan dan pekebun yang mengepalai rumahtangga (WKRT) miskin (gurem) semakin bertambah karena mereka menganggap uang untuk membayar simpanan wajib cukup berat. Selain itu, KUD belum mengembangkan kegiatan yang responsif terhadap pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender.

- Stereotype terhadap pekerja perempuan, tercermin dari seringnya memposisikan mereka dalam posisi yang “feminin”/*domestic oriented*, seperti sekretaris dan bendahara. Hal ini didukung oleh rendahnya jumlah perempuan lulusan IKOPIN atau sejenis yang didudukkan sebagai manajer dalam KUD dan koperasi sejenis.
- KUD hanya menangani pelayan kredit untuk memenuhi kebutuhan usaha yang dikelola oleh laki-laki dan belum melayani semua cabang usaha yang dikelola perempuan.
- Kentalnya persepsi stereotype gender di kalangan penentu program dan pelaksana program serta masyarakat yang sangat kental pada stereotype peran domestik perempuan, menjadikan kegiatan-kegiatan program pengentasan kemiskinan cenderung dominan dalam memenuhi kebutuhan praktis gender dan kurang dalam pemenuhan kebutuhan strategis gender (dalam peningkatan pendapatan). Selain itu cenderung tidak berkelanjutan/belum mampu meningkatkan ketahanan pangan mereka.
- Jumlah stimulan yang diberikan kepada perempuan miskin umumnya rendah. Hal ini menyebabkan modal/stimulant habis dikonsumsi atau digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.
- Belum terintegrasinya pendampingan usaha bersama (UB) yang menggunakan pendekatan partisipatif berperspektif gender yang mencakup pendampingan dari sisi produksi maupun pemasaran; sehingga sekalipun keberlanjutan UB relatif nyata namun kontribusinya terbatas pada strategi survival.

#### 4.3. Dalam Penguasaan IPTEK

- Masih adanya pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan departemen sektoral yang belum tersosialisasi dengan pentingnya *gender mainstreaming* dalam program pembangunan berkelanjutan dan masih beranggapan bahwa teknologi itu netral.
- Dominannya pendekatan transfer teknologi dalam pembangunan pertanian dan kehutanan yang bias pro inovasi : disertai kuatnya

stereotipe pembagian kerja gender di kalangan pengambil keputusan, pengelola program dan masyarakat itu sendiri –karena pengaruh budaya gender– menjadikan pembentukan kelompok tani juga bias laki-laki.

- Kecuali untuk Program SLPHT, program untuk KWT cenderung bias gender, yakni dominan diwarnai pemenuhan kebutuhan praktis pada sektor domestik atau isue produktif namun skala usaha sangat mikro serta cenderung sebagai “*crash program*” yang terbatas masa kelangsungan dan dananya.
- Masih belum meratanya penyadaran gender, pelatihan teknis analisis gender dan perencanaan aksi (penyusunan program) secara partisipatif yang berperspektif gender bagi kalangan petugas penyuluh lapangan.
- Masih kuatnya persepsi di kalangan petugas penyuluh yang beranggapan bahwa perempuan tani sudah sangat repot dengan urusan dapur jadi tidak ada waktu lagi untuk kelompok tani. Bahkan ada anggapan bahwa petani perempuan kurang cepat menyerap informasi. Selain itu, penyuluh seringkali juga dipengaruhi oleh aspek budaya yakni agak “enggan” berhadapan dengan petani, nelayan dan pekebun perempuan.

## BAB IV

# REFORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG RESPONSIF GENDER

### 4.1. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang Responsif Gender

Guna merealisasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan ekonomi, khususnya pada pembangunan pertanian, perlu dirumuskan kembali semua kebijakan pembangunan nasional dengan menyatakan secara eksplisit basis kesetaraan dan keadilan gender di dalamnya.

Mengingat pembangunan pertanian dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, maka reformulasi kebijakan pembangunan pertanian yang responsif gender dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada pada dokumen PROPENAS tersebut. Adapun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang berperspektif gender tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil dan setara gender bagi seluruh masyarakat.
2. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang.
3. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif, terutama

berbasis kesetaraan dan keadilan gender, keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

4. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha yang berbasis kesetaraan dan keadilan gender.
5. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan, budaya lokal serta kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan anggota rumahtangga/keluarga petani dan nelayan baik laki-laki maupun perempuan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang.
6. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah yang adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
7. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat dengan berbasiskan kesetaraan dan keadilan gender.
8. Melakukan berbagai upaya terpadu yang berbasis kesetaraan dan keadilan gender untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.

Beberapa langkah penyetaraan gender dalam pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui :

- Meningkatkan sosialisasi pengarusutamaan gender bagi para pengambil keputusan pada pembangunan pertanian, khususnya di lingkungan Departemen Pertanian.
- Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian yang berbasis kesetaraan dan keadilan gender dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
- Mencantumkan secara eksplisit pengertian sumberdaya rumahtangga pertanian, kelautan dan kehutanan yang mencakup kepala keluarga dan semua anggota keluarga petani, peternak, nelayan, pekebun, pesanggem baik laki-laki maupun perempuan.
- Meningkatkan akses dan kontrol petani, peternak, nelayan, pekebun, pesanggem perempuan terhadap aset produksi berupa lahan pertanian/perkebunan/perhutanan/kapal, teknologi, kredit, informasi, teknologi, penyuluhan dan pelatihan yang diperlukan bagi peningkatan kualitas penguasaan pengelolaan usahatani/kebun/hutan, penangkapan dan budi daya perikanan yang mencakup aspek produksi dan pasca panen primer maupun sekunder.
- Meningkatkan kemampuan petani, pekebun, peternak, nelayan, pesanggem perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pengelolaan kelembagaan sosial ekonomi yang mencakup kelompok tani, nelayan, peternak, pekebun dan pesanggem, dan kelompok usaha bersama mandiri, usaha kecil dan menengah serta perkoperasian dengan memanfaatkan kelembagaan lokal yang efektif untuk memenuhi kebutuhan strategis gender.
- Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani (termasuk peternak, pekebun, pesanggem) dan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan dilandasi pendekatan partisipatif yang berperspektif gender.
- Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan tentang penyusunan program pembangunan pertanian secara partisipatif (melibatkan semua *stakeholder*) dan berperspektif gender yang lebih mengutamakan pada pemenuhan kebutuhan strategis gender antara lain dengan meningkatkan proporsi materi yang menyangkut aspek-aspek produksi

pertanian dan pasca panen (pengolahan pangan), serta pemasarannya sehingga mampu menjamin keberlanjutan usaha.

- Memberdayakan sumberdaya manusia pendukung pembangunan pertanian, kelautan dan kehutanan pada tingkat keluarga/rumahtangga petani, kelembagaan sosial ekonomi pertanian/perdesaan (kelompok tani, koperasi), kelembagaan penyuluhan pertanian, kelautan dan kehutanan, serta tenaga ahli peneliti dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan berbasiskan kesetaraan dan keadilan gender.
- Meningkatkan suatu kajian bersama (*cooperative inquiry*) antara rumahtangga petani, penyuluh, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga akar rumput dalam penerapan IPTEK guna meningkatkan produktivitas usaha tani dan usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan keunggulan lokal dengan berbasis pendekatan partisipatif yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.
- Meningkatkan upaya-upaya penyebarluasan (diseminasi) pelembagaan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya pasal 11 dan pasal 14 disertai dengan dirumuskannya Undang-undang Ketenagakerjaan untuk sektor pertanian dan informal lainnya.
- Meninjau kembali semua sistem pewarisan menurut adat (sistem primogenitur, hak ulayat) serta lebih meningkatkan akan pentingnya opsi hibah yang adil dan setara kepada anak laki-laki dan perempuan kepada para pemuka agama, khususnya Islam, yang selama ini lebih memfokuskan pendidikan agama pada sistem pewarisan.
- Mengintegrasikan, menyisipkan atau menginkorporasikan perspektif gender ke dalam kurikulum dan materi kuliah yang ada, seperti : memasukkan teknik analisis gender dalam metodologi penelitian ilmu sosial, sosiologi gender, komunikasi gender, gender dan pembangunan, di lingkungan perguruan tinggi yang memiliki fakultas/jurusan pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan.
- Meningkatkan pemahaman kesetaraan dan keadilan gender sejak jenjang pendidikan terendah, disertai dengan penyuluhan tentang perlindungan tenaga kerja wanita khususnya yang berkaitan dengan peran reproduksinya.

- Meningkatkan akses anak-anak keluarga petani terhadap beasiswa guna meningkatkan pendidikan formal mereka baik pada pendidikan umum maupun kejuruan dari menengah hingga perguruan tinggi dengan berbasis kesetaraan dan keadilan gender.

## 4.2. Indikator Kinerja

### 4.2.1. Pada Tingkat Rumahtangga Pertanian

- Dilaksanakannya aksi afirmatif (*affirmative action*) guna meningkatkan akses dan kontrol petani perempuan terhadap lahan usaha (pertanian, peternakan, nelayan, perkebunan, dan kehutanan) melalui pendistribusi-an lahan tidur, lahan perhutanan sosial, perkebunan, lahan tambak, dan transmigrasi, dengan pemberian bantuan input, penguatan modal/kredit bergulir, ternak, alat penangkapan ikan dan budidaya ikan, dan tanaman produktif lainnya disertai dengan pendampingan manajemen usaha yang berwawasan agribisnis.
- Dilaksanakannya aksi afirmatif pemberdayaan keluarga/rumahtangga pertanian, peternak, nelayan, perkebunan, dan kehutanan serta pelaku usaha lainnya dalam penyelenggaraan program dan proyek pertanian dan kehutanan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang berperspektif gender sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya.
- Didiseminaskannya UU RI No.7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya Pasal 11 dan 14 bagi semua *stakeholders* yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian.
- Terumuskannya peraturan-peraturan perlindungan tenaga kerja sektor informal (pertanian dalam arti luas dan industri kecil, perkebunan dan kehutanan) dalam UU Ketenagakerjaan atau dibuat peraturan khusus, misalnya tentang upah di sektor pertanian (dalam arti luas), perkebunan, dan kehutanan yang tidak diskriminatif gender.
- Dilaksanakannya penyadaran gender khususnya dalam hal sistem alokasi sumberdaya aset produksi (lahan usahatani, usaha tambak, alat/perlengkapan penangkapan dan budidaya perikanan) bagi pemuka agama; dan dilaksanakannya penyadaran gender bagi masyarakat pertanian/perdesaan (pertanian dan pesisir/nelayan) mengenai opsi hibah yang adil dalam mengalokasikan aset produksi kepada anak-anak perempuan dan laki-laki mereka.

- Dilaksanakannya penyadaran gender di lingkungan perusahaan pertanian, kehutanan, dan perkebunan, serta penyuluhan tentang UU RI No 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Dilaksanakannya suatu kaji tindak tentang efisiensi dan produktivitas usaha pertanian, usaha perkebunan, dan kehutanan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang berperspektif gender sebagai masukan bagi upaya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan pertanian.
- Dihapuskannya ketentuan-ketentuan yang diskriminatif terhadap upah (lihat buku "Analisis Gender dalam Pembangunan Hukum").
- Tersosialisasinya kesetaraan hak (termasuk promosi karir) dan kewajiban pekerja antara pekerja perempuan dan laki-laki disertai sosialisasi tentang perlindungan atas hak-hak kesehatan reproduksinya.
- Diberikannya sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan hukum bagi buruh perempuan
- Terlaksananya evaluasi berbagai program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan gender, dan tersedianya data penyaluran kredit dalam program tersebut secara terdisagregasi gender.
- Dilakukannya tindakan afirmatif dalam penyaluran dana program pengentasan kemiskinan (JPS dan kredit usaha kecil lainnya) dengan mengalokasikan dana kepada KK dan anggota rumah tangga perempuan yang mengembangkan usaha tani/usaha non-pertanian lainnya (50 % atau lebih).
- Dikembangkannya usaha kecil (*micro enterprise*) di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang dikelola perempuan disertai dengan pelayanan/konsultasi bisnis atau pendampingan usaha yang dapat memfasilitasi mereka terhadap akses sumberdaya (*sisi supply dan demand*) sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka.
- Dikembangkannya Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang berperspektif gender dan dengan melibatkan keluarga miskin di perdesaan.
- Dilaksanakannya Perhutanan Sosial dan Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT) yang partisipatif dan berperspektif gender dengan melibatkan KK dan atau anggota rumah tangga petani lahan kering perempuan yang tak berlahan dan atau gurem.

#### 4.2.2. Pada Tingkat Kelembagaan Sosial Ekonomi

- Dilaksanakannya tindakan afirmatif untuk pembentukan kelompok wanita tani/peternak, nelayan yang berbasis pada kelembagaan lokal yang melibatkan partisipasi perempuan pertanian.
- Dilaksanakannya tindakan afirmatif dalam bentuk kegiatan pendampingan kepada kelompok wanita tani/peternak/nelayan baik dari sisi *supply* (proses produksi hingga pemasaran hasil produksi) dan dikembangkan usaha bersama (UB) yang mampu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender.
- Tersedianya data statistik kelompok wanita tani/peternak/nelayan yang menyangkut kuantitas dan kualitas aktivitasnya berdasarkan usaha yang dikembangkan.
- Terfasilitasinya anggota kelompok wanita tani dan KK/anggota rumah tangga petani untuk akses terhadap sumberdaya pertanian termasuk KUD/KOPTAN dan lembaga keuangan lainnya.
- Dilaksanakannya tindakan afirmatif dalam pembinaan KUD dengan menetapkan kuota perempuan yang menduduki posisi pengurus, manajer, pengawas, dan karyawan yang menghilangkan stereotipe gender serta diberikannya kebebasan kepada perempuan, baik itu sebagai KK maupun anggota rumah tangga untuk menjadi anggota KUD.
- Diterapkannya standar upah bagi karyawan KUD sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.
- Tersedianya data partisipasi dan kontrol KK dan anggota rumah tangga petani terhadap KUD dan perbankan yang terdisagregasi menurut jenis kelamin.
- Dikembangkannya pola kemitraan antara kelompok tani perempuan dan laki-laki dengan KUD dan pengusaha (BUMN dan swasta) dari sisi *supply* dan atau sisi pemasaran, sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam agribisnis dan atau anggota kelompok tani.

#### 4.2.3. Pada Tingkat Aparat Pertanian

- Dilaksanakannya penyadaran gender kepada koperasi perdesaan (misalnya KUD) dan lembaga ekonomi perdesaan lainnya (misalnya BRI). Khusus untuk perbankan agar memberikan pelayanan hak-hak dan kewajiban yang sama kepada nasabah petani perempuan dan laki-laki.

- Dilaksanakannya pelatihan pengembangan manajemen proyek yang responsif gender dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perkebunan kepada para profesional (peneliti, penyuluh, dan pelatih).
- Tersusunnya program penyuluhan dan pelatihan yang responsif gender dalam bidang pertanian, serta kehutanan, dan perkebunan kepada para profesional (peneliti, penyuluh, dan pelatih) dengan melibatkan seluruh *stakeholders*.
- Dimasukkannya klarifikasi “keahlian” pengembangan manajemen proyek yang responsif gender dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perkebunan sebagai salah satu kriteria promosi karir bagi para profesional (peneliti, penyuluh, dan pelatih).
- Tersedianya data statistik pejabat struktural dan jabatan fungsional yang terpilah menurut jenis kelamin serta tingkat pendidikan dan atau kualifikasi mereka (jenjang kepangkatan dan lainnya), pengalaman mengikuti pelatihan atau pendidikan yang relevan.
- Terselenggaranya penyadaran gender bagi pejabat struktural (Eselon 1 - 3) khususnya pada lingkup Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan agar mereka mengintegrasikan *gender mainstreaming* ke dalam program-program pembangunan pertanian kehutanan, dan perkebunan.

#### 4.2.4. Pada Lingkungan Aparat/Jajaran Pertanian dalam IPTEK

- Dilakukannya evaluasi kinerja dan hasil-hasil penyuluhan dan pelatihan IPTEK di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang terpilah menurut jenis kelamin.
- Dilaksanakannya penilaian kebutuhan penyuluhan dan pelatihan IPTEK di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan di kalangan warga masyarakat pertanian yang terpilah menurut jenis kelamin.
- Dilakukannya tindakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah/rasio perempuan perdesaan yang mengikuti penyuluhan dan pelatihan IPTEK pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang berbasis komunitas.
- Dilakukannya identifikasi *indigenous knowledge* yang berkenaan dengan budidaya dan pasca panen komoditi unggulan lokal yang efisien dan ramah lingkungan yang terpilah menurut jenis kelamin, termasuk teknologi lokal yang disertai dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) mereka.

- Dilakukannya uji coba lokal suatu teknologi baru yang dilaksanakan secara partisipatif dan menggunakan perspektif gender.
- Dikembangkannya pola kemitraan antara rumahtangga petani, kelompok tani perempuan dan laki-laki dengan pihak swasta yang dilandasi prinsip keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga di perdesaan.
- Terlembagakannya “lembaga konsultasi bisnis” yang dikelola para profesional di tingkat daerah/lokal yang melibatkan *stakeholders* profesional termasuk di kalangan petani, yang memberikan asupan dalam hal pengembangan usahatani berwawasan agribisnis yang mampu meningkatkan memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender.

#### 4.2.5. Program Penunjang

- Dilaksanakannya sensus pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan yang mengumpulkan data dasar (*baseline data*) yang terpilah menurut jenis kelamin dan dengan penetapan status KK sesuai dengan *de facto*.
- Dilakukannya studi yang mengumpulkan data dasar yang terpilah menurut jenis kelamin tentang akses KK dan anggota rumahtangga pekerja pertanian (dalam arti luas) dan industri (beragam skala usaha), perkebunan dan kehutanan (HKR dan HKM) terhadap sumberdaya pembangunan (aset produksi, informasi, IPTEK, modal, kredit, penyuluhan, dan pelatihan) dengan beragam latar belakang ekosistem.

## BAB V

### RENCANA AKSI PEMBANGUNAN PERTANIAN

Sebagai implikasi dari hasil analisis gender REPETA 2002, maka dirumuskan Rencana Aksi dan Indikator Rencana Aksi untuk REPETA 2002 tersebut. Mengingat adanya keterkaitan erat dan atau "ketumpangtindihan" dalam kegiatan pokok yang ada pada Program Pengembangan Agribisnis dan Program Ketahanan Pangan yang dirumuskan dalam Propenas 2000-2004, maka rumusan Rencana Aksi dan Indikator Rencana Aksi yang ada pada Lampiran 12 juga menunjukkan ketumpang-tindihan tersebut. Untuk tidak terkesan mengulang-ulang rumusan Rencana Aksi dan Indikatornya, maka kedua hal tersebut disintesakan sesuai tingkatan pelakunya, yakni tingkat rumah tangga pertanian dan pelaku bisnis (usaha rumah tangga, kecil, dan menengah), tingkat kelembagaan sosial-ekonomi (yang ada pada tingkat masyarakat), dan pihak aparat lingkup pertanian.

#### 5.1. Rencana Aksi

##### 5.1.1. Pada Tingkat Rumah tangga Pertanian dan Pelaku Bisnis (Pertanian)

- Melakukan tindakan afirmatif untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan tani terhadap aset produksi pertanian (berupa lahan usaha tani, tambak, kebun, perahu/kapal penangkap ikan, ternak dan input produksi, kredit serta aset produksi lainnya) yang memungkinkan perempuan baik sebagai anggota maupun KK rumah tangga petani (pangan, hortikultura, ternak, perikanan, perkebunan, dan kehutanan) atau sebagai anggota kelompok wanita tani dapat mengelola usahatani dengan skala usaha yang lebih efisien dan produktif.
- Melakukan tindakan afirmatif pemberdayaan perempuan pengusaha untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan pengelola usaha rumah tangga, kecil dan menengah (UKM) terhadap aset produksi usaha, kredit, IPTEK, penyuluhan dan pelatihan serta kelembagaan yang memungkinkan mereka dapat mengelola usahatani dengan skala usaha yang lebih efisien dan produktif.
- Melakukan persamaan persepsi di antara *stakeholders* (warga masyarakat petani, petugas penyuluh, petugas sensus pertanian, peneliti dan pelaku

bisnis lingkup pertanian), bahwa subyek mereka (petani dan pengusaha UKM) terdiri atas laki-laki dan perempuan tani.

- Meningkatkan kesadaran anggota masyarakat tentang kenyataan/fakta bahwa KK dan pekerja rumah tangga pertanian dan pengusaha UKM terdiri atas laki-laki dan perempuan serta menyediakan data statistik yang akurat mengenai status KK, anggota rumah tangga pertanian dan pengusaha UKM yang terpilah menurut jenis kelamin, serta akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya pertanian.
- Memberikan penyuluhan atau diseminasi informasi tentang UU RI No 7/1984, khususnya Pasal 11 dan Pasal 14 (lihat lampiran 12), dan merumuskan perlindungan hukum terhadap pekerja pertanian ke dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997, baik di kalangan masyarakat pertanian (laki-laki dan perempuan) serta pelaku bisnis (UKM).
- Memberikan penyuluhan dan pelatihan penerapan teknologi pertanian (proses produksi dan pasca panen) bagi perempuan dan laki-laki sesuai dengan keunggulan dan kebutuhan lokal, disertai dengan pemberian berbagai informasi yang memuat informasi budidaya dan usaha/bisnis pertanian.
- Memberdayakan perempuan pelaku bisnis dalam memproduksi produk pertanian yang bermutu sesuai dengan keinginan/permintaan pasar serta menyediakan fasilitas berupa alat pengolah produk pertanian sederhana atau teknologi tepat guna bagi pengembangan industri pasar.
- Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja perempuan tani dengan meniadakan status pekerja lepasan kepada mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan status tersebut di lingkungan perusahaan pertanian, dan memberi status pekerja tetap di lingkungan perusahaan pertanian, baik milik negara maupun swasta.
- Memberikan kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan, jam kerja, dan persyaratan kerja; memberikan kesetaraan dalam promosi karier di perusahaan; serta memberikan hak-hak atas kondisi bekerja, keselamatan, dan tunjangan kerja yang sama kepada pekerja laki-laki dan perempuan.
- Bersama-sama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah untuk memfasilitasi akses dan informasi pengembangan agribisnis yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki pengelola UKM.

- Menghimbau Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sensus pertanian dan atau survei usaha rumah tangga dan kecil (pelaku bisnis pertanian) dengan data yang terpilah menurut jenis kelamin.

### 5.1.2. Pada Tingkat Kelembagaan Sosial Ekonomi-Pertanian

- Memberikan penyuluhan dan pendampingan bagi perempuan tani untuk mengembangkan kelompok wanita tani dan kelompok wanita pengusaha yang mampu meningkatkan proses belajar para anggotanya untuk menjadi petani dan pengusaha yang berkualitas dan produktif.
- Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan terhadap anggota kelompok tani/peternak/nelayan perempuan agar mereka dapat mengakses beragam sumberdaya pembangunan pertanian (kredit/modal, informasi, teknologi, keterampilan manajerial, dan lainnya).
- Melakukan penyadaran gender bagi para pengurus atau pimpinan kelembagaan sosial ekonomi pertanian (kelompok tani dan KUD) agar responsif terhadap pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender, baik untuk anggota rumah tangga petani perempuan maupun perempuan pengelola UKM.
- Melaksanakan tindakan afirmatif untuk mendorong partisipasi perempuan sebagai anggota dan pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kelompok tani dewasa dan atau kelompok usaha serta dalam KUD secara proporsional.
- Memberikan pendampingan bagi perempuan perdesaan dalam aspek manajemen koperasi agar dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan koperasi perempuan di desanya masing-masing sebagai pengawas, pengurus, atau manajer usaha koperasi.
- Melaksanakan pelatihan pengembangan usaha KUD yang responsif terhadap pemenuhan kebutuhan praktis gender (antara lain memberi pelayanan yang berhubungan dengan kredit, usaha, informasi) dan kebutuhan strategis gender (memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan) bagi para pengurus, karyawan, dan anggota KUD.

### 5.1.3. Pemberdayaan Aparat Pertanian

- Melaksanakan penyadaran gender bagi pembuat dan pelaksana kebijakan di jajaran Departemen Pertanian secara berkesinambungan melalui lokakarya, *roundtable discussion*, diskusi kelompok terarah, dan lainnya.

- Melaksanakan penyadaran gender di kalangan direktur berbagai bank agar memberikan fasilitas kredit bagi rumah tangga pertanian (dalam arti luas) dengan dilandasi kesetaraan dan keadilan gender.
- Merumuskan kebijakan yang tertuang dalam SK Bersama antara Menteri Pertanian dan sektor terkait lainnya dengan Kantor Meneg PP mengenai pengintegrasian gender dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian .
- Melaksanakan pelatihan bagi para penyuluh dan peneliti secara berjenjang—sesuai tingkatan tugas pokok dan fungsinya—tentang penyusunan program pembangunan pertanian yang responsif gender dengan mengintegrasikan pendekatan PRA dengan teknik analisis gender.

## 5.2. Indikator Rencana Aksi

### 5.2.1. Pada Tingkat Rumah tangga Pertanian dan Pelaku Bisnis

- Meningkatnya jumlah perempuan tani yang memiliki akses dan kontrol terhadap aset produksi pertanian (lahan usahatani, tambak, kebun, alat dan kapal penangkap ikan, ternak, input produksi, alat mesin pertanian, dan aset produksi lainnya) sehingga perempuan tani baik sebagai anggota maupun KK rumah tangga petani (pangan, hortikultura, ternak, perikanan, perkebunan, dan kehutanan) dan ataupun anggota kelompok wanita tani dapat mengelola usahatani dengan skala usaha yang lebih efisien dan produktif.
- Meningkatnya jumlah perempuan pengusaha UKM pertanian yang memiliki akses dan kontrol terhadap aset produksi usaha, kredit, IPTEK, penyuluhan dan pelatihan serta kelembagaan yang memungkinkan mereka dapat mengelola usaha dengan skala usaha yang lebih efisien dan produktif.
- Meningkatnya jumlah *stakeholders* atau pihak yang berkepentingan dengan pembangunan pertanian (masyarakat petani, petugas penyuluh, petugas sensus pertanian, peneliti, pelaku bisnis lingkup pertanian) yang menerima bahwa secara *de facto* perempuan bisa berstatus sebagai KK/anggota rumah tangga petani.
- Meningkatnya frekuensi penyuluhan atau diseminasi Undang-undang RI No 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya pasal 11 dan 14 yang ditujukan kepada *stakeholders* pembangunan pertanian.

- Terumuskannya perlindungan tenaga kerja sektor informal, pertanian, dan UKM ke dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997.
- Tersedianya data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin mengenai status KK dan anggota rumah tangga yang bekerja dan berusaha (UKM) di sektor pertanian (dalam arti luas).
- Meningkatnya jumlah perempuan tani yang memiliki akses dan berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan penerapan teknologi pertanian (proses produksi dan pasca panen) yang sesuai dengan keunggulan dan kebutuhan lokal, serta memiliki akses terhadap informasi terutama informasi budidaya dan usaha/bisnis pertanian.
- Meningkatnya perempuan pelaku bisnis dalam memproduksi produk pertanian yang bermutu sesuai dengan keinginan/permintaan pasar serta akses terhadap fasilitas berupa alat pengolah produk pertanian sederhana atau teknologi tepat guna bagi pengembangan industri pengolahan yang mereka kelola sehingga dapat memenuhi permintaan pasar.
- Menurunnya jumlah tenaga kerja perempuan tani yang berstatus sebagai pekerja lepasan di lingkungan perusahaan pertanian (milik negara atau swasta) dan memberi mereka status pekerja tetap.
- Tersusunnya peraturan yang memberikan kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan dengan jam kerja dan persyaratan kerja yang sama; memberikan kesetaraan dalam promosi karier di perusahaan serta memberi hak-hak atas kondisi bekerja, keselamatan, dan tunjangan kerja yang sama kepada pekerja laki-laki dan perempuan.
- Terselenggaranya suatu sistem informasi manajemen terpadu dalam hal informasi pertanian dan UKM pertanian (dalam arti luas) antara Departemen Pertanian, Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan PKM, Meneg. Koperasi dan UKM, dan Badan Pusat Statistik yang dapat memfasilitasi akses dan informasi pengembangan agribisnis yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki pengelola UKM.
- Dilaksanakannya sensus pertanian dan atau survei usaha rumah tangga dan kecil (pelaku bisnis pertanian) dengan data yang terpilah menurut jenis kelamin.

### 5.2.2. Pada Tingkat Kelembagaan Sosial-Ekonomi Pertanian

- Meningkatkan jumlah /rasio kelompok wanita tani/peternak/nelayan dan kelompok perempuan pengusaha bidang pertanian yang mengelola usahatani dan UKM mereka secara berkualitas dan produktif.
- Meningkatkan aksesibilitas kelompok tani/peternak/nelayan perempuan terhadap beragam sumberdaya pembangunan pertanian (kredit/ modal, informasi, penyuluhan dan pelatihan).
- Meningkatkan jumlah KUD yang melibatkan perempuan dan laki-laki selaku pengurus, manajer, pengawas, dan karyawan sehingga mereka responsif terhadap kepentingan KK dan anggota rumah tangga pertanian (tanaman pangan, peternak, nelayan, petani budidaya kayu-kayuan, dan perkebunan) perempuan dan laki-laki.
- Meningkatkan rasio petani perempuan dan laki-laki sebagai pengurus, manajer, dan karyawan dalam kelembagaan KUD yang terampil dalam proses pengambilan keputusan.
- Meningkatkan rasio petani perempuan dan laki-laki sebagai anggota aktif dalam kelembagaan KUD.
- Meningkatkan partisipasi perempuan tani sebagai anggota dan pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kelompok tani dewasa dan atau kelompok usaha serta dalam KUD secara proporsional.

### 5.2.3. Pemberdayaan Aparat Pertanian

- Meningkatkan rasio perempuan/laki-laki yang menduduki jabatan struktural (Eselon 1 dan 2) yang memahami dan mau melaksanakan *gender mainstreaming* dalam pembangunan pertanian.
- Meningkatkan jumlah bank yang memberikan fasilitas kredit dengan dilandasi kesetaraan dan keadilan gender.
- Terumuskannya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian.
- Meningkatkan profesional perempuan dan laki-laki (jabatan fungsional) di bidang pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang mampu mengembangkan IPTEK yang dapat meningkatkan produktivitas usaha rumah-tangga petani/pengusaha (skala kecil dan menengah).
- Meningkatkan jumlah peneliti, penyuluh dan atau pelatih yang mampu menyusun program/proyek pembangunan yang responsif gender dalam lingkup pembangunan pertanian, kehutanan dan perkebunan secara partisipatif (melibatkan seluruh *stakeholders*).

## BAB VI

### PENUTUP

Buku Analisis Gender dalam Pembangunan Pertanian ini merupakan suatu langkah awal dalam upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan pertanian, yang selama ini belum mendapat perhatian serius dari berbagai pihak termasuk para penentu kebijakan. Penerapan *Gender Analysis Pathway (GAP)* baik terhadap REPELITA VI maupun Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) Tahun 2002 ini berusaha memberikan gambaran kenyataan di lapangan mengenai masih adanya diskriminasi terhadap perempuan di perdesaan, yang diduga turut mempengaruhi rendahnya produktivitas pertanian (dalam arti luas) di tingkat rumah tangga pertanian. Hal tersebut tentunya akan mengganggu terhadap percepatan terwujudnya ketahanan pangan dalam keluarga pertanian, padahal mereka adalah sebagian besar penduduk Indonesia.

Seperti diketahui, selama ini perhatian pemerintah lebih banyak terfokus pada pekerja di sektor formal, yang tercermin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997, dan perhatian pada tenaga kerja di perdesaan, khususnya sektor pertanian belum banyak dilakukan. Namun demikian, Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang menyatakan bahwa hak untuk bekerja itu hak azasi manusia (Pasal 11 ayat 1 a) dan perempuan perdesaan berhak atas akses terhadap semua sumberdaya yang menentukan kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi (Pasal 14).

Dengan demikian, hasil rumusan Analisis Gender ini menjadi sangat penting untuk ditindaklanjuti, melalui suatu kesatuan tindak, yakni mulai dari melakukan reformulasi kebijakan pembangunan pertanian itu sendiri sampai kepada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan atau proyek di tingkat lapangan. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa pengarus-utamaan gender dalam pembangunan pertanian ini mengemban amanah untuk memberdayakan SDM pertanian, perempuan dan laki-laki, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender khususnya dalam pembangunan pertanian, yang diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan produktivitas pertanian secara berkesinambungan dan pada gilirannya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pertanian khususnya dan masyarakat perdesaan pada umumnya.

# LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Definisi Operasional Rumahtangga Pertanian
- Lampiran 2 Program Pokok Pembangunan Pertanian Dalam Repelita VI
- Lampiran 3 Program Penunjang Pembangunan Pertanian dalam Repelita VI
- Lampiran 4 Isu Kebijakan: Peningkatan Kesempatan Bekerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian
- Lampiran 5 Gender Responsive Policy Outlook and Action Plan Dalam Pengarusutamaan Jender Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian dan Perhutanan
- Lampiran 6 Tujuan, Sasaran Utama dan Kegiatan Pokok pada Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- Lampiran 7 Repeta 2002 Pembangunan Pertanian
- Lampiran 8 Rumahtangga Pertanian menurut Kategori Rumahtangga dan Jenis Kelamin
- Lampiran 9 Rumahtangga Perusahaan menurut Kategori Perusahaan dan Jenis Kelamin
- Lampiran 10 Pengentasan Kemiskinan
- Lampiran 11 Profil Jender dalam IPTEK
- Lampiran 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Lampiran 13 Daftar Nama Peserta Tim GAP Pembangunan Pertanian
- Lampiran 14 Daftar Nama Peserta Penyusunan Repeta 2002 Sektor Pertanian

## **Lampiran 1. Definisi Operasional Rumahtangga Pertanian**

### **1. Rumahtangga Pertanian**

Adalah rumahtangga yang sekurang-kurangnya satu anggota rumahtangganya melakukan kegiatan bertani atau berkebun, menanam tanaman kayu-kayuan, beternak ikan di kolam, karamba maupun tambak, menjadi nelayan, melakukan perburuan atau penangkapan satwa liar, mengusahakan ternak/unggas, atau berusaha dalam jasa pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual atau untuk memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri. (Sensus Pertanian, 1993)

### **2. Rumahtangga Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Adalah rumahtangga yang salah satu atau lebih anggota rumahtangganya mengusahakan tanaman pangan dan hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat-obatan) yang sudah berproduksi dan memenuhi batas minimal usaha (BMU). Contoh BMU untuk bawang merah sekitar 600 meter persegi, jeruk 25 pohon dan untuk pisang 40 rumpun. (Sensus Pertanian, 1993).

### **3. Rumahtangga Usaha Peternakan**

Adalah rumahtangga yang salah satu atau lebih anggota rumahtangganya melakukan pemeliharaan ternak/unggas dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri dengan jumlah ternak memenuhi BMU. Contoh untuk sapi 2 ekor, kambing 6 ekor, ayam ras petelur 12 ekor, dan sebagainya. (Sensus Pertanian, 1993).

### **4. Rumahtangga Usaha Budidaya Ikan**

Adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan pembenihan atau pembesaran ikan di laut, tambak, sawah, perairan umum dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri. (Sensus Pertanian, 1993).

### **5. Rumahtangga Usaha Perkebunan**

Adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengusahakan tanaman perkebunan dan memenuhi BMU. Khusus untuk tanaman tahunan, tanamannya harus sudah berproduksi.

Contoh BMU untuk karet 250 pohon, untuk teh 500 meter persegi, dan sebagainya. (Sensus Pertanian, 1993).

## **6. Rumahtangga Usaha Kehutanan Rakyat**

Adalah rumahtangga yang sekurang-kurangnya satu anggota rumahtangganya membudidayakan tanaman kayu-kayuan kehutanan dan atau melakukan pemungutan hasil hutan dan atau menangkap/ menangkap satwa liar dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri. (Sensus Pertanian, 1993).

Program Peningkatan Produksi Pangan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian	Program Pengembangan Ekspor Hasil Pertanian	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Pertanian
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian pangan per unit usaha tani melalui peningkatan kualitas dan luas areal intensifikasi pertanian pangan.</li> <li>2. Memperluas areal pertanian pangan antara lain hortikultura, jagung, kedelai, dan tebu melalui peningkatan usaha ekstensifikasi, terutama di kawasan Timur Indonesia dan daerah tertinggal di kawasan Barat Indonesia.</li> <li>3. Menerapkan harga dasar dan harga batas tertinggal, yang didukung oleh pengaturan sarana penyangga pangan yang efisien untuk komoditas pangan yang strategis.</li> <li>4. Meningkatkan nilai tukar pertanian, antara lain melalui peningkatan efisiensi sistem transportasi dan distribusi hasil pertanian.</li> <li>5. Meningkatkan penyediaan bibit unggul, sarana produksi lainnya seperti, pupuk, pakan ternak dan ikan, serta dana investasi.</li> <li>6. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi dan mencetak sawah di luar Jawa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong investasi di bidang agrobisnis dan agro-industri di perdesaan, dan meningkatkan penyediaan dana investasi untuk pengembangan usaha pertanian rakyat, KUD, usaha kecil, dan menengah.</li> <li>2. Meningkatkan keterampilan petani, perempuan, dan pemuda tani melalui pelatihan di bidang teknis, manajemen usaha tani, dan kemampuan kewirausahaan.</li> <li>3. Menerapkan teknologi tepat dalam usaha pertanian untuk merehabilitasi lahan kritis, tanah terlantar dan sumber daya lain yang belum dimanfaatkan</li> <li>4. Menerapkan sistem perlindungan tenaga kerja, termasuk penerapan upah minimum</li> <li>5. Mengalokasikan sumber daya dari kegiatan ekonomi yang produktivitasnya rendah ke</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis komoditas pertanian yang mempunyai potensi dan peluang pasar di pasar internasional.</li> <li>2. Meningkatkan daya saing komoditas pertanian dan hasil olahannya melalui peningkatan efisiensi sistem produksi, termasuk peningkatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan lembaga pemasaran, seperti koperasi di perdesaan/ KUD dan asosiasi eksportir serta usaha kecil dan menengah di bidang pemasaran.</li> <li>4. Memperluas pasar ekspor hasil pertanian dan hasil olahannya melalui promosi dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peranan koperasi yang telah ada di perdesaan/KUD dalam rangka mengembangkan agrobisnis dan agroindustri di perdesaan.</li> <li>2. Membina petani untuk menjadi anggota koperasi di perdesaan/KUD, meningkatkan keterkaitan usaha petani dengan KUD dan meningkatkan semangat kemitraan KUD dengan BUMN dan badan usaha milik swasta secara efisien dan saling menguntungkan.</li> <li>3. Mengembangkan kelembagaan keuangan di perdesaan untuk mendukung usaha tani dan sistem agrobisnis dan agroindustri secara keseluruhan.</li> <li>4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang manajemen usaha bagi usaha tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi perluasan wilayah usaha pertanian untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik sumber daya, keinginan masyarakat, kebutuhan prasarana dan peluang pasar.</li> <li>2. Memperluas areal produksi pertanian, antara lain tanaman perkebunan, tanaman hias yang mempunyai potensi pasar cukup tinggi, baik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.</li> <li>3. Meningkatkan usaha diversifikasi secara horizontal melalui pemanfaatan sumber daya yang beraneka ragam dan diversifikasi vertikal melalui pengembangan berbagai hasil olahan pertanian.</li> </ol>

Program Peningkatan Produksi Pangan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian	Program Pengembangan Ekspor Hasil Pertanian	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Pertanian
<p>7. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian di perdesaan, seperti irigasi untuk tambak, padang penggembalaan ternak, sawah dan sistem drainase rawa dan pasang surut, serta memanfaatkan dan mengembangkan pelabuhan perikanan</p> <p>8. Mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian dalam usaha tani, pengangkutan, pengolahan, dan penyimpanan hasil pertanian</p> <p>9. Mengembangkan pengendalian hama dan penyakit secara biologis untuk mencegah terjadinya ledakan hama penyakit dengan meningkatkan peran serta petani dalam memanfaatkan teknologi pengendalian hama penyakit yang berwawasan lingkungan.</p> <p>10. Meningkatkan pemanfaatan teknologi konservasi, seperti sistem budi daya lorong untuk mempertahankan atau meningkatkan produktivitas lahan pertanian.</p>	<p>kegiatan ekonomi yang produktivitasnya tinggi</p> <p>6. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan barang modal antardaerah melalui pengembangan prasarana perhubungan dan transportasi yang efisien.</p> <p>7. Menciptakan kesempatan kerja melalui perluasan areal pertanian, terutama di kawasan Timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya di kawasan Barat Indonesia</p> <p>8. Meningkatkan penyediaan informasi mengenai kualitas dan jumlah tenaga kerja pertanian serta informasi tentang kesempatan kerja</p>	<p>pengembangan akses pasar</p> <p>5. Mengembangkan sarana dan prasarana ekspor, antara lain pelabuhan</p> <p>6. Mencegah penggunaan bahan kimia dan mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan</p> <p>7. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional di bidang perdagangan hasil pertanian</p>	<p>dalam bidang pertanian, serta koperasi di perdesaan/ KUD</p> <p>5. Mengembangkan sistem informasi produksi, harga dan pasar hasil pertanian</p> <p>6. Menyusun sistem pengendalian dan pencegahan dini timbulnya kerawanan dalam penyediaan pangan</p> <p>7. Menata dan menyempurnakan peraturan perundangan untuk mendorong investasi di bidang pertanian</p> <p>8. Mendorong penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup dan masyarakatnya, serta meningkatkan peran serta masyarakat</p> <p>9. Menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)</p>	<p>4. Mengkonversikan tanaman pertanian yang telah mengalami kelebihan produksi dengan tanaman yang mempunyai potensi pasar tinggi.</p> <p>5. Menggali dan mengembangkan komoditas hasil laut yang mempunyai potensi pasar tinggi seperti rumput laut dan ikan kerapu</p> <p>6. Meningkatkan usaha peternakan unggas, perikanan tambak, ikan hias dan perikanan laut melalui pengembangan sistem agrobisnis.</p> <p>7. Meningkatkan dan memperluas usaha intensifikasi bagi pertanian rakyat terutama untuk memperluas hasil pertanian yang mempunyai potensi pasar dan nilai komersial yang tinggi.</p>

Program Peningkatan Produksi Pangan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian	Program Pengembangan Ekspor Hasil Pertanian	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Pertanian
<p>11. Meningkatkan pengendalian pencemaran air irigasi, sungai dan danau, perairan umum dan laut, antara lain melalui pengendalian polusi air dari limbah industri dan limbah rumah tangga</p> <p>12. Meningkatkan peranan usaha peternakan rakyat dan menengah untuk meningkatkan produksi telur, susu, dan daging.</p> <p>13. Meningkatkan produksi perikanan air tawar, air payau, dan perairan umum serta perairan lepas pantai, termasuk menggali sumber pangan baru dari sumber hayati laut seperti lumpur laut.</p> <p>14. Menggali dan memanfaatkan sumber pangan yang terdapat di dalam kawasan hutan serta mengembangkan hutan pangan baru seperti hutan sukun.</p>				

### Lampiran 3. Kegiatan yang Dilaksanakan melalui Program Penunjang Pembangunan Pertanian Dalam Repelita VI

Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pertanian	Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Program Pengembangan Transmigrasi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan pegawai pertanian melalui pendidikan dan pelatihan penjenjangan, program diploma, dan pascasarjana.</li> <li>2. Mengembangkan kemampuan perencanaan pembangunan pertanian, terutama perencanaan di daerah di kawasan Timur Indonesia, dan daerah tertinggal di kawasan Barat Indonesia</li> <li>3. Meningkatkan kualitas petugas pembina pembangunan pertanian, terutama di lokasi unit pelayanan dan pengembangan serta lokasi perusahaan inti rakyat</li> <li>4. Membina dan meningkatkan kemampuan sekolah pertanian pembangunan yang telah ada</li> <li>5. Membangun sekolah pertanian pembangunan, terutama di kawasan Timur Indonesia</li> <li>6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani melalui pelatihan dan penyuluhan di bidang pengelolaan usaha tani berorientasi pasar, penguasaan dan penerapan teknologi</li> <li>7. Meningkatkan kemampuan perempuan dan pemuda dalam penguasaan dan penerapan teknologi produksi dan pemasaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan jenis atau varietas unggul tanaman pangan dan hortikultura, ternak, dan ikan melalui penerapan bioteknologi dan teknik pemuliaan lainnya</li> <li>2. Mengembangkan alat dan mesin pertanian serta teknologi pengolahan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian</li> <li>3. Mengembangkan teknologi pertanian sesuai dengan kondisi sumberdaya alam dan kebutuhan petani terutama di kawasan Timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya di kawasan Barat Indonesia</li> <li>4. Meningkatkan identifikasi potensi sumber daya alam dan agroklimat dalam rangka pengembangan pertanian terutama di kawasan Timur Indonesia dan di daerah tertinggal lainnya</li> <li>5. Meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati melalui pengembangan dan pemanfaatan bak plasma nutfah</li> <li>6. Mengembangkan penelitian sosial ekonomi pertanian, termasuk aspek kelembagaan dan kebijaksanaan, antara lain untuk merumuskan rencana pembangunan pertanian jangka panjang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan investasi di bidang usaha pertanian, yang dikaitkan dengan pengembangan kesempatan kerja bagi transmigran dan masyarakat sekitarnya, antara lain melalui pengembangan perusahaan inti rakyat</li> <li>2. Mengembangkan unit pelayanan dan pengembangan pertanian di daerah pemukiman transmigrasi</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan transmigran dalam mengelola usaha pertanian secara komersial</li> <li>4. Mengembangkan agroindustri dan agrobisnis di daerah transmigrasi melalui pengembangan koperasi</li> <li>5. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian tepat termasuk penerapan alat dan mesin pertanian di daerah transmigrasi</li> <li>6. Mengembangkan keterpaduan antara usaha pertanian di daerah transmigrasi dengan usaha pertanian di daerah sekitarnya.</li> </ol>

#### Lampiran 4.

### A. ANALISIS KEBIJAKAN : PENINGKATAN KESEMPATAN BEKERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PERTANIAN

#### 1.1. Sumberdaya Rumah tangga Pertanian

##### 1.1.1. Sumberdaya Rumah tangga Petani Pangan, Hortikultur, dan Peternakan

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
<p>Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian yang Mandiri</p>	<p>Terdapat 21,74 juta rumah tangga pertanian di Indonesia (RPI).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rmt Padi &amp; Palawija = 18,09 juta (83,24 % dari total RPI*); tapi tidak ada data menurut jenis kelamin</li> <li>Total Rmt Usaha Hortikultura 5,47 juta, juga tidak ada data menurut jenis kelamin, diduga ada 10% Perempuan Kepala Rumah tangga/WKRT</li> <li>Total Rmt Usaha Peternakan 5,68 juta rmt (26,15 % dari RPI), terdapat 7 % WKRT</li> </ul>	<p><b>AKSES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar SDM laki-laki dan perempuan menjadi anggota rumah tangga pertanian (laki-laki dan perempuan) secara tradisional, antara lain karena mewarisi sumberdaya lahan pertanian, namun akses perempuan lebih rendah dari laki-laki.</li> <li>Hasil analisis Struktur Ongkos Usahatani Hortikultura menunjukkan adanya 92,69 % petani laki-laki yang memiliki lahan, sisanya (7,32 %) perempuan. Dari jumlah tersebut, menurut luas usaha taninya, petani laki-laki yang menguasai lahan di atas 0,5 Ha sebanyak 48,15%; sementara pada perempuan hanya 3,07 %.</li> <li>Petani perempuan yang berpendidikan tamat SD dan di atas SLTP jauh lebih rendah (44 %) dibanding petani laki-laki (67%). Demikian pula halnya akses perempuan terhadap IPTEK, pelatihan, dan penyuluhan lebih rendah daripada laki-laki. Dalam hal penyuluhan, 81% perempuan tidak mendapat penyuluhan, sementara laki-laki 70 % (BPS, 1999).</li> <li>Namun demikian, dalam usahatani tanaman pangan, petani perempuan lebih efisien dalam mengelola usahatani dibandingkan petani laki-laki, terbukti penerimaan keuntungan petani perempuan sebesar Rp. 3 263 894,-/Ha; sementara petani laki-laki hanya Rp. 2 894 619,-/Ha.</li> </ul> <p><b>PARTISIPASI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TPAK Perempuan di sektor pertanian dan perhutanan cenderung sedikit meningkat; yakni dari 39,65 % (1996) menjadi 39,36 % (1997) dan menjadi 40,17 % (1998);</li> </ul>

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
		<p>40,17 % (1998); sebaliknya TPAK laki-laki; yakni dari 60,35 % (1996) menjadi 60,64 % (1997) dan pada tahun 1998 sebesar 59,83 % (Hatmadji, dkk., 1999). Di desa perempuan umumnya bekerja 29 jam per minggu, sementara laki-laki 37 jam per minggu (BPS, 1997); Studi kasus petani sawah menunjukkan bahwa jam kerja perempuan antara 10-34 jam/minggu, sementara laki-laki 35-49 jam/minggu (Rachman, dkk, 1996). Dalam proses produksi padi sawah, curahan waktu TDK : Perempuan 29,6 % dan laki-laki 32,1 % ; sementara TLKnya, 27 % Perempuan dan 11,3 % laki-laki. Adapun pada lahan kering (miring), untuk TDK : kontribusinya Perempuan 33,2 %; laki-laki 47 % dan untuk TLK : 11 % perempuan dan 8 % laki-laki (Mugniesyah et.al., 1999).</p> <p><b>KONTROL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menurut status bekerjanya (indikator kontrol) sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga ; sementara laki-laki sebagai berusaha / berwiraswasta baik dengan bantuan buruh, pekerja keluarga maupun, tidak. Data 1997 menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan bekerja, 37 pekerja keluarga, 31 berwiraswasta, dan 30 buruh/pegawai; sementara dari 100 orang laki-laki hanya terdapat 9 pekerja keluarga, 52 berwiraswasta, dan 38 buruh. Umum dijumpai bahwa kontrol perempuan terhadap sumberdaya (informasi, IPTEK, modal, aset produksi, penyuluhan dan pelatihan jauh lebih rendah dibanding laki-laki (Mugniesyah dkk, 1998 dan 1999).</li> </ul> <p><b>MANFAAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil analisis Struktur Ongkos Usahatan Padi &amp; Palawija (SOUP) menunjukkan bahwa perempuan tani menikmati hasil produksi usahatani, namun cenderung lebih subsisten dibanding petani laki-laki. Persentasi perempuan yang hasil panennya hanya untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 13,16 %</li> </ul>

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
		<p>sementara laki-laki sebesar 8,15 % saja. Mereka yang menyimpan dan menjual hasil panen pada laki-laki 19,4 % sementara perempuan 18,42 % dan bagi mereka yang mengkonsumsi sekaligus menjual terdapat 72,42 % pada laki-laki dan hanya 68,42 % pada perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena perempuan jauh lebih rendah dalam hal akses terhadap lahan, modal/kredit, penyuluhan dan pelatihan maka manfaat yang mereka dapat juga rendah, kecuali untuk sebagian kecil dari mereka yang akses terhadap program P4K dan DPG. Hal ini dimungkinkan karena selama ini semua pendekatan pembangunan pertanian bersifat top down dan bias laki-laki.</li> <li>• Dalam hal upah hasil SOUP menunjukkan bahwa upah buruh per orang per hari untuk laki-laki Rp.7.488,- dan untuk perempuan Rp. 6.316 ,-. Diduga belum memperhitungkan nilai makanan dan rokok yang dominan diberikan pada laki-laki dan tidak kepada buruh perempuan .</li> </ul> <p><u>Kasus di Jawa Barat</u>, Upah /bulan di perdesaan : P= Rp. 81.585,- dan L = Rp. 136.557. Di perkotaan upah P = Rp. 142.221, L = Rp. 219.442 (Lukito dkk, 1995). Di desa lahan kering upah per hari : sebelum krisis P= Rp. 2500 ,- dan L= Rp. 3500 (+ rokok senilai Rp.1000) setelah krisis P = Rp.3500,- dan L = Rp. 6000,- (Mugniesyah,dkk., 1999) <u>Kasus Jawa Tengah</u>, Upah L = Rp. 5000,- dan P = Rp. 3000 (sebelum krisis) , dan sesudah Krisis L = Rp. 8000 – 12.000 dan L = Rp. 5000 – 8000. Adapun di <u>Lampung</u>, Upah L = Rp.8000 - 10.000 dan P = Rp. 6000 – 7000 (Hatmadji, dkk;1999).</p>

### 1.1.2. Sumberdaya Rumahtangga Pertanian : Sub-sektor Usaha Perikanan (Nelayan)

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
1. Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja pertanian yang mandiri.	<p>Rumahtangga Penangkapan Ikan sebanyak 580.658 rumahtangga dengan anggota rumahtangga sebanyak 2,86 juta rumahtangga.</p> <p><u>Rumahtangga Usaha Perikanan</u></p> <p>a. U.P. Ikan laut</p> <p>Total : 0,66 juta rumahtangga dari RPI</p> <p>Nelayan Pengusaha : L = 94,34 % P = 5,66 %</p> <p>Nelayan buruh : 55 045 rmt</p> <p>L : 87,2% ; P :12,8%</p> <p>b. U.P. ikan di perairan umum</p> <p>Total : 0,39 juta rumahtangga (1,78% dari RPI)</p> <p>Nelayan Pengusaha : L= 94,34% ; P = 5,66%</p> <p><u>Usaha Budidaya Ikan</u></p> <p>a. Usaha budidaya ikan di kolam/sawah</p> <p>Total : 0,796 juta rumahtangga (4,35 % dari RPI)</p> <p>Nelayan Pengusaha: L = 90,18 % ; P = 9,82 %</p> <p>b. Usaha budidaya ikan di tambak/air payau. Total : 0,95 juta rumahtangga (4,35 % dari RPI)</p> <p>Nelayan Pengusaha: L = 91,53 % P = 8,47 %</p>	<p><b>AKSES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya sumberdaya kelautan dan pesisir memungkinkan masyarakat disekitarnya memanfaatkan sumberdaya alam kelautan, tambak dan perairan umum sebagai sumber nafkah/pendapatan. Sekalipun perempuan memiliki akses dalam hal budi daya produksi, penangkapan, dan juga pasca panen sekunder (pengolahan hasil panen/tangkapan), namun adanya anggapan bahwa laut itu "keras", maka banyak hasil penelitian mengemukakan bahwa pekerjaan penangkapan ikan di laut hampir sepenuhnya dilakukan laki-laki, kecuali penangkapan ikan kecil yang nilai jualnya rendah.</li> <li>Diamond, dkk. (1998) dari hasil diskusi kelompok dengan nelayan laki-laki dan perempuan di Desa Tumbak, Sulawesi Utara memperoleh informasi bahwa di desa tersebut sedikitnya ada 30 persen perempuan di atas 17 atau 18 tahun yang pergi melaut melakukan penangkapan ikan. Perempuan memiliki akses dalam kegiatan perdagangan ikan hasil tangkapan (tibo-tibo) dan pengolahan ikan berskala kecil/rumahtangga. Mubyarto dkk. mengemukakan bahwa perempuan nelayan di Jepara terpaksa menjadi <i>rebyek</i> terhadap ikan hasil tangkapan nelayan migran di tengah laut, sebelum para nelayan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI); karena jika tidak mereka kalah bersaing dengan pedagang laki-laki bermodal besar.</li> </ul> <p>Dewasa ini dengan meningkatnya kecelakaan nelayan kecil (pandega, awak kapal) akibat penggunaan bom dalam penangkapan ikan, banyak janda / perempuan nelayan yang harus menjadi kepala rumahtangga ; pada hal akses mereka terhadap kredit sangat rendah (Peribadi, 2000).</p> <p><b>PARTISIPASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi perempuan dan laki-laki sangat ditentukan oleh sumberdaya rumahtangganya, bisa sebagai nelayan, manajer (usaha pengolahan), pekerja</li> </ul>

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
		<p>keluarga dan buruh pada nelayan kaya atau pendega serta buruh perusahaan pengolahan (ikan asin atau lainnya). Pada kasus penyelenggaraan Proyek Pesisir dan Lautan di Sulawesi Utara, sekalipun terdapat 2 perempuan petugas penyuluh lapangan, namun subyek nelayan di dominasi laki-laki; perempuan nelayan yang menjadi anggota kelompok sangat rendah (Saruan, 2000). Hasil studi menunjukkan bahwa perempuan pada keluarga nelayan penangkapan ikan dominan sebagai pekerja keluarga, sementara pada usaha pasca panen termasuk pedagang ikan/hasil olahan ikan mereka dominan berstatus usaha sendiri tanpa atau dengan bantuan pekerja keluarga yang berusaha dengan skala kecil bahkan mikro.</p> <p><b>KONTROL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelayan dan pengusaha perempuan kurang memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya seperti perahu dengan daya jelajah luas serta pada alat penangkap ikan yang modern. Kredit motor perahu lebih banyak di akses oleh nelayan laki-laki. Sebagian kecil pengusaha perempuan yang memiliki akses pada kredit bank harus mendapat izin suami bahkan harus menggunakan nama suaminya untuk akses kredit (van Velzen, 1994; Grijns, 1994).</li> <li>• Tidak semua perempuan pada komunitas nelayan dan pesisir memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam. Di Sulawesi Utara, hanya sedikit perempuan yang memiliki kontrol terhadap pengelolaan hutan mangrove (Diamond et al, 1998)</li> </ul> <p><b>MANFAAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Training, kredit dan informasi lebih banyak diakses oleh laki-laki. Kecuali para juragan atau punggawa, pendapatan yang diperoleh nelayan kecil sangat rendah. Demikian pula pendapatan para pedagang ikan perempuan, karena skala usahanya kecil maka pendapatannya juga kecil.</li> </ul>

### 1.1.3. Sumberdaya Rumahtangga Kehutanan dan Perkebunan

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja pertanian yang mandiri.	<p>Terdapat 21,74 juta rumahtangga pertanian di Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rumahtangga Usaha Perkebunan Total : 6,38 juta rmt (29,33 % dari RPI*) L= 80,32% P = 19,68%</li> <li>Berdasar komoditinya,               <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekebun karet sebanyak 975.8 ribu orang, hanya 12,87 % diantaranya pekebun perempuan</li> </ul> </li> <li>Terdapat 861 rumahtangga budidaya kayu-kayuan kehutanan, terdiri atas 3 990 726 anggota rumahtangga, 49 persen diantaranya anggota rumahtangga perempuan.</li> <li>Terdapat sekitar 107 361 KK peladang berpindah dan perambah hutan (resettlement) dan 96 249 KK nonresettlement, namun tidak ada data menurut jenis kelamin.</li> </ol>	<p><b>AKSES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secara tradisional, masyarakat petani di daerah lahan kering yang mengembangkan hutan kemasyarakatan dan atau tinggal di sekitar wilayah perhutanan negara, mempunyai akses untuk mengembangkan budidaya tanaman kayu-kayuan perhutanan. Sebagaimana masyarakat "peasant" pada umumnya, mereka yang berperan dalam pengelolaan kebun dan hutan mencakup anggota rumahtangga laki-laki dan perempuan, namun yang diakui sebagai penghutan/pesanggem adalah KK (laki-laki). Itu sebabnya anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) semuanya laki-laki.</li> </ul> <p><b>PARTISIPASI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berbeda dari komunitas padi sawah, perempuan pada rumahtangga pekebun dan perhutanan dan peladang berpindah, seperti halnya laki-laki terlibat pada semua aktivitas budidaya tanaman kayu-kayuan dan pertanian/perkebunan lahan kering, dari persiapan hingga pasca panen (Kartasubrata, dkk., 1995 dan Mugniesyah, dkk. 1998). Dalam hal program Perhutanan sosial dan PMDHT serta Hutan Kemasyarakatan (HKM) hanya KK laki-laki yang menjadi kelompok sasaran, kecuali Perhutanan sosial yang khusus melibatkan partisipasi perempuan (<i>action resesarch</i>), itupun hanya terbatas pada perempuan kader. Perempuan hanya berpartisipasi dalam program khusus (P2W), tidak dalam program utama atau masih dalam koridor WID. Partisipasi dalam pelatihan : 540 orang perempuan kader ikut pelatihan yang terdistribusi dalam pelatihan sutra alam (155 orang), lebah madu (110 orang), tanaman obat-obatan dan rumput laut, masing-masing 30 orang.</li> </ul>

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
		<p><b>KONTROL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat sedikit KK perempuan yang memperoleh akses terhadap program PS, PMDHT, dan HKM, sehingga menjadikan kontrol mereka terhadap program pemerintah juga hampir tidak ada. Pada kasus program Perhutanan Sosial (PS) sebagian besar perempuan adalah pekerja keluarga, sehingga mereka tidak memiliki kontrol secara langsung .</li> <li>• Dewasa ini kredit dana bantuan HKM (melalui Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah disalurkan langsung kepada kelompok petani (laki-laki), dengan demikian KK perempuan pekebun tidak dapat melakukan kontrol terhadap dana tersebut. Sebagai contoh, hanya sebagian kecil kader perempuan yang berhasil mengembangkan usaha peternakan lebah madu (Kasus di Tasikmalaya) dan budidaya rumput laut yang sekaligus memiliki kontrol terhadap usaha dan pemasarannya. Pada kasus usaha bersama, hanya ketua kelompok yang memiliki kontrol terhadap proses usaha bersama.</li> </ul> <p><b>MANFAAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya perempuan sebagai anggota rumah tangga peserta Program Perhutanan Sosial, PMDHT, HKM, dan program P2W yang memperoleh manfaat berupa stimulan untuk kegiatan peningkatan pendapatan dan kredit. Terdapat kasus dimana Program PS yang melaksanakan program P2W (pengolahan pisang dan pembuatan gula semut) hanya melibatkan laki-laki, padahal kegiatan tersebut merupakan pekerjaan perempuan (Mugniesyah, dkk., 1998 dan 1999). Dengan demikian manfaat usaha lebih banyak dinikmati oleh ketua/pengurus kelompok dibanding anggotanya .</li> </ul>

### 1.1. Sumberdaya Rumahtangga Pertanian (lanjutan)

MASALAH GENDER	TUJUAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER	INDIKATOR GENDER
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budaya patriarkhi berakibat pada status perempuan dalam rumahtangga pertanian dianggap hanya sebagai pekerja keluarga tanpa upah. Pada hal kenyataan menunjukkan sekitar 10 % rumahtangga pertanian dikepalai perempuan.</li> <li>• Karena banyak program pembangunan yang bias laki-laki, menyebabkan rendahnya akses perempuan terhadap aset produksi (lahan usahatani/kebun/hutan, ternak, perahu motor, alat penangkapan ikan modern), kredit bagi pembelian input produksi maupun pengembangan usaha tani, serta penyuluhan dan pelatihan IPTEK pertanian sangat bias laki-laki.</li> <li>• Sekalipun belum dibuktikan secara empiris, stereotipe bahwa laki-laki pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pekerja sambilan membawa pada anggapan bahwa produktivitas perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Ini berakibat pada lebih rendahnya upah perempuan dibanding laki-laki.</li> <li>• Nilai upah berbentuk makanan (di luar upah resmi) bagi perempuan kualitasnya juga lebih rendah dari laki-laki, sementara itu buruh laki-laki juga memperoleh rokok. Hal ini bertambah buruk lagi manakala perempuan berasal dari lapisan miskin di perdesaan, yang karena posisi tawar mereka terhadap petani pemilik/penyewa rendah, menyebabkan perempuan menerima berburuh dengan upah lebih rendah lagi. Bahkan, pada kasus-kasus tertentu, perempuan tidak memperoleh upah atas pekerjaannya membantu majikan suaminya, karena mereka menjadi jaminan bagi peluang bekerja suaminya.</li> <li>• Selama ini lebih rendahnya akses perempuan daripada laki-laki terhadap lahan pertanian/aset produksi pada keluarga petani yang mayoritas beragama Islam dimungkinkan karena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi penyadaran gender untuk membangun persepsi bahwa KK rumahtangga petani haruslah <i>de facto</i>, artinya keluarga/ rumah tangga bisa dikepalai perempuan.</li> <li>• Menyusun suatu kebijakan, peraturan-peraturan di setiap sektor/departemen, yang secara eksplisit menyatakan bahwa sasaran atau subyek pembangunan mereka adalah semua anggota keluarga petani/peternak/nelayan /pekebun/pesanggem.</li> <li>• Menyusun suatu kebijakan dan program yang secara eksplisit memberi kesempatan kepada perempuan untuk akses terhadap beragam sumberdaya, baik lahan usahatani, kredit, penyuluhan dan pelatihan yang berkenaan dengan IPTEK serta kelembagaan sosial ekonomi.</li> <li>• Melaksanakan penyuluhan penyadaran gender bagi semua kalangan : petani, petugas penyuluh (laki-laki dan perempuan), dengan dukungan fakta bahwa perempuan mempunyai tanggung-jawab yang sama dengan laki-laki dalam mengelola usahatani, sehingga tidak ada perbedaan upah.</li> <li>• Menyebarluaskan (diseminasi) pelembagaan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya pasal 11 dan pasal 14 disertai dengan dirumuskannya Undang-undang Ketenagakerjaan untuk sektor pertanian dan informal lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang menyadari fakta bahwa KK dan pekerja rumahtangga pertanian terdiri atas laki-laki dan perempuan serta tersedianya data statistik yang akurat mengenai status KK dan anggota rumahtangga pertanian menurut jenis kelamin serta akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya pertanian.</li> <li>• Terwujudnya kesamaan persepsi diantara <i>stakeholders</i> (warga masyarakat petani, petugas penyuluh, petugas sensus pertanian, peneliti, bahwa subyek mereka terdiri atas laki-laki dan perempuan tani.</li> <li>• Dilaksanakannya <i>Affirmative action</i> untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan terhadap aset produksi berupa lahan usaha-tani, tambak, kebun, perahu/kapal penangkap ikan, ternak dan input produksi, kredit serta peluang training dan penyuluhan.</li> <li>• Meningkatnya frekuensi diseminasi UU RI No 7/1984 serta dirumuskannya perlindungan hukum terhadap pekerja pertanian dalam UU Ketenagakerjaan</li> </ul>

MASALAH GENDER	TUJUAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER	INDIKATOR GENDER
<p>selama ini disribusi/alokasi harta dalam rumahtangga pertanian cenderung dominan melalui sistim pewarisan, belum banyak melalui pelebagaan "hibah" yang mengalokasikan harta yang setara antara laki-laki dan perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengingat pekerjaan yang melibatkan keluarga pertanian (dalam arti luas) dianggap sektor informal, maka hingga kini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur hak-hak dan kewajiban tenaga kerja pertanian. Di lain pihak, UU RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya pasal 11 dan pasal 14 belum tersosialisasikan.</li> <li>• Lebih rendahnya tingkat pendidikan anggota rumahtangga pertanian perempuan daripada laki-laki menyebabkan lebih rendahnya akses perempuan terhadap pekerjaan di sektor formal dan atau di sektor informal yang memungkinkan mereka memperoleh upah yang pantas/tinggi dan fasilitas kredit dari pemerintah.</li> <li>• Khusus pada masyarakat nelayan, nilai budaya gender dan struktur patriarkhi di satu pihak serta desakan kebutuhan ekonomi di lain pihak berakibat pada meningkatnya perempuan sebagai pekerja seks. Bahkan, mereka menjadi daya tarik bagi nelayan migran untuk memasarkan ikannya di TPI, hampir di seluruh pantai Utara Jawa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbanyak penyuluhan akan pentingnya opsi hibah yang adil/setara kepada anak laki-laki dan perempuan oleh para pemuka agama Islam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jumlah penyuluh agama yang menyadarkan para petani (orangtua) untuk memilih opsi hibah dalam mengalokasikan lahan usahatani serta meningkatnya jumlah rumah-tangga pertanian yang memilih opsi hibah yang adil/setara dalam mengalokasikan lahan usaha-tani pada anak perempuan dan laki-laki mereka.</li> </ul>

## 1.2. Pekerja di Lingkungan Perusahaan Pertanian

### 1.2.1. Pekerja di Perusahaan Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
1. Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja pertanian.	<p>Pada perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanaman Pangan dan Hortikultura : Total = 5.902 orang ; L= 75,1% ; P= 24,9 %</li> <li>• Sapi Perah Total = 28,587 orang, tidak ada data menurut jenis kelamin</li> <li>• Rumah Potong Hewan Total = 5.074 orang, tidak ada data menurut jenis kelamin</li> <li>• Penangkapan Ikan Total = 11.714 orang, L = 88,3 % ; P = 11,7 %</li> <li>• Budidaya Perikanan Total = 13.620 orang, tidak ada data menurut jenis kelamin.</li> <li>• Pelabuhan Perikanan Total = 2.602 orang, tidak ada data menurut jenis kelamin</li> </ul>	<p><b>AKSES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses perempuan untuk bekerja di perusahaan pertanian cenderung lebih rendah dan sangat tergantung pada kebijakan perusahaan, yang cenderung sering mendahulukan laki-laki.</li> </ul> <p><b>PARTISIPASI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kasus ada tenaga kerja perempuan dipekerjakan, maka sepanjang di sektor formal, maka jam kerja TK perempuan diduga sama dengan jam kerja TK laki-laki. Namun demikian, sesuai dengan status bekerjanya, maka akan ada variasi jam kerja. Diduga, perempuan yang berstatus pekerja borongan atau harian lepas bekerja cukup lama, tergantung musim dan jenis pekerjaan.</li> </ul> <p><b>KONTROL :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kasus perusahaan TPH, sebagian besar perempuan dipekerjakan pada tingkatan pekerjaan yang terendah, yakni sebagai buruh/karyawan; dan pada banyak kasus hanya sebagai pekerja harian lepas atau borongan. Bahkan pada SP 1993 dilaporkan bahwa pada perusahaan ternak besar dan kecil masih ditemui status pekerja tidak dibayar (12 % dari 4 936 orang pekerja).</li> <li>• Pada perusahaan penangkapan ikan dinyatakan bahwa TK laki-laki sebagian besar dipekerjakan di laut, sementara perempuan bekerja sebagai pekerja pada perusahaan pengemasan (<i>cold storage</i>). Dalam perusahaan budidaya perikanan terdapat dua kategori pekerja, yakni pada Pelabuhan Perikanan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan perempuan umumnya dipekerjakan sebagai tenaga administrasi.</li> </ul> <p><b>MANFAAT :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena perempuan dominan pada tingkatan pekerjaan yang terendah, maka upah yang diterima perempuan cenderung lebih rendah, terlebih mereka yang berstatus harian lepas atau tenaga borongan, praktis mereka tidak memperoleh tunjangan kesehatan, dan hari-hari besar (Hari Raya), serta hak-hak lainnya sebagai mana yang diterima pekerja tetap.</li> </ul>

### 1.2.2. Pekerja di Perusahaan Perkebunan dan Perhutanan

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
<p>1. Meningkatkan kesempatan kerja bagi sumberdaya manusia Pertanian.</p>	<p>Pekerja Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Perkebunan Total = 388.180 orang, L= 76,68 % ; P= 23,32 %</li> <li>• Perusahaan Kehutanan (HPH) Total = 137.463 orang, L = 81,1 % ; P = 18,7 %</li> <li>• Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Total = 2.957 orang, L = 70,75 % ; P = 29,25 %</li> <li>• Penangkaran Satwa Liar dan Wisata Alam (SLNA) Total : 14.596 orang</li> </ul> <p><i>Pekerja Tetap :</i> Total = 8.398 orang, L= 89,6% ; P = 10,4%</p> <p><i>Pekerja harian lepas :</i> Total = 6.198 orang, (tidak ada data menurut jenis kelamin).</p>	<p>AKSES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seperti halnya di sektor pertanian, akses perempuan untuk bekerja di perusahaan pertanian cenderung lebih rendah dan sangat tergantung kebijakan perusahaan.</li> </ul> <p>PARTISIPASI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena bekerja di sektor formal, maka jam kerja TK perempuan diduga sama dengan TK laki-laki, yaitu sekitar 40 jam per minggu. Namun demikian, sesuai dengan status bekerjanya, maka akan ada variasi jam kerja. Diduga, perempuan yang berstatus pekerja borongan atau harian lepas bekerja cukup lama, tergantung musim dan jenis pekerjaan.</li> </ul> <p>KONTROL :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada perusahaan perkebunan, pekerja tetap perempuan sebagian besar menjadi pekerja kebun untuk pekerjaan dengan upah terendah, karena pendidikan mereka sebagian besar SD/tidaktamat SD, atau sebagai tenaga administrasi untuk mereka yang berpendidikan tinggi (SLTA dan PT). Pada perusahaan HPH sekalipun secara proporsional terdapat kesamaan latar belakang pendidikan antara pekerja laki-laki dan perempuan, namun perempuan cenderung bekerja sebagai karyawan administrasi dan pengolahan kayu, dengan status buruh/karyawan. Pada perusahaan HTI, terdapat status pekerja harian lepas/tidak tetap, dinyatakan bahwa kebutuhannya sekitar 5.360.946 HOK, hampir 50 % untuk penyiapan lahan, 22,67 % untuk penanaman, 20,75% untuk penyiangan, dan selebihnya pemupukan dan pengendalian gulma. Hampir dipastikan bahwa perempuan mendominasi pada penanaman dan penyiangan.</li> </ul> <p>MANFAAT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena perempuan dominan pada tingkatan kerja yang terendah, maka upah yang diterima perempuan cenderung lebih rendah, terlebih mereka yang berstatus harian lepas atau tenaga borongan, praktis mereka tidak memperoleh tunjangan kesehatan dan hari-hari besar (Hari Raya), serta tidak memperoleh hak-hak lainnya sebagai mana yang diterima pekerja tetap.</li> </ul>

## 1.2. Pekerja di Lingkungan Perusahaan Pertanian (lanjutan)

MASALAH GENDER	TUJUAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER	INDIKATOR GENDER
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stereotipe atas pembagian kerja yang masih kuat serta pandangan bahwa bekerja dekat dengan alam (kehutanan, perkebunan dan kelautan) membutuhkan fisik yang kuat karena lebih banyak berkecimpung di lapangan, menyebabkan penyerapan tenaga kerja perempuan di perusahaan pertanian lebih rendah dibanding laki-laki, dan memunculkan segregasi.</li> <li>• Marjinalisasi perempuan di perusahaan-perusahaan pertanian dominan, dimana perempuan hanya dipekerjakan sebagai pekerja borongan dengan upah borongan dan ketiadaan tunjangan sakit dan lainnya.</li> <li>• Pandangan bahwa teknologi merupakan domain laki-laki, juga mengakibatkan pada penyingkiran perempuan pada pasar tenaga kerja yang menggunakan teknologi "canggih".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kesadaran gender sejak jenjang pendidikan terendah disertai dengan penyuluhan tentang perlindungan tenaga kerja perempuan yang memiliki peranan reproduksi.</li> <li>• Meningkatkan keterampilan perempuan dan laki-laki di lingkungan perusahaan pertanian yang berkeadilan gender, disertai pemberian perlindungan atas hak-hak kesehatan reproduksinya.</li> <li>• Melaksanakan sosialisasi bagi para siswa beserta guru-guru sekolah serta di lingkungan bekerja (karyawan/pegawai) bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama atas pekerjaan jika persyaratannya dipenuhi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya rasio perempuan pekerja tetap di lingkungan perusahaan pertanian.</li> <li>• Terwujudnya kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan dan jam kerja yang sama serta persyaratan kerja yang sama.</li> <li>• Terwujudnya kesetaraan dalam promosi karier dalam perusahaan serta hak-hak atas kondisi bekerja, keselamatan dan tunjangan kerja.</li> </ul>

## B. ANALISIS KEBIJAKAN : PEMBERDAYAAN SDM PERTANIAN MELALUI KELEMBAGAAN PERTANIAN

### 2.1. Kelompok Tani

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
1. Pemberdayaan Kelompok Tani dalam rangka pengembangan agribisnis dan terciptanya pembangunan pertanian berkelanjutan	<p><u>Kelompok Tani</u></p> <p>a. Data Pusluh 1998 Jumlah Kelompok = 378.864 Anggota Perempuan = 11 %</p> <p>b. Data Pusluh 1998 Jumlah Kelompok Taruna Tani = 33.441 Anggota Perempuan = 22,27 % Data Pusluh 1998 (a) Jumlah Kelompok = 29.291 Jumlah Anggota = 138.114 orang orang; Anggota Perempuan 22,41 %</p> <p><u>Kelompok Perempuan Tani</u></p> <p>c. Data Pusluh 1998 (a) Jumlah Kelompok = 46.500 Jumlah Anggota = 933.447 orang</p> <p>d. Kelompok Tani Hama Terpadu (PHT). TA 97/98 Tercatat dari total 3550 SLPHT yang diikuti oleh 103 721 orang, partisipasi perempuan sebesar 22,3 %; sementara pada TA 98/99 hanya 21,5 % (Siwi, 1999)</p> <p>e. Belum ada data resmi kelompok perempuan pesanggem (untuk kehutanan) dan untuk perkebunan.</p>	<p>AKSES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SK Bersama Menteri Pertanian dan Mendagri Nomor 223/Kptsn/Um/4/76 dan Nomor 76 Tahun 1976 perihal pembentukan BPP dan 240/Kptsn/Um/4/76 Tahun 1976 perihal pembentukan WKBPP dan WKPP , dimana setiap WKPP mencakup 16 Wilkel, sehingga di setiap WKPP terdiri dari 16 kelompok tani (laki-laki). Kelompok Perempuan Tani (KWT) dan Taruna Tani tidak ada dalam mainstream Sistem Laku, umumnya hanya ada satu kelompok per desa dan terdiri atas sekitar 20 orang anggota. Khusus untuk akses perempuan dalam SLPHT dimungkinkan karena meningkatnya tekanan internasional untuk melaksanakan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu yang berperspektif gender.</li> </ul> <p>PARTISIPASI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota KWT umumnya dinamis dan aktif manakala baru dibentuk. Aktivitasnya dominan untuk memenuhi kebutuhan praktis gender, kurang pada pemenuhan kebutuhan strategis gender. Dewasa ini aktivitasnya cenderung menurun sejalan dengan terhentinya pendampingan oleh PPL. Data menunjukkan bahwa menjadi anggota KWT yang mengikuti pelatihan PHT jumlahnya tidak sebanyak petani laki-laki.</li> </ul> <p>KONTROL :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Semua kegiatan bersifat "top-down", sehingga kontrol perempuan tani terhadap kegiatan rendah atau hampir tidak ada. Namun, umumnya ketua KWT memiliki kontrol terhadap stimulan dibanding anggotanya.</li> </ul> <p>MANFAAT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manfaat kegiatan penyuluhan dan pelatihan sangat besar terutama bagi mereka yang memperoleh IPTEK dan stimulan baik dari pemerintah maupun LSM. Namun mengingat kualitas dan frekuensi kegiatan menurun bahkan berhenti maka manfaat yang diperoleh kurang berkelanjutan.</li> </ul>

## 2.1. Kelompok Tani (lanjutan)

MASALAH GENDER	TUJUAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER	INDIKATOR GENDER
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya pejabat Eselon 1 dan 2 yang belum tersosialisasi tentang pentingnya <i>gender mainstreaming</i> dalam program pembangunan berkelanjutan, dan masih beranggapan bahwa teknologi itu netral.</li> <li>• Dominannya pendekatan transfer teknologi dalam pembangunan pertanian dan kehutanan yang bias pro inovasi, disertai kuatnya stereotipe pembagian kerja gender di kalangan pengambil keputusan, pengelola program dan masyarakat itu sendiri—karena pengaruh budaya/kultur—menjadikan pembentukan Kelompok Tani juga bias laki-laki.</li> <li>• Kecuali untuk Program SLPHT, program untuk KWT cenderung bias gender, yakni dominan diwarnai pemenuhan kebutuhan praktis pada sektor domestik atau isue produktif namun skala usaha sangat mikro serta cenderung sebagai “<i>crash program</i>” yang terbatas masa kelangsungan dan dananya.</li> <li>• Masih belum meratanya penyadaran gender, pelatihan teknis analisis gender dan perencanaan aksi (penyusunan program) secara partisipatif yang berperspektif gender bagi kalangan petugas penyuluh lapangan.</li> <li>• Masih kuatnya persepsi di kalangan petugas penyuluh yang beranggapan bahwa perempuan tani sudah sangat repot, jadi tidak ada waktu lagi untuk kelompok tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensosialisasikan penyadaran gender dan <i>gender mainstreaming</i> dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di kalangan para pejabat Eselon 1 dan 2.</li> <li>• Meningkatkan pembentukan KWT dan Kelompok Tani dengan pendekatan partisipatif dan meng-introduksi beragam program pembangunan pertanian dengan menyatukan perspektif gender di dalamnya.</li> <li>• Memperbaiki kualitas penyuluhan dan pelatihan bagi kelompok perempuan tani khususnya dan kelompok tani umumnya dengan meniadakan kesenjangan atau ketidakadilan gender dalam hal akses dan kontrol petani perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya pertanian dan manfaat pembangunan pertanian umumnya.</li> <li>• Meningkatkan pelatihan pengintegrasian gender ke dalam arus utama pembangunan bagi semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan program penyuluhan pertanian, terutama para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) baik di lingkungan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesadaran gender pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Departemen Pertanian dan Kehutanan.</li> <li>• Terumuskannya kebijakan yang tertuang ke dalam SK Bersama antara Menteri Pertanian dan Kehutanan dengan Kantor Meneg PP mengenai pengintegrasian gender dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian berkelanjutan.</li> <li>• Meningkatnya rasio kelompok tani perempuan yang memperoleh penyuluhan dengan kualitas yang sama dengan yang diperoleh kelompok tani laki-laki.</li> <li>• Meningkatnya kesetaraan gender dalam pelatihan program-program pembangunan pertanian dan meningkatnya kualitas materi pelatihan yang meng-upayakan tercapainya pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender.</li> <li>• Meningkatnya rasio aparat penyuluhan pertanian (laki-laki dan perempuan) yang melaksanakan dan terampil menyusun program aksi berperspektif gender secara partisipatif pada semua program utama pembangunan pertanian.</li> </ul>

## 2.2. Pengentasan Kemiskinan

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
<p>2. Pemberdayaan Kelompok Perempuan Tani (KPT) dalam rangka pengentasan kemiskinan.</p>	<p><u>Data Sampai Dengan Tahun 1998/1999</u>  <u>Kelompok Perempuan Tani</u>  <u>Diversifikasi Pangan &amp; Gizi (DPG)</u>            Jumlah Kelompok = 6.911            Jumlah Anggota = 138.580 orang            Jumlah Kader = 3.729 orang            Petugas Lapangan (PL) I = 783 orang            Petugas Lapangan (PL II) = 4.684 orang</p> <p>Kelompok Pembinaan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K)            Total 41,322 Kelompok Petani Kecil (KPK)            Kelompok Laki-laki : 34 %            Kelompok Perempuan : 40 %            Kelompok Campuran (Laki-laki + Perempuan): 26 %</p> <p>Karya Usaha Mandiri (KUM) :            Jawa Barat : anggotanya terdiri atas 2.010 orang perempuan miskin (Mat Syukur dan Rasahan, 1990)</p>	<p><b>AKSES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Didukung oleh INPRES No. 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (PMMR), yang diperbarui oleh INPRES No. 20 Tahun 1979 tentang PMMR yang implementasinya melalui Program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK); dan pada tahun 1993 (awal REPELITA VI) dirumuskan melalui Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) di 27 propinsi, 90 kabupaten dan 600-700 desa miskin di Indonesia.</li> </ul> <p><b>PARTISIPASI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar perempuan aktif sebagai anggota KUM, dan melaksanakan kegiatan ekonomi-produktif sesuai dengan rencana/usulan masing-masing. Total Usaha Bersama yang terealisasi 10.497 UB (48 %).</li> </ul> <p><b>KONTROL :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan memiliki kontrol terhadap usaha ekonomi produktif yang dikelolanya juga terhadap tunggakan cicilan dari anggota kelompok lainnya (KUM).</li> </ul> <p><b>MANFAAT :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan memperoleh manfaat berupa stimulan (modal), latihan kepemimpinan (kasus KUM), pengembangan atau kelancaran usaha serta peningkatan pendapatan. Dilaporkan bahwa kasus KUM hanya 2,3 % tunggakan kredit (Kasryno, 1999). Dalam hal penerapan teknologi, perempuan sangat rendah, sementara dalam hal rata-rata konsumsi energi peserta DPG lebih tinggi dibanding non-peserta DPG (Rachman, dkk., 1996). Adapun KPK yang mengembangkan UB menikmati kredit sebesar Rp. 36,564,750,000 (1999)</li> </ul>

## 2.2. Pengentasan Kemiskinan (lanjutan)

MASALAH GENDER	TUJUAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER	INDIKATOR GENDER
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kentalnya persepsi stereotipe gender di kalangan penentu program dan pelaksana program serta masyarakat, menjadikan kegiatan-kegiatan program pengentasan kemiskinan cenderung dominan dalam memenuhi kebutuhan praktis gender dan kurang dalam pemenuhan kebutuhan strategis gender (dalam arti peningkatan pendapatan) dan sangat kental pada stereotipe peran domestik perempuan. Selain itu, program tersebut cenderung tidak berkelanjutan atau belum mampu meningkatkan ketahanan pangan mereka.</li> <li>• Rendahnya jumlah stimulan yang diberikan kepada perempuan miskin menyebabkan modal/stimulan habis dikonsumsi atau digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.</li> <li>• Belum terintegrasinya pendampingan UB yang menggunakan pendekatan partisipatif dan berperspektif gender yang mencakup pendampingan dari sisi produksi maupun pemasaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan tentang penyusunan program secara partisipatif (melibatkan semua stakeholders) dan berperspektif gender yang lebih mengutamakan pada pemenuhan kebutuhan strategis gender antara lain dengan meningkatkan proporsi materi yang menyangkut aspek-aspek produksi pertanian dan pasca panen (pengolahan pangan), serta pemasarannya sehingga mampu menjamin keberlanjutan usaha.</li> <li>• Merumuskan kebijakan/peraturan untuk memberi kesempatan kepada perempuan dari rumah tangga miskin (melalui P4K, DPG, KUM) sebagai subyek sasaran penyuluhan yang terintegrasi dengan kelembagaan kelompok tani lainnya, yakni diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan keluarga/rumah tangga mereka.</li> <li>• Merumuskan kebijakan mengenai jumlah stimulan dengan skala usaha yang memadai secara ekonomis, disertai dengan beasiswa bagi anak-anak mereka.</li> <li>• Meningkatkan kegiatan pendampingan usaha bagi anggota KPK dan Kelompok DPG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan tentang penyusunan program secara partisipatif (melibatkan semua stakeholders) dan berperspektif gender dan lebih mengutamakan pada pemenuhan kebutuhan strategis gender antara lain dengan meningkatkan proporsi materi yang menyangkut aspek-aspek produksi pertanian dan pasca panen serta pemasarannya sehingga mampu menjamin keberlanjutan usaha.</li> <li>• Meningkatnya proporsi jumlah perempuan miskin sebagai peserta KPK dan dalam kegiatan-kegiatan yang terjalinkan dengan program-program P2RT, PUP dan PSSP.</li> <li>• Meningkatnya jumlah pendamping (baik dari kalangan penyuluh maupun kader lokal) yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomis produktif di kalangan rumah tangga miskin.</li> <li>• Meningkatnya anggaran untuk beasiswa keluarga miskin di pedesaan.</li> </ul>

### 2.3. Kelembagaan Ekonomi Perdesaan

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
<p>1. Pemberdayaan/meningkatkan kesempatan partisipasi perempuan tani dan nelayan dalam kelembagaan ekonomi pedesaan, khususnya KUD dan kredit pedesaan dari perbankan.</p>	<p>Secara umum partisipasi perempuan tani dan nelayan dalam kelembagaan ekonomi pedesaan baik itu koperasi maupun perbankan jauh lebih rendah dibanding laki-laki.</p> <p>Hasil Sensus Pertanian 1993 melaporkan bahwa dari 8.278 KUD yang ada di seluruh Indonesia, hanya 75,56 % yang aktif, 8,01 % non aktif, dan sisanya 16,43 % tutup.</p> <p>Sekalipun terdapat beragam jenis kredit pedesaan yang disalurkan, hampir dipastikan bahwa perempuan tani dan nelayan, terlebih kelompok miskin di pedesaan kurang atau hampir tidak memiliki akses terhadap kredit tersebut.</p>	<p><b>AKSES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dari 2.095 ribu calon anggota KUD, hanya 22,48 % perempuan.</li> </ul> <p><b>KONTROL :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dari sejumlah 18.421 orang pengawas KUD, hanya 1,82 % perempuan. Dari sejumlah 29.072 pengurus KUD Aktif, hanya 5,7 % perempuan. Perempuan pengurus KUD cenderung hanya menduduki posisi stereotipe, seperti bendahara atau sekretaris.</li> </ul> <p><b>PARTISIPASI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dari sebanyak 7.570 ribu anggota KUD Aktif, hanya 21,19 % perempuan. Dari sejumlah 57.952 orang karyawan KUD aktif, hanya 25,96 % perempuan. Perempuan tani/pedesaan yang memiliki akses terhadap KUD jauh lebih rendah dibanding petani laki-laki.</li> </ul> <p><b>MANFAAT :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gaji/honor yang diterima pengawas, pengurus, dan karyawan KUD perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Sekalipun ada kredit untuk pengurus, namun pengurus perempuan kurang menikmati (Meity Ria, 1999).</li> <li>Anggota KUD perempuan yang menikmati jasa KUD lebih rendah dan diantara mereka yang menikmati jasa KUD, jumlah pinjaman yang dinikmati mereka lebih rendah dibanding anggota laki-laki.</li> </ul>

### 2.3. Kelembagaan Ekonomi Pedesaan (lanjutan)

MASALAH GENDER	TUJUAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER	INDIKATOR GENDER
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya asumsi bahwa hanya kepala keluarga yang menjadi anggota koperasi, dan bahwa KK tersebut secara <i>de jure</i> adalah suami/laki-laki, maka akses dan kontrol perempuan terhadap KUD dan sejenis sangat rendah.</li> <li>• Kurang aksesnya perempuan tani dan nelayan penghutan dan pekebun yang mengepalai rumah-tangga (WKRT) miskin (gurem) tidak bisa aktif karena uang untuk membayar simpanan wajib dianggap mereka cukup berat.</li> <li>• Belum adanya KUD yang responsif terhadap pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender.</li> <li>• Stereotipe dalam memposisikan pekerja perempuan, yakni dalam posisi yang feminin, seperti sekretaris dan bendahara</li> <li>• Sedikitnya jumlah perempuan lulusan IKOPIN/ sejenis sebagai manajer dalam KUD dan koperasi sejenis.</li> <li>• KUD hanya menangani pelayan kredit untuk memenuhi kebutuhan usaha yang dikelola laki-laki, belum melayani semua cabang usaha yang dikelola perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan <i>affirmative action</i> yang mampu meningkatkan partisipasi perempuan tani dan nelayan, penghutan dan pekebun dalam kelembagaan koperasi dan kredit pedesaan dengan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi KUD untuk mengembangkan keanggotaannya yang bersifat individual (mencakup anggota rumah tangga petani, nelayan, penghutan, pekebun—laki-laki dan perempuan) dan mengembangkan usaha KUD yang responsif terhadap pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender.</li> <li>b. Memfasilitasi KUD untuk membuka cabang usaha yang mampu menampung produk hasil produksi anggotanya (laki-laki dan perempuan).</li> </ol> </li> <li>• Memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada perempuan untuk menduduki posisi pengambil keputusan (pengurus, manajer usaha, pengawas) berdasar kapasitasnya.</li> <li>• Memberikan penyadaran gender bagi insan koperasi.</li> <li>• Melakukan pelatihan manajemen koperasi bagi perempuan dan memberikan pendampingan bagi perempuan tani dan nelayan untuk membentuk koperasi perempuan sesuai UU Koperasi Nomor 25 1989.</li> <li>• Memberi gaji/honor yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk posisi/status yang sama dan jam kerja yang sama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jumlah KUD yang responsif terhadap pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender.</li> <li>• Meningkatnya proporsi keanggotaan perempuan dalam KUD menjadi sekitar setara laki-laki.</li> <li>• Meningkatnya jumlah perempuan yang potensial dan kompeten sebagai pengawas, pengurus, dan manajer usaha koperasi.</li> <li>• Dilaksanakannya pelatihan pengembangan usaha KUD yang responsif terhadap kebutuhan praktis dan strategis gender.</li> <li>• Diberikannya pendampingan bagi perempuan pedesaan dalam aspek manajemen koperasi agar dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan koperasi perempuan di desanya masing-masing.</li> <li>• Terlaksananya evaluasi terhadap standar pemberian upah/pendapatan bagi karyawan koperasi yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.</li> </ul>

## C. ANALISIS KEBIJAKAN : PEMBERDAYAAN SDM PERTANIAN DALAM IPTEK

### 3.1. Sumberdaya Rumah tangga Petani/Peternak/Pekebun/Petani Hutan

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
<p>1. Pemberdayaan/peningkatan produktivitas sumberdaya manusia petani dalam menciptakan pembangunan pertanian berkelanjutan.</p>	<p>Dari 378.864 kelompok tani (dewasa), hanya 11 % anggota perempuan tani; Jumlah KWT sebanyak 46.500 dengan anggota sebanyak 933.447 orang; Dari 33.441 Kelompok Taruna Tani, hanya 22,27 % anggota perempuan.</p> <p>Dalam Program SLPHT : Dari 12 propinsi di Indonesia : SLPHT TA 1997/1998:</p> <p>Dari 3.550 SLPT yang diikuti oleh 103721 peserta, perempuan hanya 22,3 %, tertinggi di Sumatera Barat dan Aceh, berturut-turut sebesar 47,5 % dan 34,5 %.</p> <p>SLPHT TA 1998/1999:</p> <p>Dari 3.951 SLPHT yang diikuti oleh 86.589 peserta, perempuan hanya 21,5 %, yang tertinggi di Sumbar (45,3 %) dan di Sumatera Utara (38,5 %).</p> <p>Petani-Nelayan Muda Berprestasi :</p> <p>Alumni Magang Jepang Angkatan I s/d XV (1984 s/d 1998). Dari sejumlah 387 peserta, hanya 53 orang perempuan (15 %).</p>	<p>AKSES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya SK untuk pembentukan kelompok petani, dan SK untuk taruna tani, dan SK untuk pembentukan KWT. Adanya keharusan mengikutsertakan perempuan dalam Program PHT (disponsori donor internasional).</li> <li>Adanya tawaran kerjasama petani Jepang untuk program Magang bagi petani Indonesia.</li> </ul> <p>PARTISIPASI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan tani cenderung berpartisipasi sebagaimana halnya laki-laki jika diberi kesempatan yang sama.</li> </ul> <p>KONTROL :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama ini ada kontrol perempuan (juga laki-laki) terhadap penyelenggaraan SLPHT khususnya dalam pelatihan, karena umumnya SLPHT lebih partisipatif dibanding Sistem LAKU.</li> </ul> <p>MANFAAT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan peserta SLPHT merasakan manfaat meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam PHT, sehingga mereka mampu melakukan pengamatan dan pengontrolan hama dan penyakit tanaman secara lebih baik. Namun demikian diduga perempuan sebagai pengamat hama, relatif lebih merasakan manfaat yang lebih dominan.</li> </ul>

### 3.1. Sumberdaya Rumahtangga Petani/Peternak/Pekebun/Petani Hutan (lanjutan)

MASALAH GENDER	TUJUAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER	INDIKATOR GENDER
<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat bias gender dalam penyelenggaraan program penyuluhan pertanian termasuk dalam penyelenggaraan SLPHT, namun setelah adanya tekanan dari donor agency, terdapat peluang bagi perempuan akses di dalamnya. Di samping itu, tergantung tingkat pemahaman gender di kalangan aparat pertanian dalam menentukan pesertanya, maka keragaman perempuan yang berpartisipasi dalam SLPHT juga beragam menurut propinsi.</li> <li>Dominannya stereotipe gender menjadikan perempuan masih enggan dalam mengikuti penyelenggaraan pelatihan yang menuntut peserta untuk meninggalkan keluarga/rumahtangganya. Di pihak lain, hal yang sama mempengaruhi pihak aparat desa dan KTNA yang bertanggung-jawab dalam menentukan peserta pelatihan, sehingga mereka cenderung dominan menunjuk laki-laki sebagai peserta, tanpa memberi akses pada perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan studi evaluasi kuantitatif dan kualitatif terhadap keadilan gender dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan yang mengintroduksi IPTEK di dalamnya agar dapat diperoleh solusi yang tepat bagi penghapusan ketidakadilan gender dalam penyuluhan dan pelatihan.</li> <li>Memberikan pelatihan disertai pendampingan tentang pengembangan manajemen yang responsif gender bagi semua <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pertanian (secara partisipatif).</li> <li>Mengembangkan metode penyusunan siklus manajemen program/proyek penyuluhan pertanian (IPTEK) yang responsif gender, partisipatif, dan sederhana sehingga memudahkan penerapannya oleh semua <i>stakeholders</i>.</li> <li>Melaksanakan <i>affirmative action</i> yang memberikan kesempatan bagi perempuan tani untuk terlibat dalam semua pelatihan yang berkenaan dengan kegiatan produktif, sepanjang perempuan turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.</li> <li>Mengembangkan manajemen pelatihan IPTEK yang tidak mengharuskan perempuan tani meninggalkan keluarganya dalam waktu terlalu lama, kecuali mereka masih lajang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya data statistik (kuantitatif dan kualitatif) tentang kinerja penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pertanian yang terpilah menurut jenis kelamin.</li> <li>Tersedianya "<i>tools</i>" metode penyusunan siklus manajemen program/proyek penyuluhan pertanian (IPTEK) yang responsif gender sehingga dapat melibatkan semua <i>stakeholders</i> (<i>participatory approach</i>).</li> <li>Meningkatnya jumlah perempuan tani sebagai peserta penyuluhan dan pelatihan.</li> <li>Meningkatnya aparat peneliti dan penyuluh yang menyadari dan terampil dalam mengintegrasikan teknik analisis gender dalam penyusunan/perencanaan penelitian serta penyusunan program aksi yang berperspektif gender guna meningkatkan kesejahteraan keluarga petani.</li> <li>Meningkatnya jumlah perempuan tani yang mengikuti pelatihan IPTEK yang relevan dengan usahatani/usaha ternak/usaha perikanan dan usaha budidaya tanaman hutan, serta pengolahan hasil pertanian.</li> <li>Meningkatnya pelatihan berbasis komunitas dan usaha yang dikembangkan oleh rumahtangga petani/pekebun/peternak/nelayan dan budidaya kayu-kayuan</li> </ul>

### 3.2. Tenaga Ahli Pertanian

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
<p>3. Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga ahli pertanian bagi tenaga ahli/honorer SDM "Lingkup" pertanian.</p>	<p>Data 1995 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Ahli Ristek Senior Total = 650 orang, L = 92,2 % P = 7,8 %</li> <li>b. Peneliti IPTEK (Umum) P = 25 %</li> <li>c. Doktor Pertanian Perguruan Tinggi Total = 831 orang, L = 70 % P = 30 %</li> <li>d. Doktor Teknologi Total = 389 orang, L = 84 % P = 16 %</li> <li>e. Guru Besar di Perguruan Tinggi (PT) Pertanian : Total = 179 orang, L = 92 % P = 8 % Teknologi : Total = 90 orang, L = 97 % P = 3 %</li> </ul> <p>Tenaga kerja Ilmu Pengetahuan Alam dan Rekayasa Produksi Total = 125.220 orang, L = 72 % P = 28 %</p> <p>Menurut Sektor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah: Total = 88.250 orang, L = 68 % P = 32 %</li> <li>b. Perguruan Tinggi : Total = 18.425 L = 75 % P = 25 %</li> <li>c. Industri Manufaktur Total = 18.275 orang, L = 90 % P = 10 %</li> </ul>	<p>AKSES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan semakin terbukanya kesempatan setiap warga negara (laki-laki dan perempuan) dalam pendidikan formal sampai jenjang tertinggi serta pelatihan, peluang perempuan untuk menguasai IPTEK cenderung meningkat.</li> <li>Di lain pihak, motivasi belajar atau berkariir di kalangan profesional perempuan juga meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah serta semakin egaliternya struktur keluarga (suami-isteri) di kalangan yang berpendidikan tinggi.</li> </ul> <p>PARTISIPASI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan status kegiatannya masing-masing, di PT dan Litbang umumnya baik laki-laki maupun perempuan melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, karena di sektor formal, jam kerjanya cenderung sama dengan laki-laki, serta dipengaruhi oleh kesempatan yang diraihinya .</li> <li>Contoh, perempuan peneliti juga memiliki akses terhadap kesempatan penelitian dalam negeri seperti Hibah Bersaing, RUT, juga luar negeri seperti Toyota Foundation, Ford Foundation, dll.</li> </ul> <p>KONTROL :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jabatan struktural baik itu rektor dan para pembantunya, di lingkungan fakultas, lembaga penelitian maupun lembaga pengabdian pada masyarakat sebagian besar didominasi laki-laki.</li> </ul> <p>MANFAAT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal gaji terdapat kesamaan antara laki-laki dan perempuan, tergantung golongan kepangkatan dan masa kerjanya. Karena, anak-anak masuk tanggungan suami, serta rendahnya perempuan yang menduduki jabatan struktural, maka pendapatan perempuan cenderung lebih rendah. Perempuan juga memperoleh peluang melanjutkan pendidikan (S-2 dan S-3) serta pelatihan, namun jika berbeda pekerjaan dengan suami timbul masalah keluarga.</li> </ul>

### 3.2. Tenaga Ahli Pertanian (lanjutan)

MASALAH GENDER	TUJUAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER	INDIKATOR GENDER
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat stereotipe pembagian “ilmu” yang tegas antara laki-laki dan perempuan (“<i>split brain theory</i>”), dimana perempuan disosialisasikan untuk mengambil ilmu -ilmu sosial, sementara laki-laki ilmu IPA dan Teknologi.</li> <li>• Adanya hubungan antara siklus hidup (<i>lyfe cycle</i>) dengan pengembangan karir perempuan. Staf akademik/peneliti perempuan cenderung menunda meneruskan ke jenjang pendidikan program doktor karena kesibukan dalam melaksanakan peran “<i>triple</i>” —reproduktif, bekerja dan kegiatan Dharma Perempuan.</li> <li>• Adanya diskriminasi perempuan dalam jabatan struktural, sepanjang sistem sosial didominasi budaya patriarkhi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejalan dengan meningkatnya peluang dan persentase perempuan sebagai tenaga ahli peneliti perlu suatu penyadaran dan upaya terstruktur akan pentingnya “berbagi kepemimpinan” antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian penting, misalnya dalam manajemen penelitian .</li> <li>• Memberikan pelatihan manajemen dan kepemimpinan bagi perempuan yang berminat pada jabatan struktural.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya rasio perempuan yang berstatus tenaga ahli ristik senior, peneliti IPTEK, Doktor pertanian dan guru besar perempuan.</li> <li>• Meningkatnya rasio perempuan yang menduduki jabatan struktural (pengambil keputusan) dalam pengembangan IPTEK bagi terciptanya pembangunan pertanian berkelanjutan.</li> </ul>

### 3.3. Aparat di Lingkungan Pertanian dan Perhutanan

#### 3.3.1. Aparat di Lingkungan Pertanian

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
<p>1. Pemberdayaan/Peningkatan produktivitas aparat pertanian dalam menciptakan pembangunan pertanian berkelanjutan.</p>	<p>Data Total Penyuluh Pertanian : 33.735 orang Gol. IV = 241 orang (0,65 %) Gol. III = 10.836 orang (29,04 %) Gol. II = 22.658 orang (60,69 %) Sarjana : S1 = 3.049 orang; S2 = 112 orang S3 = 45 orang; Sisanya non sarjana (Tidak ada data menurut jenis kelamin)</p> <p>Data November 1999 menunjukkan bahwa jumlah penyuluh pertanian total sebanyak 37.333, terdiri atas 83,4 % laki-laki dan 16,6 % perempuan.</p> <p>Data 1994 jumlah pegawai Badan Litbang Pertanian sebanyak 6.987 orang, hanya 22,13 % perempuan. Menurut tingkat pendidikan, perempuan hanya 0,33 % bergelar doktor , 2,42 % S2 dan 6,6 % S1; sementara laki-laki berturut-turut 2,93 % S3, 6,56 % S2 dan 15,27 % S1.</p> <p>Proporsi penelitiannya, dari 1.960 orang , perempuan hanya 27,85 % . Mereka yang tergolong APU , AP Madya dan AP Muda berturut-turut sebesar 0,1 % , 0,05 % , dan 0,20 % ; sementara laki-laki berturut-turut 1,68 % , 0,87 % , dan 1,48 % .</p> <p>Jumlah peneliti di lingkungan BPTP/LPTP sekitar 2.500 orang (Juli,1996) (belum ada data terpilah menurut jenis kelamin).</p>	<p><b>AKSES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat dukungan kebijakan mengenai aparat penyuluh pertanian dan peneliti lingkup Deptan antara lain: (1) SKB Mendagri -Mentan Nomor 223/Kpts/Um/4/ 1976 dan SK Menteri Pertanian No.798/Kpts./OT.210/12/94 tanggal 13 Nopember 1994 tentang pembentukan BPTP dan LPTP, serta SK Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.19/ Kep/MK Waspan/1999.</li> </ul> <p><b>PARTISIPASI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan penyuluhan atau penelitian, sebagian besar masih bersifat "top-down" dan belum berperspektif gender.</li> </ul> <p><b>KONTROL :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Eselon 1 dan 2 hanya 2 % perempuan. Sebagian besar jabatan struktural di dominasi laki-laki. Data BPS 1998 menyebutkan bahwa secara umum hanya ada seorang perempuan diantara : (a) setiap 9 pejabat Eselon 1 dan 2; (b) setiap 14 pejabat Eselon 3; (c) setiap 8 pejabat Eselon 4 dan 5 (BPS,1998).</li> </ul> <p><b>MANFAAT :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyuluh dan peneliti lingkup Deptan memperoleh imbalan gaji serta honor sesuai dengan pekerjaannya, serta memperoleh kesempatan pelatihan dan pendidikan lanjutan yang dibutuhkan bagi pengembangan karir mereka.</li> </ul>

### 3.3.2. Aparat Di Lingkungan Perhutanan (lanjutan)

TUJUAN UMUM	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN GENDER
<p>Pemberdayaan/peningkatan produktivitas aparat pertanian dalam menciptakan pembangunan pertanian berkelanjutan.</p>	<p>Di lingkungan Dephutbun (Data 1998) diketahui bahwa secara total terdapat 45.231 orang dan hanya 11,25 % perempuan. Secara rinci di setiap tingkat sebagai berikut :</p> <p>Pusat : Terdapat 28,3 % perempuan dari 4.921 orang  Wilayah : 18 % dari 2.971 orang  Unit Pelaksana Teknis 11,5 % dari 21.655 orang  Dinas : 5 % dari 5.842 orang  Dinas PKT : 3,7 % dari 3.993 orang  BUMN : 3,5 % dari 5.849 orang</p> <p>Di lingkungan Dephutbun sbb:  APU : 0 % P dari 8 orang  APMadya : 50 % P dari 4 orang  APMuda : 37,5 % P dari 8 orang  Peneliti Madya : 9 % P dari 11 org.  Peneliti Muda : 19 % P dari 21 orang  Ajun Pen. Muda 23,5 % P dari 34 org.  Ajun Pen.Madya : 16 % P dari 49 org.  Asisten P.Muda: 44 % P dari 27 org.  As.Pen.Madya: 29,7 % P dari 37 org.</p>	<p>PARTISIPASI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan sejarahnya, pendekatan penyuluhan atau penelitian, sebagian besar masih bersifat "top-down" dan belum berperspektif gender.</li> </ul> <p>KONTROL :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Eselon 1 dan 2 hanya ada 2 % perempuan. Sebagian besar jabatan struktural di dominasi laki-laki. Data BPS 1998 menyebutkan bahwa secara umum hanya ada seorang perempuan diantara : (a) setiap 9 pejabat Eselon 1 dan 2; (b) dari setiap 14 pejabat Eselon 3; (c) setiap 8 pejabat Eselon 4 dan 5 (BPS,1998).</li> </ul> <p>MANFAAT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyuluh dan peneliti lingkup Dephutbun memperoleh imbalan gaji serta honor sesuai dengan pekerjaannya, serta memperoleh kesempatan pelatihan dan pendidikan lanjutan yang dibutuhkan bagi pengembangan karir mereka. Belum diperoleh data terinci mengenai data peneliti dan penyuluh menurut jenis kelamin .</li> </ul>

### 3.3. Aparat di Lingkungan Pertanian dan Perhutanan (lanjutan)

MASALAH GENDER	TUJUAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER	INDIKATOR GENDER
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat bias gender yang mempengaruhi rendahnya posisi perempuan dalam jabatan struktural, karena di lingkungan birokrat dan teknokrat budaya patriarkhi masih dominan.</li> <li>• Belum terinternalisasinya pandangan pentingnya <i>gender mainstreaming</i> dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi program pembangunan pertanian, karena anggapan bahwa indikator pengembangan SDM berperspektif gender relatif sulit mengukurnya.</li> <li>• Pendekatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian selama ini lebih menitikberatkan pada peningkatan produksi (yang melayani kepentingan masyarakat kota), ketimbang mensejahterakan petaninya.</li> <li>• Belum meratanya kesempatan mengikuti pelatihan atau lokakarya teknik analisis gender dan pendekatan partisipatif bagi setiap aparat yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan program penelitian dan penyuluhan pertanian di berbagai lini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi gender mainstreaming dalam perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan bagi pejabat Eselon 1 dan 2 serta di bawahnya.</li> <li>• Melakukan pelatihan aparat pertanian yang bertanggung-jawab dalam penyuluhan dan penelitian dalam mengintegrasikan pendekatan/teknis analisis gender dan pendekatan partisipatif, sehingga mampu mengakselerasi pemberdayaan perempuan/keluarga petani</li> <li>• Melakukan <i>affirmative action</i> yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan Eselon 1 dan 2 di lingkungan Departemen Pertanian dan Dephutbun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pejabat Eselon 1 dan 2 serta aparat di bawahnya yang mengikuti penyadaran gender.</li> <li>• Meningkatnya persentase perempuan yang menduduki Eselon 1 dan 2, sesuai dengan kapasitasnya dan telah sensitif gender.</li> <li>• Meningkatnya aparat peneliti dan penyuluh yang menyadari dan terampil dalam mengintegrasikan teknik analisis gender dalam penyusun-an/perencanaan penelitian serta penyusunan program aksi berperspektif gender guna meningkatkan kesejahteraan keluarga petani.</li> </ul>

## Lampiran 5. *Gender Responsive Policy Outlook and Plan of Action (POP)* Dalam Pengarusutamaan Gender Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Perhutanan

### A.1. Pemberdayaan SDM Rumahtangga Pertanian : Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perikanan

Kebijakan Nasional	Indikator Gender	Rencana Aksi
<p>Mengembangkan pertanian berwawasan agribisnis melalui pembangunan yang berorientasi pada perkembangan global, berbasis pada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menghilangkan segala bentuk diskriminasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan kesempatan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien dan berwawasan agribisnis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin mengenai status KK dan anggota rumahtangga yang bekerja dan berusaha di sektor pertanian (tanaman pangan, peternak, penangkap dan budidaya perikanan) serta akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya pertanian serta analisis produktivitas kerja dan atau usaha yang mereka kelola.</li> <li>Meningkatnya jumlah warga masyarakat (pertanian, petugas penyuluh, petugas sensus pertanian) yang menetapkan status KK secara <i>de facto</i> secara objektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sensus pertanian dan industri yang mengumpulkan data dasar (baseline data) yang terpilah menurut jenis kelamin dan dengan penetapan status KK sesuai dengan faktualnya (<i>de facto</i>).</li> <li>Melaksanakan studi yang mengumpulkan data dasar tentang akses KK dan anggota rumahtangga pekerja pertanian (dalam arti luas) dan industri (beragam skala usaha) terhadap sumberdaya pembangunan (aset produksi, Informasi, IPTEK, modal, kredit, penyuluhan dan pelatihan) dengan beragam latar belakang ekosistem.</li> <li>Melaksanakan sertifikasi lahan dan aset produksi yang berkeadilan gender.</li> <li>Melaksanakan studi kualitatif dan kuantitatif untuk mengkaji efisiensi dan produktivitas dan usaha pertanian (dalam arti luas) dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang berperspektif gender sebagai masukan bagi upaya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.</li> </ul>

Kebijakan Nasional	Indikator Gender	Rencana Aksi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberdayakan masyarakat pertanian menuju suatu masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya frekuensi diseminasi Undang-undang RI No 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya Pasal 11 dan 14, serta perumusan perlindungan tenaga kerja sektor informal (pertanian dan lainnya) dalam UU Ketenagakerjaan.</li> <li>• Meningkatnya jumlah rumah tangga pertanian yang memilih opsi hibah yang adil dalam mengalokasikan aset produksi (lahan usaha tani, peternakan, aset tambak dan alat penangkapan ikan) kepada anak-anak perempuan dan laki-laki mereka.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan diseminasi UU No.7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya Pasal 11 dan 14 bagi semua stakeholders yang bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian (dari beragam sektor).</li> <li>• Membuat rumusan perlindungan tenaga kerja sektor informal (pertanian dan industri kecil) dalam UU Ketenagakerjaan.</li> <li>• Melaksanakan penyadaran gender dalam aspek sistem alokasi sumberdaya aset produksi (lahan usaha tani, usaha tambak, alat/perlengkapan penangkapan dan budidaya perikanan) bagi pemuka agama, Islam khususnya</li> <li>• Melaksanakan penyadaran gender bagi masyarakat pertanian/perdesaan (pertanian dan pesisir/nelayan) mengenai opsi hibah yang adil dalam mengalokasikan aset produksi kepada anak-anak perempuan dan laki-laki mereka.</li> </ul>

## A.2. Pemberdayaan SDM Rumah tangga Pertanian : Kehutanan dan Perkebunan

Kebijakan Nasional	Indikator Gender	Rencana Aksi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM dengan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan hutan dan kebun rakyat (HKR) dan hutan kemasyarakatan (HKM).</li> <li>• Mendorong berkembangnya industri yang berbasis perkebunan di perdesaan melalui penciptaan iklim yang kondusif dan mendorong terciptanya lapangan bekerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin mengenai status KK dan anggota rumah tangga yang bekerja dan berusaha di sektor kehutanan dan perkebunan serta akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya kehutanan dan perkebunan serta analisis produktivitas kerja dan atau usaha yang mereka kelola.</li> <li>• Meningkatnya jumlah warga masyarakat (pertanian, petugas penyuluh, petugas sensus pertanian) yang menetapkan status KK secara de facto secara obyektif.</li> <li>• Meningkatnya frekuensi diseminasi Undang-undang RI No 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya pasal 11 dan 14, serta perumusan perlindungan tenaga kerja sektor informal (kehutanan dan perkebunan dan lainnya) dalam UU Ketenagakerjaan.</li> <li>• Meningkatnya jumlah rumah tangga kehutanan dan perkebunan yang memilih opsi hibah yang adil dalam mengalokasikan aset produksi (usaha tani kebun/ HKAI) kepada anak-anak perempuan dan laki-laki mereka.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan sensus kehutanan dan perkebunan (bagian dari sensus pertanian) dan industri yang mengumpulkan data dasar (<i>baseline data</i>) yang terpilah menurut jenis kelamin dan dengan penetapan status KK sesuai dengan faktualnya (<i>de facto</i>).</li> <li>• Melaksanakan studi yang mengumpulkan data dasar tentang akses KK dan anggota rumah tangga pekerja kehutanan (HKR dan HKM), perkebunan dan industri yang berhubungan dengan keduanya (beragam skala usaha) terhadap sumberdaya pembangunan (aset produksi, informasi, IPTEK, modal, kredit, penyuluhan, dan pelatihan).</li> <li>• Melaksanakan suatu studi kualitatif dan kuantitatif untuk mengkaji efisiensi dan produktivitas dan usaha kehutanan (HKR dan HKM) (dalam arti luas) dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang berperspektif gender sebagai masukan bagi upaya perwujudan kesetaraan dan ketidak-adilan gender.</li> <li>• Melaksanakan diseminasi UU RI No.7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, khususnya Pasal 11 dan 14 bagi semua <i>stakeholders</i> yang bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan perkebunan.</li> </ul>

Kebijakan Nasional	Indikator Gender	Rencana Aksi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rumusan perlindungan tenaga kerja sektor informal (kehutanan dan perkebunan) dalam UU Ketenagakerjaan.</li> <li>• Melaksanakan penyadaran gender dalam aspek sistem alokasi sumberdaya aset produksi (usaha tani kebun/HKM) bagi pemuka agama, Islam khususnya.</li> <li>• Melaksanakan penyadaran gender bagi masyarakat kehutanan dan perkebunan mengenai opsi hibah yang adil dalam mengalokasikan aset produksi kepada anak-anak perempuan dan laki-laki mereka.</li> </ul>

### A.3. Pemberdayaan Pekerja Perusahaan Pertanian

Kebijakan Nasional	Indikator Gender	Rencana Aksi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pertanian berwawasan agribisnis melalui pembangunan yang berorientasi global, sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan komparatif, sesuai kompetensi dan produk unggulan daerah, berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan hambatan penerapan mekanisme pasar yang berkeadilan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya rasio pekerja atau karyawan tetap perempuan di lingkungan perusahaan pertanian.</li> <li>Meningkatnya kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan dan jam kerja yang sama serta persyaratan kerja yang sama dan dengan mengacu pada UU Ketenagakerjaan.</li> <li>Meningkatnya kesetaraan dalam promosi karier dalam perusahaan serta hak-hak kondisi bekerja, keselamatan, dan tunjangan kerja.</li> <li>Meningkatnya kesadaran gender di kalangan perusahaan pertanian sebagai upaya untuk meniadakan ketidakadilan gender (marginalisasi perempuan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyadaran jender di lingkungan perusahaan pertanian, kehutanan dan perkebunan serta penyuluhan tentang UU RI No 7/1984 perihal Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan.</li> <li>Menghapus ketentuan-ketentuan yang diskriminatif terhadap upah (lihat Analisis Gender dalam Pembangunan Hukum).</li> <li>Melakukan sosialisasi tentang kesetaraan hak-hak (termasuk promosi karier) dan kewajiban pekerja antara pekerja perempuan dan laki-laki termasuk perlindungan atas hak-hak kesehatan reproduksinya.</li> <li>Memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan hukum terutama bagi buruh perempuan.</li> </ul>

## B.2. Kelembagaan Ekonomi Pertanian/Perdesaan : Koperasi Unit Desa (KUD) dan Lainnya

Kebijakan Nasional	Indikator Gender	Rencana Aksi
<p>Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, <i>kelembagaan</i> dan budidaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penciptaan kondisi kondusif untuk mengembangkan ekonomi pertanian rakyat sesuai mekanisme pasar yang berkeadilan, melalui peraturan, layanan publik dan insentif usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya jumlah KUD yang melibatkan perempuan dan laki-laki selaku pengurus, manajer, pengawas dan karyawan sehingga mereka responsif terhadap kepentingan KK dan anggota rumahtangga pertanian (tanaman pangan, peternak, nelayan, petani budidaya kayu-kayuan dan perkebunan) perempuan dan laki-laki.</li> <li>Meningkatnya rasio petani perempuan dan laki-laki sebagai pengurus, manajer dan karyawan dalam kelembagaan KUD</li> <li>Meningkatnya rasio petani perempuan dan laki-laki sebagai anggota aktif dalam kelembagaan KUD</li> <li>Terlaksananya evaluasi terhadap standar kinerja dan pemberian upah bagi pengurus, manajer dan karyawan KUD.</li> <li>Terlaksananya evaluasi terhadap partisipasi anggota KUD perempuan dan laki-laki serta penilaian kebutuhan mereka terhadap KUD atau kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan penyadaran gender kepada koperasi pedesaan (KUD) dan lembaga ekonomi perdesaan lainnya. Khusus untuk perbankan agar memberikan pelayanan hak-hak dan kewajiban yang sama kepada nasabah petani perempuan dan laki-laki.</li> <li>Melakukan tindakan afirmatif dalam pembinaan KUD dengan menetapkan kuota perempuan yang menduduki posisi pengurus, manajer, pengawas, dan karyawan yang menghilangkan stereotipe gender serta memberikan kebebasan kepada perempuan baik itu sebagai KK maupun anggota rumahtangga untuk menjadi anggota KUD.</li> <li>Menerapkan standar upah bagi karyawan KUD sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.</li> <li>Mengembangkan data partisipasi dan kontrol KK dan anggota rumahtangga petani terhadap KUD dan perbankan terpilah menurut jenis kelamin.</li> <li>Mengembangkan dan memberikan pendampingan pola kemitraan antara kelompok tani perempuan dan laki-laki dengan KUD dan pengusaha (BUMN dan swasta) dari sisi <i>supply</i> dan atau sisi pemasaran sehingga dapat meningkatkan posisi tawar menawar petani dalam agribisnis dan atau anggota kelompok tani.</li> </ul>

### B.3. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Aparat Pertanian

Kebijakan Nasional	Indikator Gender	Rencana Aksi
<p>Mengembangkan pertanian berwawasan agribisnis melalui pembangunan yang berorientasi global, sesuai kemajuan teknologi dengan pembangun keunggulan komparatif, sesuai kompetensi dan produk unggulan daerah, berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan hambatan penerapan mekanisme pasar yang berkeadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sumberdaya manusia pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya rasio perempuan/laki-laki yang menduduki jabatan struktural (Eselon 1 dan 2) yang melaksanakan <i>gender streaming</i> dalam pembangunan pertanian.</li> <li>Meningkatnya profesional perempuan dan laki-laki (jabatan fungsional) di bidang pertanian serta kehutanan dan perkebunan yang mampu mengembangkan IPTEK yang meningkatkan produktivitas usaha rumah tangga petani / pengusaha (skala kecil dan menengah).</li> <li>Meningkatnya jumlah peneliti, penyuluh dan atau pelatih yang mampu menyusun program/proyek yang responsif gender dalam lingkup pembangunan pertanian serta kehutanan dan perkebunan secara partisipatif (melibatkan <i>stakeholders</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan data statistik pejabat struktural dan jabatan fungsional menurut jenis kelamin serta tingkat pendidikan dan atau kualifikasi mereka (jenjang kepangkatan dan lainnya), pengalaman mengikuti pelatihan atau pendidikan yang relevan.</li> <li>Menyelenggarakan penyadaran gender bagi pejabat struktural (Eselon 1 dan 2) lingkup Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk mengintegrasikan <i>gender mainstreaming</i> dalam program-program pembangunan pertanian, serta kehutanan dan perkebunan; serta memberi perhatian atas UU No. 7/1984; memberi masukan akan rumusan perlindungan tenaga kerja pertanian, kehutanan dan perkebunan dalam UU Ketenagakerjaan.</li> <li>Melakukan pelatihan pengembangan manajemen proyek yang responsif gender dalam bidang pertanian, serta kehutanan dan perkebunan kepada para profesional (peneliti, penyuluh, dan pelatih).</li> <li>Mengembangkan program penyuluhan dan pelatihan yang responsif gender dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perkebunan dengan melibatkan <i>stakeholders</i>.</li> <li>Memasukkan klasifikasi "keahlian" pengembangan manajemen proyek yang responsif gender dalam bidang pertanian, serta kehutanan dan perkebunan sebagai salah satu kriteria promosi karier bagi para profesional (peneliti, penyuluh dan pelatih).</li> </ul>

#### B.4. Pemberdayaan SDM rumah tangga Pertanian dalam IPTEK

Kebijakan Nasional	Indikator Gender	Rencana Aksi
<p>Mengembangkan pertanian berwawasan agribisnis melalui pembangunan yang berorientasi global, sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan komparatif, sesuai kompetensi dan produk unggulan daerah, berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menghilangkan segala bentuk diskriminatif dan hambatan penerapan mekanisme pasar yang berkeadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kualitas sumberdaya manusia pertanian, khususnya dalam pengetahuan dan keterampilan berusaha tani dengan wawasan agribisnis melalui pelatihan dan penyuluhan.</li> <li>• Percepatan pengembangan dan penerapan IPTEK pertanian yang ramah lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya data statistik (kuantitatif dan kualitatif) tentang kinerja penyuluhan dan pelatihan di sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan yang terpilah menurut jenis kelamin.</li> <li>• Meningkatnya jumlah perempuan tani yang mengikuti pelatihan IPTEK yang relevan dengan usahatani/ternak/perikanan, kehutanan dan perkebunan (sesuai dengan SDA yang berkelanjutan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi kinerja dan hasil-hasil penyuluhan dan pelatihan IPTEK di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang terpilah menurut jenis kelamin (penyelenggara dan pesertanya).</li> <li>• Melakukan penilaian kebutuhan penyuluhan dan pelatihan IPTEK di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan di kalangan warga masyarakat pertanian yang terpilah menurut jenis kelamin.</li> <li>• Melakukan tindakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah /rasio perempuan perdesaan yang mengikuti penyuluhan dan pelatihan IPTEK pertanian, kehutanan dan perkebunan yang berbasis komunitas.</li> <li>• Mengidentifikasi <i>indigenous knowledge</i> yang berkenaan dengan budidaya dan pasca panen komoditi unggulan lokal yang efisien dan ramah lingkungan yang terpilah menurut jenis kelamin, di samping teknologi lokal yang disertai dengan perlindungan HAKI mereka.</li> <li>• Melakukan uji coba teknologi baru yang dilaksanakan secara partisipatif dan menggunakan perspektif gender.</li> <li>• Mengembangkan pola kemitraan antara rumah tangga petani, kelompok tani perempuan dan laki-laki dengan pihak swasta yang dilandasi prinsip keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga di perdesaan.</li> <li>• Melembagakan konsultasi bisnis" yang dikelola para profesional di tingkat daerah/lokal yang melibatkan <i>stakeholders</i> profesional termasuk petani, yang memberikan masukan dalam hal pengembangan usahatani berwawasan agribisnis yang mampu memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender.</li> </ul>

### B.5. Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan Nasional	Indikator Gender	Rencana Aksi
<p>Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelem-bagaan dan budidaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani serta produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan berbagai upaya ter-padu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran melalui pengembangan usaha pertanian dengan usaha pokok.</li> </ul>	<p>Meningkatkan proporsi perempuan peserta Kelompok peningkatan pendapatan Petani Kecil (KPK), dan dalam kegiatan-kegiatan yang terjalin dengan program-program Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu (P2RT), Pengembangan Usaha Pertanian (PUP), dan Pengembangan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Pertanian (PSSP) untuk sektor pertanian; serta dengan program-program di sektor kehutanan dan perkebunan, yaitu: Pengembangan Usaha Perhutanan Rakyat, P2RT, dan Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengevaluasi berbagai program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan gender dan menyediakan data penyaluran kredit dalam program tersebut secara terpilah menurut jenis kelamin.</li> <li>Melakukan tindakan afirmatif dalam penyaluran dana program pengentasan kemiskinan (JPS dan kredit usaha kecil lainnya) dengan mengalokasikan dana kepada KK dan anggota rumah tangga perempuan yang mengembangkan usaha-usaha non-pertanian lainnya.</li> <li>Mengembangkan usaha kecil (<i>micro enterprise</i>) di sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan yang dikelola perempuan disertai dengan pelayanan / konsultasi bisnis atau pendampingan usaha yang dapat memfasilitasi mereka terhadap akses sumberdaya (<i>sisi supply dan demand</i>) yang mampu meningkatkan pendapatan mereka.</li> <li>Mengembangkan Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang berperspektif gender dan melibatkan keluarga miskin di perdesaan.</li> <li>Menyelenggarakan Perhutanan Sosial dan PMDHT yang partisipatif KK dan/atau anggota Rumah-tangga petani lahan kering perempuan yang tidak berlahan atau gurem.</li> </ul>

**Lampiran 6. Tujuan, Sasaran Utama dan Kegiatan Pokok pada Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

	Program Pengembangan Agribisnis	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Tujuan	<p>Mengembangkan agribisnis yang mampu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghasilkan produk pertanian dan kehutanan primer yang berdaya saing,</li> <li>2. meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pertanian dan nelayan, khususnya petani dan nelayan kecil,</li> <li>3. memperluas kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan,</li> <li>4. mengembangkan ekonomi wilayah, dan</li> <li>5. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan bersumber pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, dan kebun serta produk-produk olahannya</li> <li>2. Mengembangkan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi, serta konsumsi pangan yang lebih beragam</li> <li>3. Mengembangkan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menghindarkan monopoli usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menghindarkan monopoli usaha bisnis pangan</li> <li>4. Menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat.</li> </ol>
Sasaran Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produktivitas, kualitas, dan produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;</li> <li>2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan;</li> <li>3. Meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan</li> <li>4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan pertanian dan perdesaan; dan</li> <li>5. Terpeliharanya sistem sumber daya alam dan lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produksi dan ketersediaan beras secara berkelanjutan serta meningkatnya produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein</li> <li>2. Meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya konsumsi beras per kapita</li> <li>3. Meningkatnya skor mutu pangan Pola Pangan Harapan dan berkurangnya jumlah keluarga rawan pangan dan gizi</li> <li>4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi pertanian dan pengolahan bahan pangan</li> <li>5. Terselenggaranya undang-undang dan berkembangnya kapasitas kelembagaan pangan yang partisipatif</li> <li>6. Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan yang dipasarkan</li> <li>7. Menurunnya volume impor bahan pangan dan meningkatnya bahan pangan substitusi impor</li> <li>8. Berkembangnya industri dan bisnis pangan</li> <li>9. Meningkatnya partisipasi masyarakat, dan investasi swasta dalam pengembangan bisnis pangan</li> <li>10. Terciptanya system usaha perikanan yang saling mendukung</li> </ol>

	Program Pengembangan Agribisnis	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		antarperikanan tangkap dan budidaya dalam upaya mendukung ketahanan pangan
Kegiatan Pokok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan komoditas unggulan yang kompetitif di pasar domestik dan internasional serta sentra-sentra pengembangannya</li> <li>2. Pemberdayaan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi pertanian</li> <li>3. Pengembangan industri perbenihan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan di sentra-sentra produksi</li> <li>4. Pengembangan industri dan penerapan alat dan mesin pertanian dan perikanan</li> <li>5. Perluasan areal tanam dan lahan usaha pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan dan pesisir</li> <li>6. Pengembangan peta agribisnis serta peningkatan efisiensi, dan konsolidasi agribisnis, dan pengembangan metode usaha tani konservasi</li> <li>7. Penyediaan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan agribisnis di sentra-sentra produksi, termasuk pengembangan sistem jaringan irigasi, rehabilitasi dan konservasi sumber-sumber air dan pasar lokal</li> <li>8. Peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadap sumber-sumber permodalan, akses terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank, teknologi, informasi dan pasar</li> <li>9. Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui diversifikasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan</li> <li>10. Penerapan dan perluasan upaya pengendalian hama, penyakit dan gulma secara terpadu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan evaluasi sumberdaya pangan potensial yang ada di masyarakat, baik di tingkat lokal, regional dan nasional</li> <li>2. Pengembangan Produksi Pangan beras dan non beras yang didukung dengan peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi dan produktivitas masyarakat pertanian dan nelayan</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan, rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan pendukung ketahanan pangan, antara lain seperti prasarana distribusi, transportasi, pergudangan dan sarana produksi pupuk, benih, permodalan, irigasi</li> <li>4. Perluasan lahan pertanian baru serta pemanfaatan lahan tidur dan lahan produktif lainnya, dengan mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang Nasional dan Wilayah (RUTRN/W);</li> <li>5. Peningkatan akses Petani terhadap Modal, teknologi, benih/bibit, pasar dan informasi bisnis pangan</li> <li>6. Peningkatan efisiensi sistem produksi, teknologi pengolahan dan distribusi komoditas pangan</li> <li>7. Pengembangan produk olahan pangan karbohidrat dan protein untuk meningkatkan daya tarik bahan pangan non beras</li> <li>8. Sosialisasi pola konsumsi gizi seimbang (sehat) dan lebih memperluas gerakan kecintaan terhadap makanan Indonesia</li> <li>9. Pemberian bantuan tambahan pangan dalam jangka pendek kepada keluarga miskin/rawan pangan sebagai bagian dari program khusus</li> <li>10. Menerapkan kebijakan ekonomi pangan yang berorientasi pangan</li> <li>11. Pengembangan kapasitas kelembagaan pangan yang menjamin meratanya distribusi pangan</li> </ol>

	Program Pengembangan Agribisnis	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Pengembangan standarisasi mutu dan produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang berlaku secara internasional</li> <li>12. Peningkatan efisiensi pemasaran dan pengembangan sistem informasi agribisnis</li> <li>13. Pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan</li> <li>14. Pengembangan lembaga keuangan perdesaan</li> <li>15. Peningkatan kualitas masyarakat pertanian serta kehutanan dan nelayan serta mendorong pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan</li> <li>16. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang agribisnis, termasuk pengembangan lembaga penyedia teknologi, informasi, penyuluhan, investasi, dan jasa pelayanan lainnya</li> <li>17. Penciptaan iklim usaha yang mendorong berkembangnya agribisnis dengan nilai tambah yang dinikmati masyarakat pertanian dan nelayan</li> <li>18. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, perkebunan, termasuk penyediaan pupuk, bibit dan jaringan irigasi</li> <li>19. Perbaikan posisi tawar petani/nelayan dalam kegiatan agribisnis dan silvobisnis melalui pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan</li> <li>20. Peningkatan daya saing produk pertanian dan kehutanan</li> <li>21. Pengurangan hambatan perdagangan barang dan jasa pertanian antar wilayah dan antar batas negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Pengembangan lembaga teknologi pangan dan kegiatan penelitian</li> <li>13. Penyempurnaan tata niaga dan distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan antar pulau/antar daerah dan daya saing ekspor-impor</li> <li>14. Peningkatan efektivitas sistem pemantauan ketahanan pangan pada setiap tingkatan</li> <li>15. Pengembangan pengelolaan stok pangan khususnya oleh masyarakat, termasuk pengembangan kembali lumbung desa dan pengembangan hutan cadangan pangan serta pengembangan budidaya perikanan</li> <li>16. Pengembangan kapasitas organisasi masyarakat dan jaringan kerja dalam penyediaan sarana dan prasarana, produksi, pengilahan, distribusi perdagangan/pemasaran dan informasi</li> <li>17. Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang lahan pertanian pangan abadi untuk mencegah penciptaan lahan pertanian</li> <li>18. Penegakan hukum terutama dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hayati yang merupakan sumberdaya genetik bagi pengembangan produksi pangan</li> <li>19. Koordinasi kebijakan dan program ketahanan pangan</li> <li>20. Pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian termasuk jaminan mutu produk dan jasa serta pengawasannya</li> <li>21. Penyusunan peta informasi potensi pengembangan bisnis pangan yang terpadu dengan sentra-sentra produksi pertanian bahan pangan</li> <li>22. Pengembangan kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan, serta pembinaan pelaku bisnis pangan sesuai kebutuhan pasar</li> <li>23. Pengembangan industri pengolahan pangan skala rumah tangga /mikro, kecil dan menengah</li> </ol>

	Program Pengembangan Agribisnis	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	<p>22. Penyehatan BUMN pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan</p> <p>23. Pengembangan kemitraan usaha-usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan</p> <p>24. Peningkatan akses pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pertanian terhadap sumber-sumber pendanaan, teknologi dan informasi</p> <p>25. Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat perkebunan</p> <p>26. Pengembangan areal pertanian baru melalui pengembangan perdesaan, pengembangan wilayah dan pengembangan transmigrasi</p> <p>27. Peningkatan budidaya laut dan pemanfaatan lahan marginal untuk akuakultur serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sesuai dengan prinsip kelestarian</p> <p>28. Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam usaha peternakan yang produktif termasuk di dalamnya usaha pelayanan jasa seperti jasa konsultasi dan penyuluhan, kesehatan hewan dan penyediaan sarana produksi</p> <p>29. Pengembangan sumberdaya agribisnis peternakan berbasis sumberdaya lokal</p> <p>30. Pengembangan hutan rakyat dan pengusahaan hasil hutan non kayu yang dikaitkan dengan industri pengolahan</p> <p>31. Peningkatan mutu dan intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura</p>	<p>24. Peningkatan penyediaan bahan pangan asal ternak yang berkualitas dan aman bagi masyarakat dan bahan baku industri pangan melalui upaya peningkatan pengetahuan dan pendapatan masyarakat melalui upaya peningkatan populasi produktivitas ternak dan kualitas hasil ternak</p> <p>25. Peningkatan konsumsi pangan asal ternak dan ikan oleh masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan pendapatan masyarakat, serta penganekaragaman pangan hasil ternak dan ikan</p> <p>26. Penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatan ketahanan pangan</p> <p>27. Pengembangan sistem pengolahan produk-produk hortikultura sesuai potensi masyarakat dan potensi wilayah</p>

## Lampiran 7. DRAFT REPETA 2002 PEMBANGUNAN PERTANIAN

### 1. Program Pengembangan Pertanian

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
<p>Pemberdayaan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi pertanian (Kegiatan pokok # 2)</p> <p>Petani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pangan</li> <li>- hortikultura</li> <li>- ternak</li> <li>- perkebunan</li> </ul> <p>Analisis Usaha Tani Keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah petani perempuan berpendidikan tamat SD dan SLTP lebih rendah (44 %) dibanding petani laki-laki (67 %)</li> <li>Rumah Tangga Usaha Perikanan :</li> <li>Jumlah nelayan pengusaha perikanan laki-laki (94,34 %) lebih tinggi dari pengusaha perempuan (5,66%)</li> <li>Jumlah nelayan buruh untuk laki-laki lebih tinggi (87,2%) dibanding perempuan (12,8%).</li> <li>Usaha budidaya ikan di kolam/ sawah untuk laki-</li> </ul>	<p><u>Akses</u> Akses perempuan lebih rendah dari laki-laki dalam hal pelatihan, penyuluhan, teknologi, informasi, kelembagaan, modal dan kredit</p> <p><u>Partisipasi</u> Partisipasi petani perempuan lebih rendah dari laki-laki</p> <p><u>Kontrol</u> Kontrol pada teknologi serta penentuan kredit dan penguasaan lahan oleh perempuan lebih rendah dari laki-laki</p> <p><u>Manfaat</u> Teknologi dan informasi</p>	<p>1. Laki-laki diperlakukan sebagai KK, dan perempuan hanya sebagai pendamping KK (suami)</p> <p>2. Kondisi ini mengakibatkan akses asset, SD, informasi, teknologi, modal/ kredit semua hanya ditujukan kepada suami/laki-laki sebagai KK</p> <p>3. Upah kerja perempuan lebih rendah dari pada laki-laki</p> <p>4. Hak penguasaan terhadap lahan bertumpu pada hukum adat maupun hukum waris secara Islam</p>	<p>Pemberdayaan petani dalam penerapan teknologi melalui peningkatan kualitas layanan publik oleh lembaga-lembaga penyelia teknologi serta penyelenggaraan pendidikan, latihan dan penyuluhan</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga penyelia teknologi dan meningkatnya penerapan paket-paket teknologi oleh petani</p>	<p>1. Pemberdayaan SDM keluarga petani (laki-laki dan perempuan) dalam penerapan teknologi melalui :</p> <p>a. Peningkatan kesadaran penyuluh, penyelia (agen perubah) agar lebih sensitif terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam pertanian.</p> <p>b. Melakukan revisi seluruh materi pelatihan agribisnis dan ketahanan pangan yang mengintegrasikan konsep kesetaraan keadilan gender (KKG)</p> <p>c. Pelatihan, penyuluhan dan pembinaan penerapan teknologi di bidang pertanian bagi perempuan dan laki-laki sesuai dengan</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas SDM keluarga petani (laki-laki dan perempuan) dalam penerapan teknologi dan informasi.</p> <p>2. Bertambahnya jumlah penyuluh dan penyelia yang peka terhadap peran perempuan dan laki-laki.</p> <p>3. Konsep KKG terintegrasi dalam materi penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan pertanian pada umumnya.</p> <p>4. Meningkatnya jumlah peserta petani perempuan dalam kegiatan pelatihan, penyuluhan dan pembinaan pertanian</p>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
	<p>laki lebih tinggi (90,18%) dari perempuan (9,82%).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha budidaya ikan di tambak/air payau oleh nelayan pengusaha laki-laki lebih tinggi (91,53%) dibanding perempuan (8,47%)</li> <li>• Dari 378.864 kelompok tani anggota perempuannya hanya 11%.</li> <li>• Jumlah kelompok perempuan tani hanya 46.000 (8% dari total kelompok tani).</li> </ul>	pertanian bagi perempuan lebih rendah dari laki-laki.	5. Belum ada perlindungan keselamatan kerja akibat penggunaan teknologi			<p>kebutuhan dan potensi lokal.</p> <p>d. Penciptaan teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki misalnya alat tanam benih langsung "atambela" alat penyemprot, alat perontok, alat pengolah tanah.</p> <p>2. Penyediaan informasi yang dapat menampung kebutuhan laki-laki dan perempuan, misalnya lewat poster, brosur, leaflet.</p> <p>3. Penyebaran informasi sampai ke pengguna utama (keluarga petani)</p> <p>4. Pemberian kemudahan kredit/modal untuk pelaku agribisnis (petani perempuan dan laki-laki) melalui revisi peraturan.</p>	<p>5. Meningkatnya jumlah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan petani perempuan dan laki-laki.</p> <p>6. Tersedianya Alsintan yang sesuai dengan kebutuhan petani perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan spesifik masyarakat setempat.</p> <p>7. Bertambahnya informasi baik kualitas dan kuantitas.</p> <p>8. Meningkatnya jumlah keluarga petani yang mendapatkan informasi.</p> <p>9. Meningkatnya jumlah pelaku agribisnis (petani perempuan dan laki-laki) yang menerima kredit/ modal.</p>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
Pengembangan industri dan penerapan alat dan mesin pertanian dan perikanan (Kegiatan pokok # 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industri alsintan relatif masih bias gender karena berbagai ukuran yang dipakai (Secara ergonomic maupun ekonomik) cenderung menggunakan laki-laki sebagai ukuran, mengabaikan fakta penggunaannya (contoh merancang alsin untuk tandur yang secara ergonomic cocok untuk laki-laki, padahal penandur itu perempuan).</li> <li>Secara empiris pengembangan alsintan lebih ditujukan untuk meringankan beban laki-laki.</li> </ul>	<p><u>Akses</u> Akses perempuan tani terhadap alsintan jauh lebih rendah dibanding laki-laki ; semua program yang berhubungan dengan alsintan hanya ditujukan bagi laki-laki.</p> <p><u>Partisipasi</u> Perempuan tani kurang dan hampir tidak dilibatkan dalam program penyuluhan yang mengintroduksi alsintan</p> <p><u>Kontrol</u> Karena peralatan yang ada ditujukan untuk laki-laki, maka kontrol perempuan relatif hampir tidak ada.</p>	<p>1. Bias gender, dalam arti bahwa alsintan dan teknologi pada umumnya dianggap bidang yang "berat" atau bukan domain perempuan</p> <p>2. Persepsi bahwa alsintan untuk efisiensi produksi mengabaikan kenyataan sosial lainnya, yakni kehadiran buruh tani perempuan serta kelembagaan lokal yang mampu mendukung keberlanjutan</p>			<p>1. Penyadaran gender dalam menciptakan alsintan bagi para peneliti maupun teknisi.</p> <p>2. Melaksanakan identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna sebelum memproduksi alsintan.</p> <p>3. Memonitor produksi alsintan agar sesuai bagi pengguna baik laki-laki maupun perempuan.</p> <p>4. Penyuluhan bagi rumah tangga petani bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menggunakan alsintan sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>1. Adanya sejumlah peneliti/ teknisi yang mampu menciptakan alsintan yang responsif gender.</p> <p>2. Tersedianya alsintan yang ramah bagi penggunaanya (laki-laki dan perempuan).</p> <p>3. Tersedianya data tentang produksi alsintan yang responsif gender.</p> <p>4. Meningkatnya frekuensi penyuluhan tentang penggunaan alsintan yang responsif gender.</p>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
		<p><u>Manfaat</u>            Sekalipun            alsintan mampu            meningkatkan            efisiensi produksi            namun            berdampak            negatif bagi            perempuan tani            (buruh tani).            Dan menyebab-            kan perempuan            kurang            memperoleh            manfaat            langsung,            khususnya            penguasaan            teknologi karena            alsintan tidak            ramah terhadap            perempuan.</p>	<p>keberlanjutan            pertanian.            3. Para peneliti/            teknisi sebagian            besar terdiri            atas laki-laki            yang juga            beranggapan            bahwa alsintan/            teknologi hanya            bagi laki-laki, uji            coba alsintan            juga mengabai-            kan perempuan.</p>				

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
Pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. (Kegiatan pokok # 13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan pengolahan hasil pertanian tentang penggunaan kualitas produk rendah.</li> <li>• Kualitas produk hasil pertanian masih rendah.</li> <li>• Pelaksana pengolahan produk Pertanian skala keluarga sebagian besar adalah perempuan.</li> </ul>	<p><u>Akses</u> Kehadiran perempuan dalam pembinaan penerapan mutu produk pertanian tidak menjadi pertimbangan penting</p> <p><u>Partisipasi</u> Partisipasi perempuan dalam kegiatan pengolahan hasil Pertanian tinggi tetapi terhadap pembinaannya rendah dibanding laki-laki.</p> <p><u>Kontrol</u> Kontrol perempuan terhadap teknologi penerapan mutu produk Pertanian lebih rendah dari laki-laki karena partisipasi terhadap pembinaannya rendah.</p>	<p>1. Persepsi umum memandang bahwa laki-laki adalah pelaku usaha dalam keluarga dan perempuan hanya sebagai tenaga tambahan. Hal ini menyebabkan tidak adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai pelaku usaha pengolahan produk pertanian.</p> <p>2. Akibat dari butir 1 di atas, perempuan tidak dilibatkan dalam program pembinaan penerapan mutu produk Pertanian.</p>			<p>1. Penyadaran gender bagi pembuat dan pelaksana kebijakan melalui lokakarya, <i>roundtable discussion</i>, dll.</p> <p>2. Penyusunan rencana strategis pengembangan dan penerapan mutu produk Pertanian yang responsif gender.</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan perempuan/kelompok tani perempuan dalam memproduksi produk pertanian yang bermutu sesuai dengan keinginan/permintaan pasar melalui pembinaan terpadu.</p> <p>4. Menyediakan fasilitas berupa alat pengolahan produk pertanian sederhana atau teknologi tepat guna bagi pengembangan</p>	<p>1. Bertambahnya (15%) jumlah penentu dan pelaksana kebijakan yang responsif gender.</p> <p>2. Tersusunnya rencana strategis pengembangan dan penerapan mutu produk pertanian yang responsif gender.</p> <p>3. Bertambahnya (15%) jumlah perempuan yang mampu menghasilkan produk olahan bermutu sesuai dengan permintaan pasar.</p> <p>4. Tersedianya fasilitas pengolahan produk pertanian sederhana dan teknologi tepat guna bagi pelaku usaha pengolahan produk pertanian.</p>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
		<u>Manfaat</u> Manfaat penerapan teknologi mutu produk lebih banyak dinikmati oleh laki-laki.				industri pengolahan yang telah mempetimbangkan pelaku pengolahan untuk mendapatkan mutu produk pasar yang memenuhi permintaan pasar.	

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
Pengembangan lembaga keuangan perdesaan (Kegiatan pokok # 14)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi perempuan tani dalam kelembagaan ekonomi perdesaan lebih rendah bila dibanding dengan petani laki-laki.</li> <li>Jumlah KUD (SP 93) 8.278, yang aktif hanya 75,56%, dan yang tidak aktif 8%, sisanya sebesar 16,4% tutup.</li> <li>Kelompok perempuan tani miskin di perdesaan masih rendah dalam memanfaatkan akses lembaga keuangan dibanding laki-laki.</li> </ul>	<p><u>Akses :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terhadap lembaga keuangan rendah.</li> <li>Calon anggota KUD hanya 22,4 % perempuan.</li> </ul> <p><u>Kontrol :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dari 18.000 pengawas KUD hanya 18,2% perempuan.</li> <li>Dari 29.000 pengurus KUD aktif, hanya 5,7% perempuan.</li> <li>Perempuan yang menjadi pengurus KUD hanya menduduki jabatan stereotipe.</li> </ul> <p><u>Partisipasi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota aktif KUD hanya 21% perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laki-laki sebagai KK mempunyai akses kepada lembaga keuangan lebih tinggi dibanding perempuan.</li> <li>Di dalam lembaga keuangan perdesaan, sebagian besar perempuan tidak berada pada posisi pengambil keputusan (sekretaris, bendahara, pembukuan).</li> <li>Kolateral kredit untuk perempuan harus dari laki-laki (KUD).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pelayanan publik pada dunia usaha dan masyarakat pertanian untuk mendukung pengembangan agribisnis antara lain terhadap sumber-sumber permodalan, teknologi, pasar, dan perijinan.</li> <li>Pengkajian pengembangan lembaga keuangan perdesaan yang mendukung pengembangan agribisnis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas pelayanan publik terutama yang terkait dengan akses terhadap sumber permodalan, teknologi, pasar, dan perijinan untuk pengembangan agribisnis.</li> <li>Dihasilkannya konsep pengembangan lembaga keuangan dan perdesaan yang mendukung pengembangan agribisnis.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan untuk meningkatkan kesadaran pengelola dan pelaksana lembaga keuangan mengenai kesetaraan dan keadilan gender (KKG).</li> <li>Bersama-sama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan PKM/Meneg Koperasi dan UKM memberikan akses dan informasi yang sama terhadap perempuan dan laki-laki untuk pengembangan agribisnis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pelayanan sumber-sumber lembaga keuangan perdesaan yang sensitif gender.</li> <li>Dihasilkannya konsep lembaga/ sumber-sumber keuangan yang sensitif gender guna pengembangan agribisnis.</li> </ol>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai KUD aktif, hanya 26% perempuan.</li> <li>• Akses thd KUT lebih besar dimanfaatkan oleh laki-laki.</li> </ul> <p><u>Manfaat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurus perempuan kurang menikmati kredit.</li> <li>• Jumlah anggota perempuan yang menikmati KUD lebih rendah.</li> <li>• Jumlah pinjaman untuk perempuan lebih sedikit dari laki-laki.</li> </ul>					

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Pen yebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
Perbaikan posisi tawar petani/ nelayan dalam kegiatan agribisnis dan silvobisnis melalui pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan. (Kegiatan pokok # 19)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi tawar petani (pria dan wanita) dalam kegiatan agribisnis lemah.</li> <li>• Dari sejumlah 378.864 kelompok tani hanya 11% anggota wanitanya.</li> <li>• Jumlah kelompok wanita tani berjumlah 46.000 (8% dari total kelompok tani).</li> </ul>	<p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan memiliki akses lebih rendah dari laki-laki dalam kelembagaan petani (kelompok tani dewasa), karena adanya asumsi bahwa kelompok tani itu untuk KK rumah-tangga petani saja; padahal perempuan sebagaimana laki-laki juga pelaku/ aktor dalam agribisnis.</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan tani dianggap hanya mampu berpartisipasi dalam kelembagaan yang berhubungan dengan kegiatan domestik (PKK KB), sehingga partisipasinya dalam kelembagaan agribisnis</li> </ul>	<p>1. Pandangan stereotip bahwa laki-laki adalah KK menyebabkan pembuat kebijakan tidak/ belum peka gender sehingga kebijakan dan program pengembangan agribisnis dirancang berdasarkan asumsi bukan fakta/empiris dan cenderung mengabaikan perempuan dalam kelembagaan petani.</p> <p>2. Akibat butir 1 di atas, perempuan lebih dimarjinalkan dalam kelembagaan petani,</p>			<p>1. Penyadaran gender bagi:</p> <p>a. pembuat dan pelaksana kebijakan secara berkesinambungan berupa lokakarya, <i>round table discussion</i>, dll.</p> <p>b. pelatih/penyuluh/pembina tentang pentingnya memberikan kesempatan/hak-hak yang sama bagi pria dan wanita dalam kelembagaan petani melalui pelatihan, lokakarya, orientasi, dll;</p> <p>c. para penyusun dan pelaksana program melalui pelatihan wawasan gender dan teknik analisis gender dengan metode/pola pelatihan berjenjang</p>	<p>1a. Bertambahnya jumlah penentu dan pelaksana kebijakan yang mengikuti penyadaran gender atau mengikuti lokakarya tentang pengarusutamaan gender .</p> <p>1b. Bertambahnya jumlah pelatih/ penyuluh/pembina yang responsif gender (mampu memotivasi pentingnya pelibatan wanita dalam kelembagaan petani seperti kelompok, KUD, dll.)</p> <p>1c. Terlaksananya pelatihan berjenjang bagi para penyusun dan perencana program serta bertambahnya jumlah para penyusun dan</p>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
		<p>rendah.</p> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secara empiris, petani laki-laki dan perempuan memiliki kontrol lebih rendah terhadap harga input dan produk pertanian karena kebijakan harga input dan produk pertanian (contoh harga dasar gabah) bersifat <i>top down</i> dan berorientasi pada kepentingan pihak "hulu".</li> </ul> <p><b>Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Petani laki-laki dan perempuan kurang memperoleh manfaat yang layak dari usaha taninya sehingga usahanya tidak berkelanjutan, khususnya ketahanan pangan rumah-tangga.</li> </ul>	<p>perempuan dominan dilibatkan dalam kelembagaan yang berbau domestik dan program berskala mikro yang kurang berkelanjutan (berorientasi proyek) atau tidak diintegrasikan dalam arus utama (<i>main-stream</i>) program pemberdayaan kelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis.</p>			<p>d. petani perempuan dan laki-laki disadarkan tentang hak-hak mereka dalam berorganisasi/ berpartisipasi dalam kelembagaan petani yang mendukung keberlanjutan agribisnis, melalui penyuluhan, orientasi, pelatihan, studi banding, dll.</p> <p>2. Menyusun modul bagi pengembangan perempuan tani dalam kelembagaan petani yang responsif terhadap kebutuhan praktis (kredit, input) dan strategis (meningkatkan kepemimpinan perempuan)</p>	<p>perencana yang responsif gender.</p> <p>1d. Bertambahnya jumlah kelompok perempuan tani menjadi 20%.</p> <p>2a. Tersedianya modul pelatihan wawasan sosial gender dan teknik analisis gender bagi pelatih/ penyuluh/pelaksana/pembina untuk sosialisasi di lingkup Pertaniandan lapangan.</p> <p>2b. Tersusunnya modul pengembangan perempuan tani dalam kelompok atau organisasi tani yang responsif terhadap kebutuhan praktis dan strategis gender.</p>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat perkebunan. (Kegiatan pokok # 25)	<p><b>a) Perkebunan Rakyat</b></p> <p>1. RT Usaha Perkebunan rakyat. Total: 63.8 juta. (29.33% dari RPI) P: 80.32%, W: 19.68%</p> <p>2. Berdasar komoditinya pekebun karet sebanyak 975.8 ribu orang, hanya 12.87% diantaranya pekebun perempuan.</p> <p>3. Pengolahan hasil perkebunan didominasi oleh laki-laki.</p>	<p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekebun perempuan tidak memiliki akses terhadap keanggotaan kelompok tani pekebun karena yang dianggap KK adalah laki-laki.</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Karena tidak masuk sebagai anggota kelompok maka perempuan pekebun rendah partisipasinya dalam program-program pembangunan perkebunan.</li> </ul> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan pekebun hampir tidak memiliki kontrol terhadap program yang</li> </ul>	<p>1. Petani pekebun mencakup laki-laki &amp; perempuan tetapi pembuat kebijakan dan pelaksana menganggap bahwa KK hanya laki-laki.</p> <p>2. Akibat dari anggapan butir 1, perempuan hanya dianggap sebagai pekerja keluarga (tidak diperhitungkan).</p> <p>3. Akibat dari anggapan butir 1 program-program pembangunan (penyuluhan, pelatihan, stimulan) dan bantuan kredit lebih ditujukan untuk laki-laki.</p>			<p>1. Melakukan penyadaran gender kepada berbagai pihak:</p> <p>a. Melakukan lokakarya penyadaran gender bagi para pembuat kebijakan dan pelaksana program pembangunan perkebunan.</p> <p>b. Melakukan pelatihan untuk penyuluh dan petugas pelaksana program pembangunan perkebunan.</p> <p>c. Melakukan penyuluhan penyadaran gender bagi semua kalangan dari petugas penyuluh hingga petani baik laki-laki maupun perempuan.</p> <p>2. Melakukan redefinisi data statistik mengenai Kepala Keluarga Pekebun agar tidak hanya mencakup KK pria tetapi juga perempuan</p>	<p>1a. Seluruh pembuat kebijakan/pelaksana menjadi responsif gender;</p> <p>1b. Meningkatnya (30%) jumlah penyuluh dan petugas yang mengikuti pelatihan dan mengintegrasikan perspektif gender dalam program penyuluhan;</p> <p>1c. Meningkatnya (10%) jumlah petani laki-laki dan perempuan yang menyadari hak-haknya atas program pembangunan.</p> <p>2. Tersedianya data statistik pekebun yang responsif gender.</p> <p>3a. Tersedianya kebijakan/peraturan yang secara eksplisit menyatakan adanya kesempatan yang sama untuk laki-laki</p>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
	<b>b) Kawasan Industri</b>  1. Pekerjaan tetap perusahaan perkebunan P: 76.68%, W: 23.32%  2. Pekerja harian lepas perusahaan perkebunan didominasi oleh perempuan.	<u>Akses</u> • Akses perempuan dalam pengambilan keputusan di perusahaan perkebunan lebih rendah dari laki-laki.  <u>Partisipasi</u> • Jumlah perempuan sebagai pengelola perusahaan perkebunan lebih sedikit dari laki-laki tetapi jumlah perempuan pekerja lepas harian lebih tinggi dari laki-laki.  <u>Kontrol</u> • Pekebun perempuan yang menjadi karyawan tetap	1. Adanya asumsi di kalangan penentu kebijakan dan pelaksana perusahaan pertanian/ perkebunan bahwa pekerjaan yang ditangani laki-laki adalah pekerjaan yang berat sementara perempuan mengerjakan pekerjaan yang ringan.  2. Akibat butir 1, pekerjaan perkebunan oleh laki-laki & perempuan, namun kesempatan menduduki posisi mengambil keputusan selalu dipihak laki-laki (contoh Mandor,	1. Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat perkebunan.	1. Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat.	1. Pelatihan/penyadaran gender bagi penentu kebijakan dan pelaksana (pemilik/ pengusaha), khususnya tentang persamaan hak pekerja perempuan dan laki-laki sebagai pekerja tetap di lingkungan perusahaan perkebunan serta pengakuan bahwa kemampuan & kualitas kerja (bukan jenis kelamin) adalah aspek penentu produktivitas kerja  2. Pelatihan dalam meningkatkan ketrampilan (di luar keahlian administrasi) bagi perempuan pekebun.  3. Memberikan kuota bagi pekebun perempuan untuk menduduki posisi staf/pekerja tetap perkebunan tanpa	1 a. Meningkatnya (25%) jumlah penentu kebijakan yang responsif gender;  1b. Bertambahnya (15%) jumlah pekerja tetap perkebunan ;  2. Bertambahnya (15%) jumlah pekerja tetap perempuan yang mempunyai ketrampilan di luar bidang administrasi. (majerial, IPTEK,dll).  3. Bertambahnya (15%) jumlah perempuan pekebun yang menjadi pekerja tetap.  4. Meningkatnya (10%) jumlah perempuan pengambil keputusan di perusahaan perkebunan.

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
		<p>lebih rendah kontrolnya dari pekebun laki-laki karena umumnya tidak menduduki posisi pengambil keputusan.</p> <p><b>Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena umumnya perempuan pekebun menjadi tenaga berstatus harian lepas/borong, mereka tidak mendapatkan tunjangan dan fasilitas lain sebagaimana pekerja tetap.</li> </ul>	<p>Ketua, staf, karyawan tetap dll)</p> <p>3. Meskipun jumlah jam kerja laki-laki dan perempuan sama, pekerjaan perempuan (upah, gaji dan tunjangan) dihargai lebih rendah.</p> <p>4. Kepemilikan saham perusahaan perkebunan didominasi laki-laki*)</p>			<p>mengabaikan kualitas.</p> <p>4. Memberikan kuota bagi perempuan untuk menduduki jabatan pengambil keputusan pada perusahaan perkebunan.</p>	

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumber daya lokal. (Kegiatan pokok # 29)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total Rmt Usaha Peternakan 5,68 juta (26,15% dari RPI).</li> <li>• Lebih dari 7% nya adalah WKRT.</li> <li>• Dalam anggota rumah tangga peternakan, perempuan dianggap sebagai pekerja keluarga (tanpa upah).</li> <li>• Anggota Kelompok Petani Ternak kebanyakan laki-laki.</li> </ul>	<p><u>Akses</u> Usaha peternakan merupakan usaha keluarga, sehingga baik perempuan maupun laki-laki mempunyai akses dalam usaha peternakan kecil maupun besar.</p> <p><u>Partisipasi</u> Meskipun data yang ada menunjukkan bahwa sebesar 93% pelaku usaha peternakan adalah laki-laki, kenyataannya pelaksanaan kegiatan peternakan seperti ternak kecil (unggas, kambing) dan ternak besar (sapi perah) adalah perempuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya asumsi bahwa KK rumah tangga peternak laki-laki adalah laki-laki menyebabkan tidak adanya pengakuan terhadap WKRT sebagai peternak</li> <li>2. Akibat dari asumsi butir 1 di atas, perempuan peternak WKRT dan anggota rumah tangga peternak tidak mendapat fasilitas subsidi (ternak, pakan ternak), kredit, penyuluhan dan pelatihan.</li> <li>3. Akibat asumsi pada butir 1 di atas, perempuan peternak diabaikan dalam</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyadaran dan pelatihan teknik analisis gender (TAG) dalam penyusunan program pembangunan peternakan bagi penyuluh/pembina di tingkat lapangan.</li> <li>2. Menyediakan pelayanan kredit dan fasilitas subsidi bagi kelompok ternak peternak perempuan dan laki-laki.</li> <li>3a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan usaha peternakan bagi WKRT dan anggota rumah tangga yang terlibat langsung dalam usaha peternakan</li> <li>3b. Mendorong tumbuhnya kelompok perempuan peternak yang mampu mengelola usaha ternak mereka secara efisien dan menguntungkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertambahnya jumlah penyuluh/pembina di tingkat lapangan yang menggunakan TAG dalam penyusunan program pembangunan peternakan (materi, metoda dan sasaran serta monitoring dan evaluasi program) yang berbasis kebutuhan masyarakat dan keunggulan sumberdaya lokal</li> <li>2. Bertambahnya jumlah anggota kelompok peternak perempuan dan laki-laki yang memperoleh pelayanan kredit usaha</li> <li>3a. Bertambah luasnya pelatihan usaha peternakan dan pendampingan usaha ternak yang</li> </ol>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
		<p><u>Kontrol</u> Kecuali dalam manajemen kandang, perempuan kontrol terhadap pemeliharaan dan pemasaran ternak pada tingkat rumah-tangga,</p> <p><u>Manfaat</u> Karena terbatasnya akses terhadap sumber-daya, iptek, informasi, serta fasilitas pelayanan dalam rangka pembangunan, maka perempuan peternak hanya sedikit memperoleh manfaat dari program pembangunan peternakan.</p>	<p>pembentukan kelompok peternak, sehingga semua kegiatan pembinaan program pembangunan peternakan selalu ditujukan pada kelompok tani ternak yang umumnya beranggota laki-laki.</p>				<p>dinikmati oleh WKRT dan anggota rumah tangga peternak perempuan.</p> <p>3b. Bertambahnya jumlah kelompok perempuan peternak yang mengembangkan usaha ternak sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal spesifik.</p>

## 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
Pengembangan produk olahan pangan karbohidrat dan protein untuk meningkatkan daya tarik bahan pangan non beras (Kegiatan pokok # 7)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kualitas produk olahan pangan.</li> <li>2. Kebijakan pemerintah yang belum memperhatikan potensi produk pangan pokok lokal.</li> <li>3. Kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap produk olahan pangan non beras.</li> <li>4. Secara empiris pengembangan alsintan lebih ditujukan untuk meringankan beban kerja laki-laki.</li> </ol>	<p><u>Akses:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya persentase perempuan yang menguasai Iptek dan kredit tentang kualitas produk olahan pangan.</li> <li>• Rendahnya persentase perempuan yang menerima pelayanan informasi tentang standar mutu produk olahan pangan yang sehat dan aman.</li> </ul> <p><u>Kontrol:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya persentase perempuan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya data pendukung yang terpilah menurut jenis kelamin tentang pelaku usaha produk olahan pangan.</li> <li>• Rendahnya persentase tingkat pengetahuan dan keterampilan perempuan, menyebabkan rendahnya akses terhadap penguasaan IPTEK yang terkait dengan kualitas produk olahan pangan.</li> <li>• Terbatasnya pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi dan distribusi bahan pokok beras, karbohidrat non beras dan sumber protein.</li> <li>• Pembinaan pengembangan industri produk olahan pangan.</li> <li>• Peningkatan kegiatan kelembagaan pengembangan produk olahan pangan yang memposisikan perempuan sebagai pengurus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya produksi pangan.</li> <li>• Meningkatnya luas panen padi dan sumber pangan lainnya.</li> <li>• Meningkatnya jumlah UKM dalam bisnis pangan.</li> <li>• Meningkatnya usaha bisnis pangan di tingkat lokal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan survei yang menyajikan data pelaku usaha pengolahan produk olahan pangan yang terpilah menurut jenis kelamin.</li> <li>• Pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dalam meningkatkan kemandirian perempuan dalam aspek manajerial dan teknologi produk olahan pangan.</li> <li>• Peningkatan pelayanan informasi produk olahan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertambahnya jumlah perempuan pengelola usaha produk olahan pangan yang profesional di bidangnya.</li> <li>• Meningkatnya persentase perempuan yang potensial dan kompeten dalam kelembagaan pengembangan produk olahan pangan.</li> <li>• Meningkatnya persentase perempuan yang profesional yang terlibat dalam penelitian dan penyuluhan diversifikasi produk olahan pangan.</li> </ul>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
		<p>menduduki posisi pimpinan dalam pengembangan produk pangan karbohidrat dan protein.</p> <p><b>Partisipasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya keterlibatan perempuan dalam industri produk olahan pangan, tetapi sebagai pengelola belum dapat diakui.</li> </ul> <p><b>Manfaat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya persentase perempuan yang memperoleh kesempatan dalam pengembangan produk olahan pangan.</li> </ul>	<p>informasi tentang standar mutu produk olahan pangan yang sehat dan aman bagi perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan/pengambil keputusan/perencana yang terkait dalam pengembangan produk olahan pangan karbohidrat dan protein masih didominasi oleh laki-laki dan mereka masih mengabaikan potensi perempuan sebagai pelaku pada produk pengolahan pangan.</li> </ul>			<p>kepada perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kegiatan kelembagaan pengembangan produk olahan pangan yang memposisikan perempuan sebagai pengurus</li> </ul>	

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000-2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
Pengembangan kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan, serta pembinaan pelaku bisnis pangan sesuai kebutuhan pasar (Kegiatan pokok # 22).	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan untuk perempuan tani belum berkembang karena bias terhadap laki-laki.</li> <li>•Persentase laki-laki yang mendapat pembinaan pelaku bisnis pangan masih dominan.</li> <li>•Mitra usaha antara pelaku bisnis besar dan kecil masih didominasi oleh laki-laki dan berorientasi pada produksi.</li> <li>•Jumlah Perempuan tani dan pelaku bisnis belum banyak dilibatkan dalam kelembagaan dan pengembangan bisnis pangan.</li> <li>•Jaringan kerja dalam kegiatan Agribisnis masih didominasi oleh laki-laki.</li> <li>•Potensi perempuan tani dalam berorganisasi belum dioptimalkan.</li> </ul>	<p><u>Akses :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Meskipun banyak perempuan sebagai pelaku bisnis pangan tetapi aksesnya terhadap sumberdaya lebih rendah dibanding laki-laki.</li> </ul> <p><u>Kontrol :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Perempuan kurang memiliki kontrol terhadap sumber daya kemitraan bisnis pangan.</li> </ul> <p><u>Partisipasi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Perempuan pelaku bisnis lebih banyak berorientasi pada aspek produksi dibanding aspek pemasaran, atau hanya sebagai pelaku pasif.</li> </ul> <p><u>Manfaat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Perempuan belum banyak menerima manfaat dari program-program intervensi dalam rangka pengembangan kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Asumsi masyarakat bahwa pelaku bisnis pangan adalah laki-laki.</li> <li>•Kemampuan dan keterampilan sebagian perempuan pelaku bisnis masih belum memadai.</li> <li>•Pengurus kelembagaan bisnis masih didominasi oleh laki-laki.</li> <li>•Kebijakan pengembangan kemitraan masih netral gender dan belum ada keberpihakan kepada perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pengembangan kemitraan bisnis pangan.</li> <li>•Pengembangan kapasitas kelembagaan pangan yang menjamin meratanya distribusi pangan.</li> <li>•Pengembangan pengelolaan stok pangan oleh masyarakat.</li> <li>•Pembinaan dan pengembangan kualitas keragaman konsumsi pangan masyarakat serta memperluas gerakan kecintaan terhadap makanan asli Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap potensi pangan.</li> <li>•Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam sistem ketahanan dan bisnis pangan.</li> <li>•Meningkatnya ketersediaan informasi pasar pangan dalam negeri/ luar negeri.</li> </ul> <p>Meningkatnya jumlah UKM dalam bisnis pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Menurunnya jumlah keluarga rawan pangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penyuluhan dan pendampingan bagi pelaku bisnis pangan perempuan yang berorientasi pada proses produksi dan pasar.</li> <li>•Peningkatan penyediaan dan pelayanan informasi pasar bagi pelaku bisnis pangan perempuan.</li> <li>•Peningkatan kemampuan perempuan pelaku bisnis pangan dalam membangun jaringan kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Meningkatnya % perempuan pelaku bisnis pangan yang memperoleh pembinaan baik dari pemerintah maupun swasta.</li> <li>•Meningkatnya persentase perempuan pelaku bisnis pangan yang memiliki akses terhadap informasi pasar.</li> <li>•Meningkatnya jumlah perempuan yang aktif pada kelembagaan dan jaringan kerja dalam bisnis pangan.</li> <li>•Meningkatnya jumlah kelembagaan bisnis pangan yang dikelola oleh perempuan.</li> </ul>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
Pengembangan industri pengolahan pangan skala rumah tangga/ mikro, kecil dan menengah. (Kegiatan pokok # 23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan pengusaha hanya 33 %.</li> <li>• Peran perempuan dalam usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga sekitar 40 % dari 2,19 juta usaha.</li> <li>• Dari 40 % IKKR yang dikelola perempuan, pekerjanya masih didominasi pekerja laki-laki (71,1 %) dari 5,3 juta pekerja.</li> </ul>	<p><u>Akses :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan pelaku bisnis pangan kurang memiliki akses terhadap sumber permodalan dari lembaga keuangan formal.</li> <li>• Output rata-rata usaha perempuan jauh lebih rendah (27 %).</li> <li>• Akses perolehan modal usaha bersifat tradisional atau warisan dari orang tua (modal sendiri).</li> </ul> <p><u>Kontrol:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status pekerja perempuan yang tidak dibayar masih tinggi (89 %, sedangkan laki-laki 62 %).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengakuan terhadap bisnis industri pengolahan pangan sangat rendah (dianggap sebagai usaha suami), sehingga akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya industri (IPTEK, pelatihan, pendampingan, modal, dan informasi) masih kurang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan industri produk olahan pangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas.</li> <li>• Meningkatnya jumlah UKM dalam bisnis pangan.</li> <li>• Meningkatnya usaha bisnis pangan di tingkat lokal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan peraturan yang memberikan pengakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki sebagai pengusaha industri pengolahan pangan.</li> <li>• Penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan bagi perempuan pengusaha dalam aspek manajerial dan teknologi industri, khususnya pengolahan pangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Peraturan yang memberikan pengakuan yang sama terhadap perempuan.</li> <li>• Meningkatnya jumlah perempuan pengusaha yang mengikuti penyuluhan mengenai industri pengolahan pangan sehingga lebih profesional dan mandiri.</li> </ul>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
		<u>Partisipasi:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pekerja perempuan di sektor Industri Pertanian rendah (29 %).</li> </ul> <u>Manfaat:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan belum banyak menerima manfaat dari program-program intervensi dalam rangka pengembangan industri pengolahan pangan.</li> </ul>					

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
Penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatan ketahanan pangan (Kegiatan pokok # 26)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan tani dan nelayan, terlebih kelompok miskin perdesaan kurang atau hampir tidak memiliki akses terhadap skim kredit.</li> <li>Lembaga keuangan (KUD, perbankan, koperasi) yang memberikan pelayanan kredit lebih banyak memberikan kepada laki-laki.</li> </ul>	<p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan pengurus KUD (hanya sebagai anggota KUD). Tercatat hanya 22,48 % dari 2,95 juta perempuan sebagai "calon" anggota KUD. Hanya 11,6 % perempuan penerima kredit, dan 14,6 % laki-laki.</li> </ul> <p><b>Kontrol:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya 1,82 % perempuan dari 18.421 pengawas KUD.</li> <li>Sekitar 5,7 % perempuan dari 29.072 pengurus KUD aktif dengan posisi stereotipe: bendahara, atau sekretaris.</li> <li>Rata-rata upah perempuan usaha tani 86,07 % dari upah laki-laki tani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan PKRT tidak diakui secara formal.</li> <li>Informasi mengenai skim kredit tidak sampai kepada PKRT maupun anggota RTP lainnya.</li> <li>Diasumsikan perempuan hanya melakukan usaha kecil-kecilan.</li> <li>Diasumsikan perempuan dianggap kurang dapat menyusun proposal yang dapat meyakinkan pihak bank.</li> <li>Sasaran kredit program cenderung kepada kepala keluarga (laki-laki).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan kredit yang menunjang ketahanan pangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya produksi pangan.</li> <li>Meningkatnya luas panen padi dan sumber pangan lainnya.</li> <li>Meningkatnya stok pangan di tingkat desa.</li> <li>Meningkatnya usaha bisnis pangan.</li> <li>Meningkatnya jumlah UKM dalam bisnis pangan.</li> <li>Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam sistem ketahanan pangan dan bisnis pangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan peraturan yang memberikan pengakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki sebagai pengusaha.</li> <li>Penyediaan kredit tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.</li> <li>Penyempurnaan peraturan skim kredit yang responsif terhadap kebutuhan perempuan tani.</li> <li>Penumbuhkembangan lembaga keuangan perdesaan yang melibatkan perempuan tani (KUM).</li> <li>Penyuluhan dan pelatihan tentang penyusunan proposal usaha kepada perempuan.</li> <li>Penumbuhan kesadaran gender kepada lembaga keuangan permodalan dan pembuat program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Peraturan yang memberikan pengakuan yang sama terhadap perempuan.</li> <li>Meningkatnya persentase perempuan pengusaha yang mendapatkan penyuluhan dan pelatihan pembuatan proposal.</li> <li>Meningkatnya jumlah perempuan pengusaha yang mendapatkan bantuan kredit modal usaha.</li> <li>Tersedianya peraturan tentang skim kredit yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan.</li> <li>Meningkatnya jumlah lembaga keuangan perdesaan mandiri yang dikelola perempuan.</li> </ul>

Kebijakan (Kegiatan Pokok Propenas 2000- 2004)	Data Pembuka Wawasan	Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	Masalah Gender	REPETA 2001		REPETA 2002	
				Rencana Aksi	Indikator Gender	Rencana Aksi	Indikator Gender
		<u>Partisipasi:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekitar 21,19 % perempuan dari 7,570 juta anggota KUD aktif,</li> <li>• Sekitar 25,96 % perempuan dari 57.952 orang karyawan KUD aktif.</li> </ul> <u>Manfaat:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perempuan penerima kredit kecil dan nilai nominalnya pun kecil.</li> </ul>					

**Lampiran 8.**  
**Rumahtangga Perusahaan menurut**  
**Kategori Rumahtangga dan Jenis Kelamin**

Kategori Rumahtangga Pertanian	Persentase		Total Rumah- tangga
	Laki-laki	Perempuan	
I. Pertanian Tanaman Pangan			
1. Tanaman Pangan dan Holtikultura	TAD*	TAD	18,09
2. Usaha Holtikultura	TAD	TAD	5,47
II. Usaha Peternakan	93,0	7,0	5,68
III. Rumah Tangga Penangkapan Ikan			
1. Rumahtangga Usaha Perikanan			
a. Ikan laut	94,34	5,66	0,66
b. Ikan di perairan umum	94,34	5,66	0,39
2. Usaha Budidaya Ikan			
a. Ikan di kolam/sawah	90,18	9,82	0,796
b. Ikan tambak/payau	91,53	8,47	0,95
IV. Rumahtangga Kehutanan dan Perkebunan			
a. Rumahtangga Usaha Perkebunan	80,32	19,68	6,38
b. Perkebunan Karet	87,13	12,87	0,976
c. Budidaya kayu-kayuan kehutanan	51,0	49,0	3,99
d. Peladang berpindah dan perambah hutan	TAD	TAD	1,07

\* TAD : Tidak Ada Data

**Lampiran 9.**  
**Rumahtangga Perusahaan menurut**  
**Kategori Perusahaan dan Jenis Kelamin**

Kategori Perusahaan Pertanian	Persentase		Total Rumah- tangga
	Laki-laki	Perempuan	
1. Perusahaan			
• Tanaman Pangan dan Holtikultura	72,1	24,9	5.902
• Sapi Perah	TAD	TAD	28.587
• Rumah Potong Hewan	TAD	TAD	5.074
• Penangkapan Ikan	88,3	11,7	11.714
• Budidaya Perikanan	TAD	TAD	13.620
• Pelabuhan Perikanan	TAD	TAD	2.602
2. Pekerja Tetap Perusahaan Perkebunan	76,68	23,32	388.180
3. Perusahaan Kehutanan	81,1	18,9	137.463
4. Perusahaan Hutan Tanaman Industri	70,75	29,25	2.957
5. Penangkapan Satwa Liar dan Wisata Alam (SLNA)			
• Pekerja Tetap	89,6	10,4	14.596
• Pekerja harian lepas	TAD	TAD	6.198

\* TAD : Tidak Ada Data

## Lampiran 10. Pengentasan Kemiskinan

Kategori Pengentasan Kemiskinan	Persentase		Total Rumah-tangga
	Laki-laki	Perempuan	
1. Kelompok Wanita Tani Diversifikasi Pangan dan Gizi			
• Jumlah Kelompok (buah)	TAD*	TAD	6.911
• Jumlah Anggota (orang)	TAD	TAD	138.580
• Jumlah Kader (orang)	TAD	TAD	3.729
• Petugas Lapangan I (orang)	TAD	TAD	783
• Petugas Lapangan II (orang)	TAD	TAD	4.684
2. Kelompok Pembinaan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil			
• Kelompok Petani Kecil (buah)	34	40	41.322
3. Karya Usaha Mandiri (Jabar)	TAD	TAD	2.010

\* TAD : Tidak Ada Data

**Lampiran 11.**  
**Profil Gender Pertanian dalam IPTEK**

Kategori Pertanian dalam IPTEK	Persentase		Total (Orang)
	Laki-laki	Perempuan	
A. SDM Petani/Peternak/Pekebun/Petani Hutan (orang)			
1. Kelompok Tani	89	11	378.864
2. Program SLPHT 97/98	79,7	22,3	103.721
3. Program SLPHT 98/99	78,5	21,5	86.589
4. Petani Nelayan Muda Berprestasi	85	15	387
B. SDM Ahli/Honorar SDM "Lingkup" Pertanian (orang)			
1. Tenaga Ahli Ristek	92,2	7,8	650
2. Peneliti IPTEK (Umum)	75	25	
3. Doktor Pertanian Perguruan Tinggi	70	30	831
4. Doktor Teknologi	84	16	389
5. Guru Besar Perguruan Tinggi			
Pertanian	91	8	179
Teknologi	97	3	90
IPA dan Rekasa Produksi	72	28	125.220
Menurut Sektor			
a. Pemerintah	68	32	88.250
b. Perguruan Tinggi	75	25	18.425
c. Industri Manufaktur	90	10	18.275
C. Departemen Pertanian (orang)			
1. Penyuluh Pertanian	83,4	16,6	37.333
2. Pegawai Badan Litbang Peranian	77,87	22,13	6.987
D. Lingkungan Perhutanan (orang)			
1. Pegawai Dephutbun	88,75	11,25	45.231
2. Unit Pelaksana Teknis	88,5	11,5	21.655

- (b) Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula.
  - (c) Untuk menganjurkan pengadaaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak;
  - (d) Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum wanita selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka;
- 3) Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkala berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta revisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan.

#### **Pasal 14**

- 1) Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh wanita di daerah pedesaan dan peranan yang dimainkan wanita pedesaan dalam kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sector ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagi wanita daerah pedesaan.
- 2) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan mengecap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya menjamin kepada wanita pedesaan hak:
  - (a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat;
  - (b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;

- (c) Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial;
- (d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan keterampilan teknik mereka;
- (e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau kewiraswastaan;
- (f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;
- (g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna serta perlakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;
- (h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi.

**Lampiran 13**  
**DAFTAR NAMA PESERTA (I)**  
**TIM GAP PEMBANGUNAN PERTANIAN**

No.	Nama	Instansi
1	Dr. Yulfita Raharjo, Ms	LIPI
2	Dr. Soedarti Surbakti	BPS
	<b>Bappenas</b>	
3	DR.Ir. Joyo Winoto, MSc	Karo Pangan, Pertanian dan Pengairan
4	Ir. Erianti Puspa	Kabag Perkebunan, Biro Pertanian
5	Lenny N. Rosalian, SE, MSc	Kabag Pemberdayaan Perempuan, Biro KKBWP
6	Yohana Gultom, S. SOS, MIA	Staf Biro KKPWP
	<b>Meneg PP</b>	
7	dr. Heru Prasetyo Kasidi, MSc	Karo Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
8	dr. Suryadi Soeparman, MPH	AsDep Pengembangan Kebijakan Deputy I
9	dr. Rachmat Sentika, SPA.MARS	AsDep Pengembangan Program Deputy I
10	Dra. Surjani	AsDep Ekonomi/Ketenagakerjaan, Deputy II
11	Ir. Hertomo Heroe, MM	AsDep Sosialisasi Gender
12	Drs. Safrudin Setiabudi, M.Hum	Staf, AsDep Pendidikan, Sospol, Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Deputy IV
	<b>Departemen Pertanian</b>	
13	Ir. Metrawinda Tunus, Msc	Kabag Perencanaan Sumberdaya
14	Dr.Ir. Soedrajat Martaamidjaja, MEd	Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
15	Ir. Gayatri K. Rama	Biro Perencanaan
16	Dr. Togar Napitupulu	Pusat Data Pertanian
17	Dr. Sri Suharni Siwi	Pusat Litbang Tanaman Pangan
18	Ir. Ning Pribadi	Kabag Perencanaan Program Pembangunan
	<b>Dephutbun</b>	
19	Ir. Kristianto	Karo Perencanaan
20	Ir. Ismuni, MM	Kabag Evaluasi dan Laporan, Biro Perencanaan
21	Ir. Laksmi Banowati	Biro Perencanaan
	<b>BPS</b>	
22	Nanan Sunardi, MSc	Kabag Statistik Tanaman Palawija dan Hortikultura, BPS
	<b>WSP II - CIDA</b>	
23	Libby Posgate	Advisor Element 100
24	Beverly Boutilier	Advisor Element 200
25	Siti Hidayati Amal	Focal Point Elemen 100
26	Dewayani D. Savitri	Focal Point Elemen 200

	<b>Konsultan</b>	
27	Ir. Siti Sugiah Mugniesyah, MSc	Konsultan POP Sektor Pertanian
28	DR. Ace Suryadi	Konsultan POP Sektor Pendidikan
29	Nursyahbani Katjasungkana, SH	Konsultan POP Sektor Hukum
30	Prof. DR. T.O. Ihromi	Konsultan POP Sektor Tenaga Kerja
31	Achie Luhulima, MA	Konsultan POP Sektor Tenaga Kerja
32	DR. Ir. Aida Vitalaya	Konsultan POP Sektor Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Lampiran 14  
**DAFTAR NAMA PESERTA (II)**  
**PENYUSUNAN REPETA 2002 SEKTOR PERTANIAN**

No.	Nama	Undangan
	<b>Bappenas</b>	
1	Asriani	Direktorat Pangan, Pertanian, dan Pengairan
2	Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc	Kabag Pemberdayaan Perempuan, Biro KKPP
3	Susianti Puspasari, BSc. M.Sc	Staf Biro KKBPWP
	<b>Departemen Pertanian</b>	
4	Feroza Sulvia	Setditjen Bina Produksi Tanaman Pangan
5	Kurnia Nur	Sesditjen Bina Produksi Hortikultura
6	Bambang SJ	Sesditjen Bina Produksi Perkebunan
7		Sesditjen Bina Produksi Peternakan
8	Donna Gultom	Sesditjen Bina Pengolahan dan Pemasaran
		hasil Pertanian
9	Ir. Ratna Kusuma Dewi	Pusat Pengembangan Ketersediaan
		Pangan, Badan Bimas Ketahanan Pangan
10		Direktur Pembiayaan, Ditjen Bina Sarana Pertanian
11	Rika Aprijani, SE Zulasmai	Biro Perencanaan
12		Kepala Bagian Monev Biro Perencanaan
13		Kepala Bagian Program Anggaran Badan Urusan Ketahanan Pangan
14	Ir. Sofyan Iskanda	Tim Inti SAGA
15	Ir. Rita Nur Suhaeti	Tim Inti Socio Ec. And Gender Analisis Balitbang Pertanian
16	Ir. Pamela Fadhilah, MA	Tim Inti Gender dan Penyuluhan DAFEP Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian
17	Ir. Gayatri K. Rana	
18	Ir. A Fuad	Ditjen BP Hortikultura
19	Ir. Sri Ardianti	Sekretariat Ditjen Produksi Perkebunan
20	Drh. Tri Satya Putri N, PhD	Dir. Kesehatan Hewan Ditjen Bina Produksi Peternakan
21	Drh. Chairul Arifin	Sekretariat Ditjen Bina Produksi Peternakan
22	Ir. Effendi Simanjuntak	Sekretariat Ditjen Bina Sarana Pertanian
23	Diah Ismayaningrum, SPSE	Sekretariat Ditjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

24	Ir. Heri Sulyanto	Sekretariat Badan Pengembangan SDM Pertanian
25	Ir. Djodi Tjahyadi	Sekretariat Badan Bimas Ketahanan Pangan
26	Ir. Resfa Fitri, M.PI,St	Biro Perencanaan Setjen Deptan
	<b>Meneg PP</b>	
27	Agustin Erni, Sri Danti	Biro Perencanaan
28	Bariyoto	Staf, Asdep Urusan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pertanian
29	Drg. Erna Soeryadi, MS. APBI	Staf, Asdep Urusan Pengembangan Kebijakan dan Program
	<b>BPS</b>	
30	Sutarno	Direktorat Statistik Pertanian
	<b>Fasilitator</b>	
31	Ir. Siti Sugiah M, MS	

## DAFTAR SINGKATAN

BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPP	: Balai Penyuluhan Pertanian
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DEPTAN	: Departemen Pertanian
DPG	: Diversifikasi Pangan dan Gizi
GAP	: <i>Gender Analysis Pathway</i>
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
HAKI	: Hak Atas Kekayaan Intelektual
HKM	: Hutan Kemasyarakatan
HKR	: Hutan Kerakyatan
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IDT	: Inpres Desa Tertinggal
IKOPIN	: Institut Koperasi Indonesia
INPRES	: Instruksi Presiden
IPTK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
JPS	: Jaring Pengaman Sosial
KK	: Kepala Keluarga
KP	: Kegiatan Pokok
KPK	: Kelompok Petani Kecil
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KUD	: Koperasi Unit Desa
KUM	: Karya Usaha Mandiri
KUT	: Kredit Usaha Tani
KWT	: Kelompok Wanita Tani
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
P2W	: Peningkatan Peranan Wanita
P4K	: Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil
PHT	: Pengendalian Hama Terpadu
PKP	: Program Ketahanan Pangan
PMDHT	: Program Masyarakat Desa Hutan Terpadu
PMMR	: Perbaikan Menu Makanan Rakyat
POP	: <i>Policy Outlook and Plan of Action</i>

PPA	: Program Pengembangan Agribisnis
PPL	: Petugas Penyuluh Lapangan
PROPENAS	: Program Pembangunan Nasional
PS	: Perhutanan Sosial
PSE	: Penelitian Sosial Ekonomi
PT	: Perguruan Tinggi
REPELITA	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
REPETA	: Rencana Pembangunan Tahunan
RI	: Republik Indonesia
RPI	: Rumahtangga Pertanian di Indonesia
RUTRNW	: Rencana Umum Tata Ruang Nasional dan Wilayah
SAKERNAS	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SLPHT	: Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SOUP	: Struktur Ongkos Usahatani Padi dan Palawija
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TDK	: Tenaga Kerja Dalam Keluarga
TK	: Tenaga Kerja
TLK	: Tenaga Kerja Luar Keluarga
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UB	: Usaha Bersama
UPGK	: Usaha Perbaikan Gizi Keluarga
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-undang Dasar
WID	: <i>Women in Development</i>
WKBPP	: Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian
WKPP	: Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian
WKRT	: Wanita Kepala Rumahtangga
WSP	: <i>Women's Support Project</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik, 1993. Sensus Pertanian Indonesia. Ringkasan Hasil. BPS, Jakarta – Indonesia.
- . Sensus Pertanian, Hasil Pencacahan Rumahtangga Pertanian Sub Sektor Peternakan. BPS, Jakarta – Indonesia.
- , 1993. Sensus Pertanian, Hasil Pencacahan Rumahtangga Pertanian Sub Sektor Hortikultura. BPS, Jakarta – Indonesia.
- , 1993. Sensus Pertanian, Hasil Pencacahan Rumahtangga Pertanian Sub Sektor Perkebunan. BPS, Jakarta – Indonesia.
- , 1996. hasil Pencacahan Survei Perkebunan Karet Rakyat, BPS, Jakarta-Indonesia.
- , 1996. hasil Pencacahan Survei Perkebunan Kopi Rakyat, BPS, Jakarta-Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, 1999. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 1999. Jakarta-Indonesia
- , 1998. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Survei/ Laporan Struktur Ongkos Usahatani Padi dan Palawija, Usahatani Hortikultura, Pertanian. Jakarta – Indonesia.
- , 1998. Wanita dan Pria di Indonesia 1997. BPS dan UNIFEM, Jakarta-Indonesia.
- , 2000. Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2000. BPS, Jakarta-Indonesia.
- Chambers, R., 1993. *Challenging the Profession: Frontiers for Rural Development*, Intermediate Technology Publications..
- Departement Kehutanan dan Perkebunan, 1987/98 – 1996/97. Statistik Kehutanan dan Perkebunan Indonesia, Jakarta – Indoneisa.
- Diamond, Nancy K, 1998. Proyek Pesisir *Gender Assesment*. CRC/URI CRMP NRM Secreatriat, Jakarta.
- Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) , 1999-2004
- Grijns, Mies, Ines Smyth, Anita van Velzen, Sugiah Machfud dan Pudjiwati Sayogyo (Ed.). 1994. *Different Women Different Work, Gender and industrialisation in Indonesia*. Aldershot- Avebury, UK.

Indikator Kesejahteraan Rakyat, 1999

INPRES No 14,1974. Perbaikan Menu Makanan Rakyat (PMMR)

Kantor Menteri Negara Pemeberdayaan Perempuan Republik Indonesia;  
Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan  
2000-2004, Jakarta.

Mubyarto, dkk.,1984.

Mugniesyah, Sugiah M. dkk. 1996. Proyek Konservasi dan Pengelolaan Daerah  
Aliran Sungai (DAS) Nasional Komponen DAS Cimanuk Hulu. Peranan  
Wanita Dalam Pertanian Lahan Kering. Kerjasama Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat dengan Lembaga  
Penelitian IPB.

Mugniesyah, Sugiah ; K. MIZUNO, N. IWAMOTO, 1999. *Agricultural Sustainable Development in Rural Indonesia : A Gender and Social Change Perspectives*. Report for Core University Program between Bogor Agricultural University and The University of Tokyo.

Pribadi, 2000. Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Sistem Kelembagaan  
di bajo Sulawesi Tenggara. Pascasarjana IPB. Bogor

Prihmantoro, H., Y.H. Indriani, 1995. Paprika Hidroponik dan NonHidroponik.  
Penebar Swadaya. Jakarta.

Pusat Penyuluhan Pertanian, 1998.

Reintjes, C., B. Haverkort, dan A. Waters-Bayer, 1992. *Farming for the Future. An Introduction to Low-External-Input and Sustainable Agriculture*.  
McMillan. ILEIA, Netherlands.

Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 2001.

Rencana Pembangunan Lima Tahunan Keenam (REPELITA VI) 1991/95 – 1998/  
1999 BUKU III.

Rogers, M Everett. 1976. *Communication and Development: Critical Perspectives*.  
Sage Publications. Beverly Hills/London.

Sarpian , T. Lada. Mempercepat Berbuah Meningkatkan Produksi  
Memperpanjang Umur. Penebar Swadaya.

Sayogyo, Pudjiwati, 1983. Peranan Wanita dalam Pembangunan Masyarakat  
Desa. CV. Rajawali. Jakarta

Sayogyo, P, Winati Wigna, Fredian Tonny, Ida Yuhana F, dan Melani A.S, 1993.  
Penyusunan Strategi Penelitian Hibah Bersaing Bidang Peranan Wanita.

Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Studio Driya Media Untuk Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara, 1994. Teknik-teknik Participatory Rural Appraisal. Gambaran Teknik-teknik . Berbuat Bersama Berperan Setara. Pengkajian dan Perencanaan Program Bersama Masyarakat. Bandung.

Syukur, M. 1992. Karya Usaha Mandiri (KUM) : Suatu Model Alternatif Skim Kredit untuk Golongan Miskin di Pedesaan Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 9 No. 2 & Vol. 10 No. 1, Juli 1992, Hal 120 – 127. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS 2000-2004.

Uphoff, N., 1993. *Prospects for Sustainable Agricultural Development in Indonesia*, Bogor Agricultural University.

Uphoff, N., 1984. *Local Institutional Development : An Analytical Sourcebook with Cases*. Kumarian Press. Connecticut, USA.

SG14